



## BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah amispatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Hal itu Tidak terbatas pada pemuktahiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan system dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2014, Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan; basis akrual pada sub sitem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Kabupaten Solok Selatan mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah itu kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan



segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketepatan terhadap peraturan-undangan-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di





Provinsi Sumatera Barat,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor ;15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud;
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan;



24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan;
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

- BAB I    Pendahuluan
  - 1.1.    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2.    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3.    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II   Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
  - 2.1.    Ekonomi Makro
  - 2.2.    Kebijakan Keuangan
  - 2.3.    Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1.    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2.    Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV  Kebijakan Akuntansi;
  - 4.1.    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
  - 4.2.    Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3.    Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4.    Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V   Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1    Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1   Pendapatan –LRA
    - 5.1.2   Belanja
    - 5.1.3   Surplus/defisit-LRA
    - 5.1.4   Pembiayaan
    - 5.1.5   Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran
  - 5.2    LPSAL
    - 5.2.1   Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 5.2.2   Penggunaan Saldo Awal Lebih
    - 5.2.3   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
    - 5.2.4   Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
    - 5.2.5   Saldo Anggaran Lebih Akhir
  - 5.3    Neraca





- 5.3.1 Aset Lancar
- 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
- 5.3.3 Aset Tetap
- 5.3.4 Aset Lainnya
- 5.3.5 Kewajiban
- 5.3.6 Ekuitas Dana
- 5.4 Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan-LO
  - 5.4.2 Beban
  - 5.4.3 Surplus/defisit-LO
- 5.5 Laporan Arus Kas
  - 5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi
  - 5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
  - 5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
  - 5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
  - 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
  - 5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD
  - 5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD
  - 5.5.8 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.6.1 Ekuitas awal
  - 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
  - 5.6.3 Koreksi-koreksi
  - 5.6.4 Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
  - 6.1 Domisili dan Operasional Entitas
  - 6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
- BAB VII Penutup



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional**

**1. Kondisi Topografi**

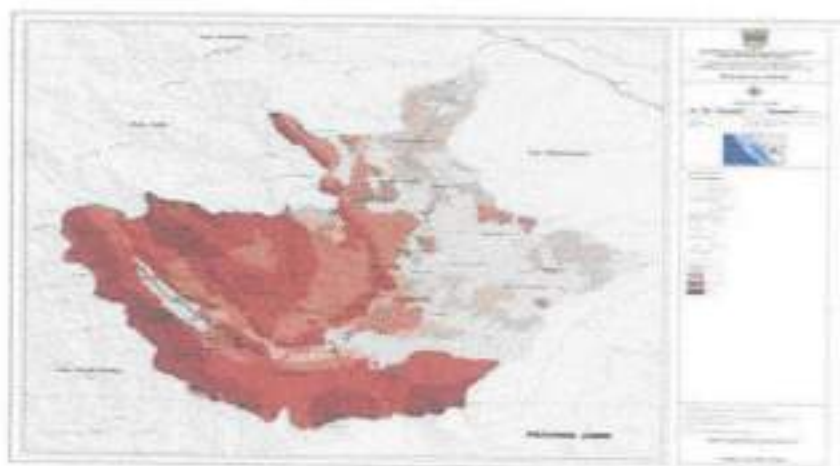
Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km<sup>2</sup>) dan yang sangat curam (482,11 Km<sup>2</sup>) Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan**

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Datar, Agak Lendai	0 – 8	792,12
2	Lendai	8 – 15	530,68
3	Agak Curam	15 – 25	608,32
4	Curam	25 – 40	885,17
5	Sangat Curam	> 40	480,11
Total			3.294,39

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

**Peta Kelas Lereng Kabupaten Solok Selatan**







## 2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 168.411 jiwa pada tahun 2018 menjadi 184.854 jiwa pada tahun 2022. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% dan yang terendah pada tahun 2021 yaitu 1,55%. Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis kelamin penduduk Solok Selatan diatas 100%.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (jiwa)	168.411	171.075	182.027	184.854	186.619
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	51,1	51,9	55,3	56,1	57,28
Jumlah keluarga	40.480	40.976	43.297	44.199	45.070
Rata-rata jumlah anggota Keluarga	4,16	4,18	4,20	4,16	4,19
Pertumbuhan penduduk (%)	1,70	1,58	6,40	1,55	2,05
Sex ratio (%)	101,89	107,74	103,59	104,21	104,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2021 berdasarkan luas wilayah adalah 56,11 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (113,60 jiwa/km<sup>2</sup>), menyusul Kecamatan Sangir (80,49 jiwa/km<sup>2</sup>), Pauh Duo (73,65 jiwa/km<sup>2</sup>), Koto Parik Gadang Diateh (69,69 jiwa/km<sup>2</sup>), Sangir Jujuan (43,01 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Sangir Balai Janggo (37,01 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Sangir Batang Hari (20,69 jiwa/km<sup>2</sup>).

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk**  
**per Kecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Penduduk			Sex ratio (%)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	26.629	25.532	52.161	104,30	80,49
2	Sungai Pagu	16.570	16.578	33.148	99,95	113,60
3	Koto Parik Gadang Diateh	14.921	14.387	29.308	103,71	69,69
4	Sangir Jujuan	7.467	7.057	14.524	105,81	43,01
5	Sangir Batang Hari	8.486	8.029	16.525	105,82	20,69
6	Pauh Duo	9.843	9.697	19.440	102,56	73,65
7	Sangir Balai Janggo	10.408	8.340	19.748	111,43	37,01
Jumlah		94.334	90.520	184.854	104,21	56,11

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)



Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk, Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km<sup>2</sup>, kurang padat antara 51-250 jiwa/Km<sup>2</sup>, cukup padat 251-400 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km<sup>2</sup>).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat menggambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 52,40%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52-53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.218	7.890	16.108
05-9	7.819	7.385	15.204
10-14	8.280	7.772	16.052
15-19	8.739	8.269	17.008
20-24	8.819	8.028	16.847
25-29	7.798	7.436	15.232
30-34	7.788	7.729	15.517
35-39	7.378	7.109	14.487
40-44	6.869	6.584	13.423
45-49	5.853	5.634	11.517
50-54	4.987	4.665	9.652
55-59	3.828	3.781	7.607
60-64	2.937	3.044	5.981
65-69	2.246	2.255	4.471
70-74	1.480	1.477	2.957
75+	1.271	1.522	2.793
Jumlah	94.334	90.520	184.854

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan. Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel 2.5.





Tabel 2,5  
Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,03	4,89	4,22	
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.893.871,25	5.302.502,22	5.571.732,28	5.528.507,31	6.777.977,93
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3.612.139,52	3.796.200,14	3.977.409,14	3.928.031,94	4.059.514,72
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	30,14	30,97	32,58	30,37	31,26
Persentase Penduduk Miskin	7,07	7,33	7,15	7,52	6,51
Indeks Gini	0,308	0,295	0,307	0,277	0,253
Tingkat Pengangguran	5,85	4,91	5,62	4,84	3,71

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tahun 2017-2021 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 4.893.871,25 juta (ADHB) dan Rp. 3.612.139,52 juta (ADHK) pada tahun 2017 menjadi Rp 5.777.977,93 juta (ADHB) dan Rp. 4.059.514,72 juta (ADHK) pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 4,89 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2020 menjadi 4,22 persen. Namun pada tahun 2021 seiring dengan pulihnya kondisi masyarakat dari pandemic covid 19 yang sudah tidak lagi membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.777.977,93,- juta (ADHB) dan Rp. 4.059.514,72 juta (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010).

Jika dilihat perkembangan dan peningkatan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berfluktuasi dari tahun ketahun namun peningkatan ini diikuti oleh perlambatan pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meskipun pada periode tahun 2017-2019 secara jumlah terus mengalami peningkatan dari Rp. 4.893.870,69- juta pada tahun 2017 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019, namun jika dilihat dari pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu dari 6,54% menjadi 5,08. Hal ini juga terjadi pada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga mengalami peningkatan dari Rp. 3.612.139,52



juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan dari 5,18% menjadi 4,80%. Penurunan ini terjadi seiring dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang diiringi oleh penurunan harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi (pertumbuhan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh menurunnya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5.571.732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528.507,31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1,24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui social distancing dan physical distancing, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas diberbagai daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor permintaan (demand).

Namun pada tahun 2021, seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd immunity melalui program vaksinasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah melakukan beberapa kebijakan antara lain pelonggaran pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid. Selain itu membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB menjadi Rp. 5.777.977,93,- (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72 juta (mengalami penurunan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Pertumbuhan ini terjadi di hampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yang merupakan pembentuk perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Pengalihan; Transportasi dan Pergudangan.

### **2.1.2 Laju Inflasi**

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 915,33 milyar pada tahun 2017 menjadi 1.160,98 milyar pada tahun 2021. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten yaitu dari 18,70% pada tahun 2017 menjadi 20,42% pada tahun 2021. Untuk inflasi daerah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena di Sumatera Barat, BPS hanya menerbitkan inflasi untuk dua daerah yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Dilihat dari perkembangan indikator inflasi tahun 2021 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi inflasi yang mengalami penurunan dari 2,12 pada tahun 2020 menjadi 1,37 pada tahun 2021.





Dilihat dari ketersediaan sarana perdagangan dari tahun 2017-2021 tidak mengalami pertumbuhan yakni terdapat 2 pasar Kabupaten (pasar Padang Aro dan Pasar Muaralabuh) serta 33 Pasar Nagari. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.6  
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan  
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,70	19,44	20,21	20,20	20,42
2	Tingkat Inflasi	%	2,11	2,55	1,72	2,12	1,37
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar) ➢ Pasar Kabupaten ➢ Pasar Tradisional	unit	2 31	2 31	2 31	2 31	2 31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

### 2.1.3 PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan. Dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 30,14 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 32,58 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 30,37 juta pertahun namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah hingga menjadi 31,26 juta.

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan anggaran Tahun 2022 diarahkan pada penyisipan perangkat pengelolaan anggaran, baik sumberdaya maupun sistem pengelolaan anggaran agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah daerah. Pada aspek pendapatan diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan.



Arah kebijakan Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.
- Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional seperti penerimaan daerah bukan pajak.
- Meningkatnya porsi pengeluaran pembangunan dalam belanja dan pembiayaan daerah sehingga mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Solok Selatan.
- Mengoptimalkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, terutama melalui peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, koordinasi dan penyempurnaan prosedur pembayaran pajak.
- Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisis Belanja (SAB), Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pelaksana keuangan daerah dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian.
- Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD.
- Meningkatkan pengawasan anggaran melalui peningkatan penyusunan dan pengawasan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.
- Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Merintis program audit keuangan publik oleh kelembagaan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dari penggunaan keuangan daerah terutama pengeluaran keuangan untuk belanja pelayanan publik dan infrastruktur ekonomi.
- Meningkatkan mutu laporan keuangan setiap satuan kerja terkait dengan memberikan keterampilan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk tujuan umum, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan.

### 2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Tabel 2.7  
Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	854.266.062.246,00	841.180.510.684,00
Belanja	862.869.500.804,37	840.407.648.873,00
Penerimaan Pembiayaan	109.103.438.558,00	92.755.109.943,00
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	729.000.000,00





Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, pendapatan daerah anggarannya mengalami penurunan begitu pun dengan realisasinya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan penurunan pendapatan belanja daerah mengalami peningkatan begitupun penerimaan Pembiayaan daerah juga mengalami penurunan yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan nomor 25 tahun 2023 dan nomor 6 tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 serta nota kesepakatan nomor 180.30/ NK/BUP-SS/XI/2022 tahun 2022 tanggal 10 Nopember tahun 2022 tentang Perubahan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut:

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan-terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function*. Fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan obyek pendapatan tersebut.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menentukan beberapa kebijakan dalam rangka mengelola pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak;
- c. Inventarisasi potensi obyek pajak;
- d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM yang ada guna meningkatkan PAD;
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD; dan
- g. Optimalisasi BUMD.

### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan



anggaran dari pemerintah kabupaten, dapat juga dari pemerintah provinsi atau pusat atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Adapun kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2022 kabupaten solok selatan adalah:

- a. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follows program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan organisasi;
- e. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra;
- f. Dalam rangka kebijakan kemitraan swasta – pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan didasari atas prinsip keadilan;
- g. Belanja Investasi, diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022; dan
- h. Belanja Operasi diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional, pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, serta mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Solok Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan penerimaan kembali investasi pemerintah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun anggaran 2023, yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan SiLPA sebesar 54.000.044.742,51,-;
- b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- c. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang





dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	841.160.510.684,00	840.018.786.191,79	99,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	78.133.896.833,00	88.875.780.203,79	113,75
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	753.151.463.851,00	741.131.287.237,00	98,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38
BELANJA	840.407.648.873,00	785.417.181.448,28	93,46
BELANJA OPERASI	690.532.104.284,00	645.554.117.010,28	93,49
BELANJA MODAL	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,85
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15
TRANSFER	92.778.971.754,00	92.627.871.216,00	99,84
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	90,44
SURPLUS/DEFISIT	-92.026.109.943,00	-38.026.065.200,48	100
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.755.109.943,00	92.755.109.943,00	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	729.000.000,00	729.000.000,00	100
PEMBIAYAAN NETTO	92.026.109.943,00	92.026.109.943,00	100
SISALEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	53.996.775.184,78	0,00

Dari gambaran di atas, pencapaian Perda APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang bisa terealisasi sebesar 99,86% dari target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD, sedangkan efisiensi pengeluaran dapat dicapai dengan penghematan belanja dan pembiayaan.

Namun demikian, dinamika sosial-pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum atau pun asumsi dalam penyusunan APBD. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila: 1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD awal, 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, dan antar jenis belanja, 3). Keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta 4). Keadaan darurat.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.





Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 dilakukan sehubungan:

1. Adanya perubahan pada penerimaan pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 diperkirakan pendapatan daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini disebabkan terjadinya pemulihan ekonomi dikarenakan Corona Virus Disease (Covid-19) yang sudah semakin mereda berdampak terhadap perekonomian dunia, nasional dan daerah yang menyerang kedua sisi perekonomian baik sisi produksi atau penawaran (*supply*) maupun dari sisi permintaan (*demand*). Penurunan aktifitas ekonomi ini pada akhirnya berdampak terhadap perubahan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian dan rasionalisasi perkiraan pendapatan Negara berdampak terhadap penurunan kemampuan Negara dalam membiayai belanja negara, sehingga dilakukan Efisiensi, Realokasi dan Refocusing dari anggaran belanja negara. Dampak dari penurunan belanja negara ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan dana perimbangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kab. Solok Selatan perlu melakukan rasionalisasi perkiraan pendapatan.
2. Adanya penurunan dari prediksi target SILPA tahun 2022 berdasarkan Audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp92.740.090.448,27.
3. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Ringkasan Anggaran**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Tambah(kurang) (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Pendapatan	824.715.315.691	16.445.194.993	841.160.510.684
Belanja	899.949.091.788	33.237.528.839	933.186.620.627
Surplus/Defisit	-75.233.776.097	-16.782.333.846	-92.026.109.943
Penerimaan Pembiayaan	75.233.776.097	17.521.333.846	92.755.109.943
Pengeluaran Pembiayaan	0	729.000.000	729.000.000
Pembiayaan Netto	75.233.776.097	16.782.333.846	92.026.109.943

Dari pendapatan sebelum perubahan, ditargetkan sebesar 824.715.315.691,00 setelah anggaran perubahan menjadi Rp841.160.510.684,00 atau terjadi Kenaikan sebesar Rp16.445.194.993,00 atau sebesar 2 %.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2023**

Pendapatan	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik Turun	(%)
Pendapatan Asli Daerah	75.128.500.000,00	78.133.896.833,00	3.005.396.833,00	4
Pendapatan Transfer	739.711.856.691,00	753.151.463.851,00	13.439.798.160,00	2
Lain-lain Pendapatan yg sah	9.875.150,00	9.875.150,00	0	0
Total Pendapatan	824.715.315.691,00	841.160.510.684,00	16.445.194.993,00	2



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Secara keseluruhan anggaran belanja pada tahun 2023 terjadi peningkatan anggaran belanja pada anggaran perubahan sebesar Rp30.965.655.841,00 atau 3%. Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan**  
**per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	Sebelum	Sesudah	Penambahan	%
		Perubahan	Perubahan	(Pengurangan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Dinas Pendidikan	235.787.583.430	239.721.011.915	3.933.428.485	2%
2.	Dinas Kesehatan	166.655.659.648	177.389.049.838	10.743.389.990	6%
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	113.408.420.229	103.718.724.007	-9.689.696.222	-9%
4.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	28.629.039.243	29.629.955.806	200.916.563	1%
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.981.749.447	8.120.826.059	-860.923.388	-10%
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.245.145.457	5.382.911.328	-4.862.234.129	-47%
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.546.793.020	3.066.614.081	-480.178.939	-14%
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.759.352.736	4.350.454.840	-408.897.896	-9%
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.536.234.270	7.833.298.254	297.063.984	4%
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.044.393.026	7.285.343.854	-759.049.172	-9%
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.109.744.357	3.843.847.177	-265.897.180	-6%
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.643.864.048	4.739.629.840	1.095.865.792	30%
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.606.105.658	14.481.931.249	-124.174.409	-1%
14.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	35.234.306.543	33.591.904.951	-1.842.401.592	-5%
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.621.327.544	8.135.848.502	-485.479.042	-6%
16.	Sekretariat Daerah	43.603.436.375	52.854.674.644	9.251.238.269	21%
17.	Sekretariat DPRD	25.810.763.017	26.581.910.853	771.147.836	3%
18.	Kecamatan Koto Pank Gedang Diateh	3.254.488.178	3.370.119.409	115.631.231	4%
19.	Kecamatan Sungai Pagu	3.153.133.292	3.288.264.854	135.131.362	4%
20.	Kecamatan Sangir	2.859.482.551	3.238.142.807	378.660.256	13%
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.207.105.538	2.231.182.489	24.076.951	1%
22.	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.723.884.007	2.875.676.596	151.992.589	6%
23.	Kecamatan Pauh Duo	2.485.373.685	2.516.848.801	31.475.116	1%
24.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.274.844.075	2.166.303.685	-108.540.390	-5%



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	SKPD	Sebelum	Sesudah	Penambahan	%
		Perubahan	Perubahan	(Pengurangan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.028.587.593	5.294.925.713	-733.681.880	-12%
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.299.801.585	14.404.798.156	9.104.996.571	172%
27.	Inspektorat Daerah	5.046.090.220	4.915.920.045	-130.170.175	-3%
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.494.022.812	4.668.306.741	-825.716.071	-15%
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.809.902.665	116.012.586.957	13.202.684.272	13%
30.	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.108.857.519	36.275.427.576	5.166.570.057	17%
<b>JUMLAH</b>		<b>800.949.091.708</b>	<b>833.186.620.627</b>	<b>33.237.528.839</b>	<b>4%</b>





### BAB. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2021. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD tidak hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, dan untuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah ditetapkan dalam APBD. Sebagai contoh, pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Solok Selatan tanpa melalui rekening kas umum daerah dan pendapatan dan belanja dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh masing-masing Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2023 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan pendapatan sebesar Rp841.160.510.684,00 dan terealisasi sebesar Rp840.018.987.463,70 atau sebesar 99,86%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp884.655.899.039,10, realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp-43.496.049.708,10 atau sebesar -5,09%. Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan sebesar Rp840.407.648.873,00 dan terealisasi sebesar Rp785.417.181.448,28 atau sebesar 93,46%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Rp813.620.609.303,77 mengalami penurunan sebesar Rp-28.203.427.855,49 atau - 3,59%.

Sedangkan untuk Transfer Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan Rp92.778.971.754,00 dan terealisasi sebesar Rp92.627.871.216,00 atau 99,84%. Dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.710.633.037,00 atau 6,57%

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja tahun 2023 dan tahun 2022 beserta realisasinya.

**Tabel 3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer**  
**Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	PENDAPATAN	841.180.510.684	840.018.798.191,79	99,86%	864.666.580.392,10
2.	BELANJA	840.407.648.873,00	785.417.181.448,28	93,46%	813.620.609.303,77
	a. BELANJA OPERASI	645.554.117.010,28	645.564.117.010,28	93,34	608.487.257.791,10
	b. BELANJA MODAL	139.713.064.438,00	139.713.064.438,00	91,86	202.072.297.511,67
	c. BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000,00	150.000.000,00	1,93	3.061.064.001,00
3.	TRANSFER	92.778.971.754	92.627.871.216,00	99,84%	86.917.238.179,00

Target dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (SKPD)	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(% )	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Dinas Kesehatan	43.482.500.000	50.984.749.198,00	117,31%	58.074.856.661,00
2.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	400.000.000,00	197.882.000,00	49,47%	233.771.000,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	321.945.312,00	128,78%	507.447.501,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	27.566.777,70	27,57%	757.500,00
5.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300.000.000,00	219.352.000,00	73,12%	282.505.000,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000,00	367.480.400,00	79,71%	418.312.400,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	798.187.010.684,00	787.899.822.504,09	98,96%	825.136.249.977,10





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (SKPD)	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
JUMLAH		841.160.510.684,00	840.018.758.191,79	99,85%	884.655.899.039,10

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	239.721.011.915,00	231.238.973.390,00	96,46%	256.036.361.814,14
2.	Dinas Kesehatan	177.399.049.638,00	157.759.141.074,95	88,63%	156.967.136.237,08
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	103.718.724.007,00	97.313.465.929,00	93,82%	120.092.023.390,12
4.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	28.829.966.806,00	27.033.096.962,00	93,77%	28.078.657.528,00
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.120.826.069,00	7.949.582.097,00	97,89%	8.196.977.143,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.392.911.328,00	5.007.993.716,00	93,03%	5.523.030.404,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.056.814.081,00	2.813.226.038,00	92,03%	3.881.097.739,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.350.454.840,00	3.924.175.969,00	90,20%	5.068.612.945,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.833.298.254,00	7.287.226.220,00	93,03%	6.857.063.679,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.285.343.854,00	7.005.506.220,00	96,16%	7.431.805.918,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.843.847.177,00	3.469.587.107,52	90,26%	3.992.296.543,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.739.629.840,00	4.404.352.158,00	92,93%	10.658.938.387,06
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.481.931.249,00	11.677.780.817,81	80,64%	6.125.304.357,00
14.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	33.591.904.951,00	31.441.853.939,00	93,60%	23.147.327.204,00
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.136.848.502,00	7.735.977.924,00	95,09%	8.000.707.890,07
16.	Sekretariat Daerah	52.854.674.644,00	48.843.741.294,00	92,41%	33.399.601.985,00
17.	Sekretariat DPRD	26.581.910.853,00	25.369.998.823,00	95,44%	26.759.402.910,00
18.	Kecamatan Koto Parik Gedang Diatesh	3.370.119.409,00	3.307.539.183,00	98,14%	2.676.170.187,00
19.	Kecamatan Sungal Pagu	3.288.284.854,00	3.151.783.276,00	95,85%	2.484.686.454,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
20.	Kecamatan Sangir	3.238.142.807,00	3.192.186.275,00	98,58%	2.293.225.182,00
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.231.182.489,00	2.155.885.309,00	96,62%	1.927.020.068,00
22.	Kecamatan Sangir Batang Hai	2.875.676.598,00	2.782.887.871,00	97,12%	2.522.836.138,00
23.	Kecamatan Pauh Duo	2.516.848.801,00	2.429.055.443,00	96,51%	2.123.351.301,00
24.	Kecamatan Sangir Batai Jangga	2.186.303.885,00	2.132.759.725,00	98,45%	2.081.191.888,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.294.925.713,00	4.795.083.466,00	90,58%	24.609.926.890,30
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.404.798.156,00	14.127.771.570,00	98,08%	3.126.829.081,00
27.	Inspektorat Daerah	4.915.920.045,00	4.438.337.561,00	90,31%	4.484.466.996,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.668.306.741,00	4.263.485.593,00	91,33%	4.643.088.090,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.233.696.203,00	23.431.827.666,00	92,86%	25.752.103.389,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.275.427.576,00	34.921.150.853,00	96,27%	27.479.250.460,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>840.407.648.873,00</b>	<b>785.417.181.448,28</b>	<b>93,46%</b>	<b>813.620.609.303,77</b>

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel 3.3 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 yang dibagi dalam kelompok belanja operasi dan belanja modal disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	214.168.096.235,00	206.341.360.856,00	96,35%	207.805.360.000,00
2.	Dinas Kesehatan	164.640.870.541,00	147.633.683.032,85	89,67%	137.480.904.344,10
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perataan Ruang dan Pertanahan	11.018.223.663,00	9.682.369.043,00	87,88%	28.665.972.958,00
4.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	19.868.280.348,00	18.815.070.579,00	93,70%	19.006.014.185,00
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.873.101.377,00	7.719.048.097,00	98,03%	7.874.060.143,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.354.279.528,00	4.980.852.716,00	93,03%	5.505.630.404,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.051.314.081,00	2.607.726.038,00	82,02%	3.501.754.799,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.234.313.076,00	3.812.955.969,00	90,05%	4.714.841.564,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.813.809.954,00	7.268.678.220,00	93,02%	5.709.542.679,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.011.312.387,00	6.732.012.220,00	96,02%	6.555.111.541,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.663.399.980,00	3.296.735.107,52	89,99%	3.970.098.543,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.540.952.403,00	3.208.819.533,00	90,62%	2.945.517.327,00
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.941.104.981,00	10.174.050.882,81	78,62%	5.734.777.080,00
14.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	31.935.923.231,00	29.826.337.639,00	93,71%	22.536.924.504,00
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.624.563.335,00	7.228.246.231,00	94,78%	6.528.969.154,00
16.	Sekretariat Daerah	50.981.199.370,00	47.002.125.814,00	92,20%	30.902.869.163,00
17.	Sekretariat DPRD	26.450.440.175,00	25.238.611.823,00	96,42%	26.661.774.010,00
18.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh	3.329.257.479,00	3.266.741.453,00	98,12%	2.672.764.167,00
19.	Kecamatan Sungai Pagu	3.288.264.654,00	3.151.783.276,00	95,85%	2.478.205.594,00
20.	Kecamatan Sangir	3.002.569.432,00	2.957.311.900,00	98,49%	2.258.836.162,00
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.176.820.547,00	2.101.840.542,00	96,56%	1.907.030.066,00
22.	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.691.120.869,00	2.608.812.871,00	96,94%	2.445.100.138,00
23.	Kecamatan Pauh Duo	2.514.853.051,00	2.427.075.443,00	96,51%	2.097.976.301,00
24.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.146.679.885,00	2.113.199.725,00	98,44%	1.918.871.538,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.978.576.181,00	4.480.148.716,00	89,99%	4.690.657.802,00
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.348.102.166,00	14.071.461.570,00	98,07%	3.106.929.061,00
27.	Inspektorat Daerah	4.902.600.045,00	4.426.387.561,00	90,29%	4.478.966.896,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.668.305.741,00	4.263.485.593,00	91,33%	4.599.087.362,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.070.349.203,00	23.128.827.656,00	96,09%	22.281.946.699,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.245.429.576,00	34.891.350.853,00	96,26%	27.352.963.460,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>690.532.104.284,00</b>	<b>645.554.117.010,26</b>	<b>93,49%</b>	<b>608.487.257.791,10</b>

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	25.562.915.880,00	24.897.612.534,00	97,44%	47.130.001.914,14
2.	Dinas Kesehatan	12.758.179.097,00	10.125.458.042,00	79,36%	18.486.230.892,98
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	82.700.500.344,00	87.631.096.886,00	94,53%	91.426.050.434,12
4.	Dinas Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	6.963.675.458,00	6.418.025.373,00	93,91%	9.072.643.343,00
5.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	247.724.682,00	231.514.000,00	93,46%	222.917.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	SKPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(% )	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Kebakaran				
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.531.600,00	27.111.000,00	94,69%	17.400.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%	379.282.940,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.141.764,00	111.210.000,00	95,75%	953.771.381,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.488.300,00	18.549.000,00	95,18%	147.511.000,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	274.031.467,00	273.494.000,00	99,80%	876.684.375,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.447.197,00	172.852.000,00	95,79%	22.198.000,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.198.877.437,00	1.195.532.823,00	99,74%	7.713.419.083,08
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.540.826.268,00	1.503.729.935,00	97,59%	390.527.277,00
14.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.655.981.720,00	1.515.518.250,00	91,52%	810.402.700,00
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	511.285.167,00	509.731.693,00	99,70%	1.473.738.738,07
16.	Sekretariat Daerah	1.873.485.274,00	1.841.515.480,00	98,30%	2.596.932.832,00
17.	Sekretariat DPRD	131.470.678,00	131.387.000,00	99,94%	97.828.900,00
18.	Kecamatan Koto Parik Gadang Distrik	40.881.930,00	40.797.730,00	99,84%	203.406.000,00
19.	Kecamatan Sungai Pagu	0	0	0,00%	8.680.860,00
20.	Kecamatan Sangir	235.573.375,00	234.874.375,00	99,70%	93.388.000,00
21.	Kecamatan Sangir Jujuan	54.381.942,00	53.844.767,00	99,05%	19.990.000,00
22.	Kecamatan Sangir Batang Hari	184.555.707,00	184.076.000,00	99,74%	77.736.000,00
23.	Kecamatan Pauh Duo	1.995.750,00	1.990.000,00	99,21%	25.375.000,00
24.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	19.624.000,00	19.580.000,00	99,67%	162.310.350,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	318.349.552,00	315.936.750,00	99,67%	19.919.269.088,30
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	56.696.000,00	56.310.000,00	99,32%	19.900.000,00
27.	Inspektorat Daerah	13.320.000,00	12.850.000,00	97,22%	5.500.000,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00%	44.000.728,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	163.246.000,00	163.000.000,00	99,72%	409.102.700,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.998.000,00	29.800.000,00	99,34%	128.287.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>148.875.544.589,00</b>	<b>139.713.064.438,00</b>	<b>93,85%</b>	<b>202.072.297.511,67</b>





## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten Solok Selatan, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas ini terdiri dari SKPD dan BUD.

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.



#### 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

##### 4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

###### 1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

###### 2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

##### 4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

###### 1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

###### 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

##### 4.3.3 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang





diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 4.3.4 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) **Kas di Kas Daerah**

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) **Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) **Kas Lainnya**

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.



#### 4.3.5 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.





4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dihunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*netrealizable value*).
- (5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b. Penghapusbukuan (*write down*) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c. Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- 5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

d. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

#### 4.3.6 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-





barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan memproduksi Sendiri  
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan  
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 4.3.7. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.





- c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
- Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### 4.3.8. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### 4.3.9. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)



dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

#### 4.3.10. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:
  - 2) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - 3) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan Dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - 4) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi Yang bersangkutan.

#### 4.3.11. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) Tagihan Jangka Panjang
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - a) Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
  - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c) Bangun Guna Serah/BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
  - d) Bangun Serah Guna/BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.





- 4) Aset Lain-Lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 4.3.12. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
  - b) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### 4.3.13. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

- 1) Ekuitas  
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah dikurangi oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- 2) Ekuitas SAL  
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.
- 3) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan



Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

##### 4.4.1. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kesalahan tidak berulang
  - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya  
Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
    - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
    - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 2) Kesalahan berulang  
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

##### 4.4.2. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu





- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.



BAB. V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	840.018.798.191,79	884.655.899.039,10

Realisasi pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp840.018.798.191,79 atau 99,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp841.160.510.684,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp884.655.899.039,10 maka realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.637.100.847,31 atau turun sebesar 5,05%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	78.133.896.833,00	88.875.590.931,79	113,75
2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	753.151.463.851,00	741.131.287.237,00	98,40
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38
	<b>Total</b>	<b>841.160.510.684,00</b>	<b>840.018.798.191,79</b>	<b>99,86</b>

Tabel V.1.2 Rincian Kenaikan/Penurunan Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	88.875.590.931,79	92.121.048.046,10	(3.245.457.114,31)	(3,52)
2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	741.131.287.237,00	784.706.642.887,00	(43.575.355.650,00)	(5,55)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	10.011.920.023,00	7.828.208.106,00	2.183.711.917,00	27,90
	<b>Total</b>	<b>840.018.798.191,79</b>	<b>884.655.899.039,10</b>	<b>(44.637.100.847,31)</b>	<b>(6,08)</b>

A. Pendapatan Asli Daerah	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	88.875.590.931,79	92.121.048.046,10

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp88.875.590.931,79 atau 113,75% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp78.133.896.833,00. Apabila





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp92.121.048.046,10 maka realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.245.457.114,31 atau turun sebesar 3,52%.

**Tabel V.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	60.473.433.710,00	72.902.648.227,09	120,55
	<b>Total</b>	<b>78.133.896.833,00</b>	<b>86.875.890.931,79</b>	<b>113,75</b>

**Tabel V.1.4 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	11.176.289.565,00	11.006.714.870,10	169.574.694,90	1,54
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.000.096.422,70	2.354.215.128,00	(354.118.705,30)	(15,04)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	72.902.648.227,09	76.344.355.098,00	(3.441.706.870,91)	(4,51)
	<b>Total</b>	<b>86.875.890.931,79</b>	<b>82.121.048.046,10</b>	<b>(3.245.457.114,31)</b>	<b>(3,82)</b>

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023:

**1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp11.176.289.565,00 atau 88,50% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp12.627.963.123,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp11.006.714.870,10 maka realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp169.574.694,90 atau 1,54%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pajak Hotel – LRA	100.000.000,00	140.967.113,00	140,97
2.	Pajak Restoran – LRA	2.000.000.000,00	2.528.210.675,00	126,41
3.	Pajak Reklame – LRA	200.000.000,00	355.151.708,00	177,58
4.	Pajak Penerangan Jalan – LRA	5.357.965.943,00	5.650.671.965,00	105,46
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.750.000.000,00	925.642.686,00	52,89
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBSPZ) – LRA	2.719.997.160,00	1.211.031.597,00	44,52
7.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	500.000.000,00	364.613.822,00	72,92
	<b>Total</b>	<b>12.627.963.123,00</b>	<b>11.176.289.565,00</b>	<b>88,50</b>



Tabel V.1.6 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Pajak Hotel - LRA	140.967.113,00	97.148.159,00	43.818.954,00	45,11
2.	Pajak Restoran - LRA	2.528.210.675,00	1.999.905.655,00	528.304.020,00	26,42
3.	Pajak Hiburan - LRA	0,00	9.170.000,00	(9.170.000,00)	0,00
4.	Pajak Reklame - LRA	355.151.708,00	139.606.848,00	215.544.862,00	154,39
5.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	5.650.671.965,00	5.457.965.943,00	192.706.022,00	3,53
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	925.642.685,00	1.315.705.188,10	(390.063.503,10)	(29,65)
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	1.211.031.597,00	1.294.461.836,00	(83.430.239,00)	(6,45)
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	364.613.822,00	692.749.243,00	(328.135.421,00)	(47,37)
	<b>Total</b>	<b>11.176.289.565,00</b>	<b>11.006.714.870,10</b>	<b>169.574.694,90</b>	<b>1,54</b>

Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Solok Selatan terbagi atas dua sistem, yaitu *Self Assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terhutang dan *Official Assessment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Jenis pajak yang dipungut dengan sistem *self assessment* adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Untuk Pajak reklame dan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dipungut dengan sistem *official assesment*.

Pada tahun 2023 realisasi pajak yang telah melebihi anggaran adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak reklame dan Pajak penerangan jalan sedangkan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) belum melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp355.151.708,00 (177,58% dari anggaran) dan mengalami kenaikan sebesar Rp215.544.862,00 (154,39% dari tahun 2022).

Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.211.031.597,00 (44,52% dari anggaran) dan mengalami penurunan sebesar Rp83.430.239,00 (6,45% dari tahun 2022).

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**a) Pajak Hotel - LRA**

Pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp140.967.113,00 atau sebesar 140,97% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

**b) Pajak Restoran - LRA**

Pajak restoran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.528.210.675,00 atau sebesar 126,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00.





**c) Pajak Reklame - LRA**

Pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp355.151.708,00 atau sebesar 177,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

**d) Pajak Penerangan Jalan - LRA**

Pajak penerangan jalan, merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pajak penerangan jalan yang pemungutannya dilakukan oleh PT. PLN. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan pihak PT. PLN Wilayah Sumatera Barat. Jumlah pajak penerangan jalan yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.650.671.965,00 atau sebesar 105,46% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp5.357.965.943,00.

**e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA**

Pajak mineral bukan logam dan batuan, juga termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, namun dibawah monitoring dan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp925.642.685,00 atau sebesar 52,89% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00.

**f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA**

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati, untuk besaran pajak terhutang yang dalam pemungutannya melibatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.211.031.597,00 atau sebesar 44,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.719.997.180,00.

**g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak kabupaten yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Solok Selatan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp364.613.822,00 atau sebesar 72,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.

**2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.000.096.422,70 atau sebesar 83,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.404.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2022 maka realisasi retribusi daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp354.118.705,30 atau turun sebesar 15,04%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**Tabel V.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	228.500.000,00	136.175.000,00	59,80
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	275.000.000,00	110.627.000,00	40,23
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	461.000.000,00	367.480.400,00	79,71
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	50.000.000,00	51.339.000,00	102,68
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LRA	250.000.000,00	321.945.312,00	128,78
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	865.000.000,00	729.694.933,00	109,73
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	75.000.000,00	35.916.000,00	47,89
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	300.000.000,00	219.352.000,00	73,12
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	100.000.000,00	27.566.777,70	27,57
	<b>Total</b>	<b>2.404.500.000,00</b>	<b>2.000.096.422,70</b>	<b>83,18</b>

**Tabel V.1.8 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	136.175.000,00	122.519.000,00	13.656.000,00	11,15
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	110.627.000,00	132.471.000,00	(21.844.000,00)	(16,49)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	367.480.400,00	418.312.400,00	(50.832.000,00)	(12,15)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	51.339.000,00	56.252.000,00	(4.913.000,00)	(8,73)
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LRA	321.945.312,00	507.447.501,00	(185.502.189,00)	(36,56)
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	729.694.933,00	753.745.227,00	(24.050.294,00)	(3,19)
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	35.916.000,00	45.048.000,00	(9.132.000,00)	(20,27)
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	219.352.000,00	282.505.000,00	(63.153.000,00)	(22,36)
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	27.566.777,70	35.915.000,00	(8.348.222,30)	(23,24)
	<b>Total</b>	<b>2.000.096.422,70</b>	<b>2.354.215.128,00</b>	<b>(354.118.705,30)</b>	<b>(15,04)</b>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10, ayat (1), huruf f, disebutkan "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Pada tahun 2023 ada 9 (sembilan) jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berikut daftar jenis objek retribusi dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab pemungutan diantaranya :

**Tabel V.1.9 Daftar OPD Penanggung Jawab dan Pemungut Retribusi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023**

No	Objek retribusi	OPD Pemungut
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan UKM
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Objek retribusi	OPD Pemungut
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebagai berikut:

a) **Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA**

Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp136.175.000,00 atau sebesar 59,60% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp228.500.000,00. Retribusi pelayanan kesehatan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Kesehatan.

b) **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA**

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp110.627.000,00 atau sebesar 40,23% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp275.000.000,00. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

c) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp51.339.000,00 atau sebesar 102,68% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp50.000.000,00. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

d) **Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA**

Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp321.945.312,00 atau sebesar 128,78% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000.000,00. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

e) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp729.694.933,00 atau sebesar 109,73% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp665.000.000,00. Pada tahun 2023, retribusi pemakaian kekayaan daerah terbagi kepada 3 macam pemungutan yaitu:



**Tabel V.1.10 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA  
Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Ruang –LRA	65.000.000,00	120.056.555,00	184,70
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	100.000.000,00	105.013.378,00	105,01
3.	Retribusi Pemakaian Alat – LRA	500.000.000,00	504.625.000,00	100,93
<b>Total</b>		<b>665.000.000,00</b>	<b>729.694.933,00</b>	<b>109,73</b>

**Tabel V.1.11 Kenaikan/Penurunan Realisasi Retribusi Pemakaian  
Kekayaan Daerah – LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Ruang –LRA	120.056.555,00	105.173.227,00	14.883.328,00	14,15
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	105.013.378,00	110.500.000,00	(5.486.622,00)	(4,97)
3.	Retribusi Pemakaian Alat – LRA	504.625.000,00	538.072.000,00	(33.447.000,00)	(6,22)
<b>Total</b>		<b>729.694.933,00</b>	<b>753.745.227,00</b>	<b>(24.050.294,00)</b>	<b>(3,19)</b>

**f) Retribusi Pelayanan Pasar – LRA**

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp367.480.400,00 atau sebesar 79,71% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp461.000.000,00. Retribusi pelayanan pasar di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

**Tabel V.1.12 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar – LRA Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	81.000.000,00	103.892.400,00	114,17
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	370.000.000,00	263.588.000,00	71,24
<b>Total</b>		<b>461.000.000,00</b>	<b>367.480.400,00</b>	<b>79,71</b>

**Tabel V.1.13 Kenaikan/Penurunan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar –  
LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	103.892.400,00	105.147.400,00	(1.255.000,00)	(1,19)
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LRA	263.588.000,00	313.165.000,00	(49.577.000,00)	(15,83)
<b>Total</b>		<b>367.480.400,00</b>	<b>418.312.400,00</b>	<b>(50.832.000,00)</b>	<b>(12,15)</b>

**g) Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA**

Retribusi tempat khusus parkir yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp35.916.000,00 atau sebesar 47,89% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp75.000.000,00. Retribusi tempat khusus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

**h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp219.352.000,00 atau sebesar 73,12% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp300.000.000,00. Retribusi tempat





khusus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

i) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA**

Retribusi izin mendirikan bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27.566.777,70 atau sebesar 27,57% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00. Retribusi izin mendirikan bangunan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.796.556.717,00 atau sebesar 106,41% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.628.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 maka realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp380.793.767,00 atau naik sebesar 15,76%.

Tabel V.1.14 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41
Total		2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41

Tabel V.1.15 Kenaikan/Penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76
Total		2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76

**4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp72.902.648.227,09 atau sebesar 120,55% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp60.473.433.710,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00 maka realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.441.706.870,91 atau 4,51%.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.16 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	500.000.000,00	21.050.000,00	4,21
2.	Jasa Giro - LRA	6.000.000.000,00	3.738.881.518,00	74,78
3.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	7.721.055.081,00	17.965.774.341,46	232,69
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.561.733.764,00	328.368.169,63	21,03
5.	Pendapatan dari Pengembalian	2.456.644.865,00	0,00	0,00
6.	Pendapatan BLUD - LRA	43.234.000.000,00	50.848.574.198,00	117,61
	<b>Total</b>	<b>60.473.433.710,00</b>	<b>72.902.648.227,09</b>	<b>120,85</b>

**Tabel V.1.17 Kenaikan/Penurunan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	21.050.000,00	1.760.126.100,00	(1.739.076.100,00)	(98,80)
2.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.738.881.518,00	2.032.953.705,00	1.705.927.813,00	83,91
3.	Pendapatan Bunga - LRA	0,00	5.378.329.636,00	(5.378.329.636,00)	(100,00)
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	2.299.096.037,00	(2.299.096.037,00)	(100,00)
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	17.965.774.341,46	6.841.089.102,00	11.124.715.239,46	162,62
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	328.368.169,63	78.066.055,00	250.302.114,63	320,63
7.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0,00	4.387.800,00	(4.387.800,00)	(100,00)
8.	Pendapatan BLUD - LRA	50.848.574.198,00	57.952.336.661,00	(7.103.762.463,00)	(12,28)
	<b>Total</b>	<b>72.902.648.227,09</b>	<b>76.344.355.098,00</b>	<b>(3.441.706.870,91)</b>	<b>(4,51)</b>

**B. Pendapatan Transfer**

**31 Des 2023**

**31 Des 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**741.131.287.237,00**

**784.706.642.887,00**

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp741.131.287.237,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp753.151.463.851,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp784.706.642.887,00 maka realisasi pendapatan transfer tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.575.355.650,00 atau turun sebesar 5,55%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer tahun 2023:

**Tabel V.1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	649.652.549.241,00	653.253.740.634,00	100,55
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41
4.	Bantuan Keuangan – LRA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>753.151.463.851,00</b>	<b>741.131.287.237,00</b>	<b>98,40</b>

**Tabel V.1.19 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	653.253.740.634,00	678.013.344.009,00	22.759.603.375,00	3,37
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	41.852.235.000,00	37.621.151.000,00	(4.231.084.000,00)	(11,25)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	39.025.311.603,00	59.572.147.878,00	20.546.836.275,00	34,49
4.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	4.500.000.000,00	39,13
	<b>Total</b>	<b>741.131.287.237,00</b>	<b>784.706.642.887,00</b>	<b>43.575.355.650,00</b>	<b>5,55</b>

**1. Transfer Pemerintah Pusat**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 adalah sebesar Rp653.253.740.634,00 atau sebesar 100,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp649.652.549.241,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.759.603.375,00 atau turun sebesar 3,37%.

Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak – LRA	24.802.275.364,00	26.699.998.917,00	107,65
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	15.904.209.636,00	27.148.316.318,00	170,70
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	100,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	156.192.279.241,00	146.851.640.399,00	93,89
	<b>Total</b>	<b>649.652.549.241,00</b>	<b>653.253.740.634,00</b>	<b>100,55</b>

**Tabel V.1.21 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak – LRA	26.699.998.917,00	51.482.886.775,00	(24.782.887.858,00)	(46,14)
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	27.148.316.318,00	18.897.650.392,00	8.250.665.926,00	43,66
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	452.753.785.000,00	436.897.960.562,00	15.855.824.438,00	3,63
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	146.851.640.399,00	168.734.846.280,00	(22.083.205.881,00)	(13,09)
	<b>Total</b>	<b>653.253.740.634,00</b>	<b>676.013.344.009,00</b>	<b>(22.769.603.375,00)</b>	<b>(3,37)</b>



**a) Bagi Hasil Pajak**

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp24.802.275.364,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp26.699.998.917,00 atau sebesar 107,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak tahun 2022 maka realisasi bagi hasil pajak tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.782.887.858,00 atau turun sebesar 48,14%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.22 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	19.969.402.000,00	21.619.643.294,00	108,26
2.	DBH PPh Pasal 21 – LRA	4.780.375.000,00	4.833.098.889,00	101,10
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LRA	0,00	201.003.199,00	0,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	52.498.364,00	46.253.535,00	88,10
	<b>Total</b>	<b>24.802.275.364,00</b>	<b>26.699.998.917,00</b>	<b>107,65</b>

**Tabel V.1.23 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak  
Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	21.619.643.294,00	46.379.028.888,00	(24.759.385.694,00)	(53,38)
2.	DBH PPh Pasal 21 – LRA	4.833.098.889,00	4.719.940.063,00	113.158.826,00	2,40
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LRA	201.003.199,00	342.350.091,00	(141.346.892,00)	(41,29)
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	46.253.535,00	41.567.633,00	4.685.902,00	11,27
	<b>Total</b>	<b>26.699.998.917,00</b>	<b>51.482.886.776,00</b>	<b>(24.782.887.858,00)</b>	<b>(48,14)</b>

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.**

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2023 adalah sebesar Rp15.904.209.636,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp27.148.316.318,00 atau sebesar 170,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak/ sumber daya alam tahun 2022 maka realisasi bagi hasil pajak/ sumber daya alam tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.250.665.926,00 atau naik sebesar 43,66%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.24 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil  
Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	13.387.320.000,00	13.986.635.747,00	104,48
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent – LRA	0,00	231.332.912,00	0,00
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Royalty – LRA	977.975.636,00	860.051.666,00	87,94
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	225.368.000,00	10.650.863.387,00	4.726,20
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	1.313.566.000,00	1.419.432.606,00	108,06
	<b>Total</b>	<b>15.904.209.636,00</b>	<b>27.148.316.318,00</b>	<b>170,70</b>





Tabel V.1.25 Kenaikan/Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi - LRA	13.986.635.747,00	15.016.724.363,00	(1.030.088.616,00)	(6,86)
2.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent - LRA	231.332.912,00	266.334.073,00	(25.001.161,00)	(9,75)
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty - LRA	660.051.666,00	1.639.733.356,00	(779.681.690,00)	(47,55)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	10.660.863.387,00	28.547.800,00	10.624.315.787,00	40,020
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	1.419.432.606,00	1.958.311.000,00	(538.878.394,00)	(27,52)
Total		27.148.316.318,000	18.897.660.392,000	8.260.666.926,00	43,66

c) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum tahun 2023 adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi umum tahun 2022 maka realisasi dana alokasi umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.855.824.438,00 atau naik sebesar 3,63%.

Tabel V.1.26 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	100,00
Total		452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	100,00

Tabel V.1.27 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Dana Alokasi Umum - LRA	452.753.785.000,00	437.174.072.000,00	15.579.713.000,00	3,56
Total		452.753.785.000,00	437.174.072.000,00	15.579.713.000,00	3,56

d) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp156.192.279.241,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp146.651.640.399,00 atau sebesar 93,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus tahun 2022 maka realisasi dana alokasi khusus tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.083.205.881,00 atau turun sebesar 13,09%.

Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**Tabel V.1.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus  
Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	156.192.279.241,00	146.851.840.399,00	93,89
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.451.519.000,00	1.374.625.780,00	94,70
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.795.139.000,00	9.501.537.287,00	97,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.472.309.000,00	2.289.551.200,00	92,60
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.238.312.000,00	5.925.529.389,00	81,88
6.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.001.292.000,00	22.929.813.300,00	99,68
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	365.734.000,00	304.594.000,00	83,28
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	269.997.000,00	204.803.271,00	78,77
9.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.808.180.000,00	23.572.290.801,00	98,00
10.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00
11.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.532.387.241,00	53.709.805.493,00	96,71
12.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.065.000.000,00	837.544.420,00	78,84
13.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.873.851.000,00	4.873.851.000,00	100,00
14.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.230.200.000,00	2.489.787.000,00	110,74
15.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.020.400.000,00	2.020.400.000,00	100,00
16.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.313.393.000,00	6.410.739.281,00	77,11
17.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.070.937.000,00	5.649.655.900,00	70,00
18.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.803.834.000,00	1.585.844.450,00	60,90
19.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000,00	468.446.597,00	95,11
20.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.075.000,00	201.815.000,00	87,33
21.	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000,00	373.006.250,00	88,73
<b>Total</b>		<b>312.384.588.482,00</b>	<b>293.303.280.798,00</b>	<b>93,89</b>

**Tabel V.1.29 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Alokasi Khusus  
Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.374.625.780,00	947.799.433,00	(426.826.347,00)	(45,03)
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.501.537.287,00	23.778.066.100,00	14.276.528.813,00	60,04
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.289.551.200,00	17.308.987.300,00	15.019.416.100,00	86,77
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	8.777.853.393,00	8.777.853.393,00	100,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.668.589.223,00	3.668.589.223,00	100,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-	0,00	4.074.871.956,00	4.074.871.956,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	Penurunan AKI dan AKB				
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	5.925.529.360,00	177.990.250,00	(5.747.539.119,00)	(3.229,13)
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	510.817.000,00	510.817.000,00	100,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	443.693.375,00	443.693.375,00	100,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.929.813.300,00	9.243.898.842,00	(13.685.914.458,00)	(148,05)
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	7.168.080.009,00	7.168.080.009,00	100,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	5.412.783.000,00	5.412.783.000,00	100,00
13.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	0,00	1.200.076.143,00	1.200.076.143,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	304.594.000,00	0,00	(304.594.000,00)	0,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	204.803.271,00	0,00	(204.803.271,00)	0,00
16.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.572.290.801,00	23.971.223.294,00	398.932.493,00	1,68
17.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.950.000.000,00	920.000.000,00	(1.030.000.000,00)	(111,95)
18.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.709.805.493,00	49.390.073.742,00	(4.319.731.751,00)	(8,74)
19.	DAK Non Fisik-Tampil Guru PNSD	837.544.420,00	750.187.500,00	(87.356.920,00)	(11,64)
20.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.873.851.000,00	4.351.144.000,00	(522.707.000,00)	(12,01)
21.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.489.787.000,00	2.302.200.000,00	(187.587.000,00)	(7,27)
22.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.020.400.000,00	1.093.600.000,00	(926.800.000,00)	(84,76)
22.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.410.739.281,00	148.891.270,00	(6.264.048.011,00)	(4.270,22)
23.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.649.655.900,00	0,00	(5.649.655.900,00)	0,00
24.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.585.844.450,00	2.017.879.200,00	432.034.750,00	21,41
25.	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	377.183.000,00	377.183.000,00	100,00
26.	DAK Non Fisik-	466.446.597,00	167.531.750,00	(298.914.847,00)	(178,42)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	Fasilitasi Penanaman Modal				
27.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	201.815.000,00	535.766.500,00	333.951.500,00	62,33
28.	DAK Non Fisik-PK2UMK	373.008.250,00	0,00	(373.008.250,00)	0,00
	<b>Total</b>	<b>146.661.640.399,00</b>	<b>168.734.846.280,00</b>	<b>22.083.205.681,00</b>	<b>(13,08)</b>

## 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp41.852.235.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.852.235.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.231.084.000,00, atau turun sebesar 11,25%.

Tabel V.1.30 Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Dana Penyesuaian - LRA	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>41.852.235.000,00</b>	<b>41.852.235.000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel V.1.31 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Dana Penyesuaian - LRA - Dana Desa	41.852.235.000,00	37.621.151.000,00	4.231.084.000,00	11,25
	<b>Total</b>	<b>41.852.235.000,00</b>	<b>37.621.151.000,00</b>	<b>4.231.084.000,00</b>	<b>11,25</b>

## 3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar Rp54.646.679.610,00 dengan realisasi sebesar Rp39.025.311.603,00 atau 71,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2022 maka realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.546.836.275,00, atau turun sebesar 34,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	54.646.679.610,00	39.025.311.603,00	71,41
	<b>Total</b>	<b>54.646.679.610,00</b>	<b>39.025.311.603,00</b>	<b>71,41</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**Tabel V.1.33 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	39.025.311.803,00	59.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)	(34,48)
	<b>Total</b>	<b>39.025.311.803,00</b>	<b>59.572.147.878,00</b>	<b>(20.546.836.275,00)</b>	<b>(34,48)</b>

Dari seluruh realisasi tahun 2023 untuk penyaluran bagi hasil pajak provinsi, terdapat penyaluran Kurang Bayar pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2022 sejumlah Rp5.404.187.680,00 dan penyaluran bagi hasil Reguler tahun 2023 Rp33.621.123.923,00.

**Tabel V.1.34 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	15.473.115.243,00	7.866.826.052,00	50,84
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.154.959.077,00	0,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	5.273.152.640,00	9.164.188.052,00	173,79
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	661.047.607,00	0,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	21.379.290.239,00	2.978.900.144,00	13,93
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.691.359.974,00	0,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	344.165.275,00	2.607.083.089,00	757,51
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	0,00	27.398.662,00	0,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	12.178.956.213,00	11.004.126.586,00	90,37
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	0,00	1.869.422.360,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Reguler</b>	<b>54.646.679.610,000</b>	<b>33.821.123.923,000</b>	<b>61,52</b>
	<b>Jumlah Penerimaan Kurang Bayar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404.187.680,000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>54.646.679.610,000</b>	<b>39.025.311.803,000</b>	<b>71,41</b>

**Tabel V.1.35 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	7.866.826.052,00	11.251.506.102,00	(3.384.679.050,00)	(30,08)
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	1.154.959.077,00	2.536.060.330,00	(1.381.101.253,00)	(54,46)
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	9.164.188.052,00	5.546.303.234,00	3.617.884.818,00	65,23
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	661.047.607,00	1.913.553.839,00	(1.252.506.232,00)	(65,45)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
3.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	2.978.900.144,00	17.830.058.832,00	(14.651.158.788,00)	(83,10)
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	1.691.359.974,00	7.128.667.832,00	(5.437.307.858,00)	(76,27)
4.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	2.607.083.089,00	264.925.689,00	2.342.167.400,00	884,08
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	27.398.662,00	62.911.358,00	(35.512.696,00)	(56,45)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	11.004.126.586,00	11.536.138.435,00	(532.011.849,00)	(4,61)
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	1.659.422.360,00	1.702.023.127,00	167.399.233,00	9,84
	<b>Jumlah Penerimaan Reguler</b>	<b>33.621.123.923,00</b>	<b>46.228.931.392,00</b>	<b>(12.607.807.469,00)</b>	<b>(27,27)</b>
	<b>Jumlah Penerimaan Kurang Bayar</b>	<b>5.404.187.680,00</b>	<b>13.343.218.486,00</b>	<b>(7.939.028.806,00)</b>	<b>(59,50)</b>
	<b>Total</b>	<b>39.025.311.603,00</b>	<b>59.572.147.878,00</b>	<b>(20.546.836.275,00)</b>	<b>(34,49)</b>

#### 4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi bantuan keuangan tahun 2022 maka realisasi bantuan keuangan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau turun sebesar 39,13% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.36 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel V.1.37 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Bantuan Keuangan - LRA	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(39,13)
	<b>Total</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>11.500.000.000,00</b>	<b>(4.500.000.000,00)</b>	<b>(39,13)</b>

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	10.011.920.023,00	7.828.208.106,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2023 adalah pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mempunyai target sebesar Rp9.875.150.000,00





dengan realisasi sebesar Rp10.011.920.023,00 atau 101,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.183.711.917,00, atau naik sebesar 27,90%.

Rincian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel V.1.38 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LRA	9.875.150.000,00	10.011.920.023,00	101,38
<b>Total</b>		<b>9.875.150.000,00</b>	<b>10.011.920.023,00</b>	<b>101,38</b>

**Tabel V.1.39 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LRA	10.011.920.023,00	7.828.208.106,00	2.183.711.917,00	27,90
<b>Total</b>		<b>10.011.920.023,00</b>	<b>7.828.208.106,00</b>	<b>2.183.711.917,00</b>	<b>27,90</b>

5.1.2. Belanja	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	<b>785.417.181.448,28</b>	<b>813.620.609.303,77</b>

Realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp785.417.181.448,28 atau 93,45% dari anggaran belanja sebesar Rp840.407.648.873,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp813.620.609.303,77 terjadi penurunan sebesar Rp28.203.427.855,49 atau 3,47% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	BELANJA OPERASI	690.532.104.284,00	645.554.117.010,28	93,48	608.487.257.791,10
2.	BELANJA MODAL	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,84	202.072.297.511,67
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15,00	3.061.054.001,00
<b>Jumlah</b>		<b>840.407.648.873,00</b>	<b>785.417.181.448,28</b>	<b>93,45</b>	<b>813.620.609.303,77</b>

A. Belanja Operasi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	<b>645.554.117.010,28</b>	<b>608.487.257.791,10</b>

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp645.554.117.010,28 atau 93,48% dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp690.532.104.284,00. Dibandingkan dengan realisasi



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp608.487.257.791,10 terjadi kenaikan sebesar Rp37.066.859.219,18 atau 6,09% yang terdiri dari sebagai berikut:

**Tabel V.1.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	393.671.094.050,00	375.400.727.878,95	95,35	375.198.145.727,83
2.	Belanja Barang dan Jasa	275.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30	224.250.350.259,27
3.	Belanja Hibah	20.673.213.944,00	20.733.409.978,00	100,29	9.038.761.804,00
-	Jumlah	690.532.104.284,00	645.554.117.010,28	93,48	608.487.257.791,10

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp375.400.727.878,95 atau 95,35% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp392.114.314.229,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 terjadi kenaikan sebesar Rp202.582.151,12 atau 0,05% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	231.746.797.716,00	226.503.687.528,00	97,73	223.722.201.461,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.058.866.139,00	67.328.077.992,00	91,61	73.875.662.813,50
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.291.111.779,00	71.635.306.971,95	91,34	67.482.226.576,33
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.172.605.740,00	9.107.343.370,00	99,28	9.323.588.803,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	334.052.855,00	315.436.017,00	94,42	283.592.074,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.890.000,00	510.876.000,00	99,99	510.876.000,00
-	Jumlah	392.114.314.229,00	375.400.727.878,95	95,35	375.198.145.727,83

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja pegawai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp226.503.687.528,00 atau 97,73% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp231.746.797.716,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp223.722.201.461,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.781.486.067,00 atau 1,24% dengan rincian sebagai berikut:





**Tabel V.1.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	173.233.900.161,00	169.411.780.784,00	97,79	165.871.654.870,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.302.361.648,00	16.782.778.288,00	96,99	16.391.303.890,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.910.988.608,00	3.741.440.563,00	95,66	3.798.998.742,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.570.813.417,00	10.514.345.800,00	99,46	10.505.802.400,00
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.453.085.768,00	3.192.075.866,00	92,44	3.041.445.000,00
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.983.582.542,00	10.670.148.669,00	97,14	10.528.857.500,00
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	240.433.788,00	219.811.445,00	91,33	203.277.525,00
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.812.595,00	2.659.189,00	34,83	2.520.727,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.819.019.183,00	10.587.195.827,00	99,70	11.913.947.046,00
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	378.000.000,00	346.412.980,00	92,13	388.381.818,00
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.049.000.000,00	1.035.238.317,00	98,88	1.082.012.143,00
-	<b>Jumlah</b>	<b>231.746.797.716,00</b>	<b>228.503.687.528,00</b>	<b>97,73</b>	<b>223.722.201.481,00</b>

**b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2023 sebesar Rp67.328.077.992,00 atau 91,61% dari total anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp73.487.263.460,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.875.662.813,50 terjadi penurunan sebesar Rp6.547.584.821,50 atau 8,86% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.487.263.460,00	67.328.077.992,00	91,61	73.780.377.813,50
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	65.285.000,00
-	<b>Jumlah</b>	<b>73.487.263.460,00</b>	<b>67.328.077.992,00</b>	<b>91,61</b>	<b>73.875.662.813,50</b>

**c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp71.635.306.971,95 atau 91,34% dari total anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp78.419.494.279,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp67.482.226.576,33 terjadi kenaikan sebesar Rp4.153.080.395,62 atau 6,15%.



Tabel V.1.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	430.202.834,00	381.280.965,00	88,62	334.112.308,00
2.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.815.000,00	15.801.863,00	49,68	18.041.000,00
3.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.889.382.550,00	54.787.456.700,00	93,00	52.158.718.813,00
4.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.873.851.000,00	4.854.852.900,00	99,61	4.346.927.100,00
5.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.065.000.000,00	960.000.000,00	90,14	1.015.500.000,00
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.606.427.195,00	5.719.918.833,95	75,19	4.278.237.355,33
7.	Belanja Honorarium	5.350.915.700,00	4.823.745.710,00	90,14	4.939.240.000,00
8.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	171.900.000,00	112.250.000,00	65,29	391.450.000,00
.	Jumlah	78.419.494.279,00	71.635.306.971,95	91,34	67.482.226.676,33

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.107.343.370,00 atau 99,28% dari total anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.172.605.740,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.323.586.803,00 terjadi penurunan sebesar Rp 216.243.433,00 atau 2,31%.

Tabel V.1.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	561.540.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	59.505.600,00	55.771.800,00	93,72	55.677.300,00
3.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.943.840,00	66.916.080,00	97,05	66.577.060,00
4.	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.132.000,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.233.000,00
6.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.063.900,00	83.859.300,00	77,60	83.859.300,00
7.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.784.150,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
9.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
10.	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	55.147.960,00	50.134.198,00	90,90	50.033.107,00
11.	Belanja Tunjangan	1.831.255.290,00	1.625.356.992,00	99,67	1.610.735.036,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				
12.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.238.900.000,00	3.238.900.000,00	100,00	3.471.300.000,00
13.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
.	Jumlah	9.172.605.740,00	9.107.343.370,00	99,28	9.323.566.603,00

**e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp315.436.017,00 atau 94,42% dari total anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH daerah sebesar Rp334.052.855,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp283.592.074,00 terdapat kenaikan sebesar Rp31.843.943,00 atau 11,22%.

**Tabel V.1.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.180.000,00	54.600.000,00	99,94	54.600.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	100,00	6.552.000,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
4.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.283.280,00	6.083.280,00	96,81	5.214.240,00
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	669.056,00	469.056,00	70,10	448.414,00
6.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	17.402,00	1.360,00	7,81	1.200,00
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000,00	5.468.240,00	99,38	5.010.720,00
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.000,00	112.320,00	97,66	102.960,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000,00	336.960,00	99,10	308.880,00
10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	159.116.117,00	141.534.801,00	88,95	111.264.660,00
11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.809.000,00
.	Jumlah	334.052.855,00	315.436.017,00	94,42	283.592.074,00

**f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.876.000,00 atau 99,99% dari total anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000,00. Jumlahnya sama dengan tahun 2022 yang juga terealisasi sebesar Rp510.876.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.1.48 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD  
serta KDH/WKDH

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	110.880.000,00
2.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	99,99	399.996.000,00
.	Jumlah	510.880.000,00	510.876.000,00	99,99	510.876.000,00

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp249.419.979.153,33 atau 90,30% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp276.187.796.290,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp224.250.350.259,27 terdapat kenaikan sebesar Rp25.169.628.894,06 atau 11,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Barang	110.710.759.459,00	99.475.775.928,33	89,85	89.272.128.130,27
2.	Belanja Jasa	115.425.072.199,00	107.748.274.134,00	93,34	83.334.133.413,52
3.	Belanja Pemeliharaan	2.736.547.720,00	2.575.207.859,00	94,10	7.843.048.047,48
4.	Belanja Perjalanan Dinas	42.470.871.629,00	35.500.721.399,00	83,58	41.066.988.641,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.844.545.283,00	4.119.999.833,00	85,04	2.734.072.027,00
.	Jumlah	276.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30	224.250.350.259,27

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Rp99.475.775.928,33 atau 89,85% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp110.710.759.459,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp89.272.128.130,27 terdapat kenaikan sebesar Rp10.203.647.798,06 atau 11,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	110.641.057.959,00	99.411.753.003,33	89,85	89.239.537.601,27
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	69.701.500,00	64.022.925,00	91,85	32.590.529,00
.	Jumlah	110.710.759.459,00	99.475.775.928,33	89,85	89.272.128.130,27

### 1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp99.411.753.003,33 atau 89,85% dari total





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

anggaran Belanja Barang Rp110.641.057.959,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp83.421.409.460,45 terdapat kenaikan sebesar Rp15.990.343.542,88 atau 19,16% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.324.924.569,00	1.299.717.670,00	98,09	1.175.561.253,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	599.395.677,00	670.668.344,55	95,20	554.157.761,00
3.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.649.418.857,00	5.882.890.533,00	88,47	4.822.536.110,45
4.	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	10.480.000,00	100,00	9.045.000,00
5.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	139.638.126,00	139.414.961,00	99,84	215.199.000,00
6.	Belanja Bahan-lai Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
7.	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	994.503.177,00	987.278.577,00	99,27	512.383.000,00
8.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit ikan	239.390.400,00	208.445.200,00	87,07	141.250.000,00
9.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.238.050.693,00	2.380.044.226,00	73,50	12.878.756.658,00
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.002.669.887,00	2.849.933.527,00	94,91	2.775.308.258,00
11.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	291.303.632,00	291.303.632,00	100,00	75.603.383,00
13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
14.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
15.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
16.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.690.000,00	26.615.000,00	99,71	1.332.600,00
17.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.999.000,00	2.999.000,00	100,00	0,00
18.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.331.297,00	1.431.297,00	4,16	3.540.000,00
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.189.822.838,00	4.560.213.827,97	87,88	0,00
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.761.481.443,00	1.470.569.322,00	83,96	1.478.176.578,00
21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.614.498.345,00	6.026.383.744,00	91,09	5.426.227.564,00
22.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	308.348.000,00	275.252.169,00	89,26	0,00
23.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.915.400,00	16.915.400,00	100,00	0,00
24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	132.145.898,00	132.145.898,00	100,00	0,00
25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	872.472.412,00	787.735.550,00	90,28	0,00
26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.727.000,00	2.727.000,00	100,00	0,00
27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	871.625.168,00	267.814.168,00	30,72	225.329.948,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
28.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	381.120.970,00	380.562.891,00	99,85	120.744.268,00
29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	417.422.309,00	400.576.502,00	95,98	0,00
30.	Belanja Obat-Obatan-Obat	19.233.185.788,00	17.222.513.972,00	89,54	6.978.585.535,00
31.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.053.874.145,00	1.789.257.455,00	87,12	22.484.000,00
32.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.214.849.366,00	27.619.394.788,81	97,88	28.431.872.561,00
33.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	883.503.422,00	867.175.220,00	98,15	669.792.293,00
34.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
35.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.229.864.887,00	1.221.140.917,00	99,29	1.941.257.264,00
36.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	233.651.000,00	232.523.100,00	99,51	283.583.675,00
37.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	44.076.500,00	44.076.500,00	100,00	38.284.000,00
38.	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	118.000,00
39.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.052.401.401,00	4.397.913.135,00	87,04	4.306.880.305,00
40.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.613.007.200,00	2.583.370.667,00	98,88	1.909.228.618,00
41.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	80.781.000,00
42.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.922.320.200,00	100,00	1.345.922.090,00
43.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.260.285.652,00	1.202.571.952,00	93,93	139.538.750,00
44.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.841.594.065,00	7.145.330.225,00	72,80	4.208.416.305,00
45.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	355.000.000,00	354.426.420,00	99,83	356.513.000,00
46.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500.000,00	322.500.000,00	100,00	424.612.500,00
47.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	213.794.637,00	213.594.637,00	99,90	10.000.000,00
48.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.499.283.719,00	1.479.627.324,00	98,68	672.727.690,00
49.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00	0,00
50.	Belanja Pakaian Penyelamatan	8.799.991,00	8.799.991,00	100,00	450.000,00
51.	Belanja Pakaian Teknik	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
52.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	31.600.000,00	31.593.000,00	99,97	71.750.000,00
53.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	0,00
54.	Belanja Pakaian Adat Daerah	182.288.993,00	161.988.993,00	99,81	145.049.999,00
55.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	467.275.000,00	462.774.545,00	99,03	105.400.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
56.	Belanja Pakaian Olahraga	538.473.097,00	505.148.837,00	93,81	695.950.264,00
57.	Belanja Pakaian Pakaian Kerja	180.516.200,00	180.515.835,00	99,99	117.000.000,00
58.	Belanja Pakaian Jas/Safari	1.138.000.000,00	463.315.000,00	40,71	1.000.000,00
.	Jumlah	110.841.057.959,00	99.411.763.003,33	89,65	83.421.409.460,45

**2) Belanja Barang Tak Habis Pakai**

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp64.022.925,00 atau 91,85% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp69.701.500,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2022 sebesar Rp32.590.529,00 terdapat kenaikan sebesar Rp31.432.396,00 atau 96,44% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Barang Tak Habis Pakai**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	47.554.500,00	47.554.500,00	100,00	20.458.804,00
2.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	6.818.800,00	6.818.800,00	100,00	0,00
3.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	15.328.200,00	9.649.625,00	62,95	11.818.625,00
4.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	515.000,00
.	Jumlah	69.701.500,00	64.022.925,00	91,85	32.590.529,00

**b. Belanja Jasa**

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp107.748.274.134,00 atau 93,34% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp115.425.072.199,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan/Material tahun 2022 sebesar Rp83.334.133.413,52 terdapat kenaikan sebesar Rp24.414.140.720,48 atau 29,29% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Kantor	85.008.280.233,00	78.744.581.857,00	92,63	58.016.769.703,52
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.889.204.512,00	20.655.342.088,00	98,40	18.085.570.500,00
3.	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.846.094.900,00	2.532.050.562,00	88,96	1.088.622.025,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.624.921.950,00	1.418.405.500,00	87,29	962.225.155,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	370.015.920,00	79.900.000,00	21,59	1.554.678.460,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.668.183.600,00	3.484.393.543,00	95,04	1.202.188.080,00
8.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.850.000,00	42.800.000,00	94,98	0,00
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	874.932.084,00	790.400.584,00	90,33	1.394.129.490,00
11.	Belanja Jasa Insentif bagi	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
.	Jumlah	115.425.072.199,00	107.748.274.134,00	93,34	83.334.133.413,52

Adapun Rincian Belanja Jasa Sebagai Berikut:

**1) Belanja Jasa Kantor**

Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp78.744.581.857,00 atau 92,63% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp85.008.289.233,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2022 sebesar Rp59.016.769.703,52 terdapat kenaikan sebesar Rp19.727.812.153,48 atau 33,42% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.413.597.499,00	4.637.620.000,00	85,66	2.180.458.000,00
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.021.453.856,00	1.735.548.856,00	85,85	1.230.594.558,12
3.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	0,00
4.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	429.192.100,00	412.752.980,00	96,17	489.281.496,00
5.	Honorarium Rohaniwan	1.235.550.000,00	1.176.730.000,00	95,23	104.800.000,00
6.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.160.000,00	6.160.000,00	100,00	350.000,00
7.	Honorarium Penyelenggara Ujian	86.499.000,00	86.499.000,00	100,00	30.932.000,00
8.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	49.900.000,00	49.400.000,00	98,99	2.040.000,00
9.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	46.552.000,00	46.552.000,00	100,00	73.100.000,00
10.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	497.800.000,00	462.000.000,00	92,84	442.600.000,00
11.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.106.791.000,00	2.106.791.000,00	100,00	2.550.094.000,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.733.862.362,00	27.194.862.362,00	98,05	20.963.708.118,40
13.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	174.442.400,00	24.802.400,00	14,21	24.330.222,00
14.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.862.955.000,00	1.857.955.000,00	99,87	1.492.147.000,00
15.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	990.000.000,00	940.500.000,00	95,00	689.400.000,00
16.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	522.000.000,00	522.000.000,00	100,00	460.200.000,00
17.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
18.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	300.000,00
19.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	26.000.000,00
20.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	29.400.000,00
21.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	765.545.000,00	737.423.000,00	96,32	384.874.000,00
22.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.420.140.000,00	4.395.640.000,00	99,44	3.249.940.000,00
23.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	297.470.000,00	297.470.000,00	100,00	270.350.000,00
24.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	177.385.320,00
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.789.881.500,00	1.435.943.909,00	80,23	1.688.798.150,00
26.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.334.673.000,00	3.332.173.000,00	99,92	2.690.997.400,00
27.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.591.500.000,00	1.561.900.000,00	98,14	1.444.550.000,00
28.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.843.400.000,00	1.833.400.000,00	99,39	1.254.100.000,00
29.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.494.000.000,00	1.476.000.000,00	98,79	1.383.550.000,00
30.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.295.732.992,00	2.029.173.943,00	88,38	1.832.139.459,00
31.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.066.743.000,00	1.287.892.000,00	41,99	62.620.000,00
32.	Belanja Jasa Tata Rias	25.600.000,00	24.700.000,00	96,48	23.200.000,00
33.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.323.750.000,00	1.258.226.890,00	95,05	821.864.000,00
34.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	105.071.000,00	96.939.900,00	92,26	132.915.745,00
36.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.870.000,00	5.870.000,00	100,00	3.600.000,00
37.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
38.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	45.600.000,00
39.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
40.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.787.000.000,00	2.755.848.550,00	98,86	153.318.000,00
41.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	267.500.000,00	116.282.787,00	43,47	30.000.000,00
42.	Belanja Jasa Pencucian Pakai, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	11.814.000,00
43.	Belanja Jasa Kalibrasi	467.078.000,00	257.558.019,00	55,14	53.612.000,00
44.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	462.645.600,00	352.939.631,00	76,28	76.600.000,00
45.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	200.000,00	200.000,00	100,00	900.000,00
46.	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Penotretan	736.000.000,00	593.351.400,00	80,61	147.463.000,00
47.	Belanja Tagihan Telepon	286.590.101,00	234.923.060,00	81,92	296.987.999,00
48.	Belanja Tagihan Air	542.325.212,00	429.808.510,00	79,25	432.584.986,00
49.	Belanja Tagihan Listrik	8.170.609.085,00	7.824.879.240,00	95,76	6.679.311.326,00
50.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	134.108.000,00	129.570.000,00	96,61	337.825.000,00
51.	Belanja	3.328.075.552,00	3.081.838.900,00	92,60	2.877.033.992,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				
52.	Belanja Paket/Pengiriman	15.948.674,00	5.725.240,00	35,89	11.480.953,00
53.	Belanja Penambahan Daya	22.000.350,00	20.043.400,00	91,10	10.123.845,00
54.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	16.725.000,00	16.725.000,00	100,00	0,00
55.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	442.102.650,00	235.200.650,00	53,20	228.583.650,00
56.	Belanja Pengolahan Air Limbah	19.360.000,00	19.360.000,00	100,00	0,00
57.	Belanja Lembur	1.683.401.500,00	1.604.838.500,00	96,47	1.165.360.548,00
58.	Belanja Medical Check Up	146.000.000,00	68.641.950,00	47,01	37.642.956,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>86.008.289.233,00</b>	<b>76.744.591.857,00</b>	<b>92,63</b>	<b>59.016.769.703,52</b>

**2) Belanja Iuran Jaminan Asuransi**

Realisasi Belanja iuran Jaminan Asuransi sebesar Rp20.655.342.088,00 atau 98,40% dari total anggaran Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebesar Rp20.989.204.512,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Asuransi tahun 2022 sebesar Rp18.095.570.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.559.771.588,00 atau 14,14% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Asuransi**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	619.964.512,00	603.734.300,00	97,38	564.862.500,00
2.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.121.990.000,00	19.867.812.240,00	98,83	17.515.708.000,00
3.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.704.545,00	85.155.304,00	71,37	15.000.000,00
4.	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	128.545.455,00	77.540.244,00	61,27	0,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>20.989.204.512,00</b>	<b>20.655.342.088,00</b>	<b>98,40</b>	<b>18.095.570.500,00</b>

**3) Belanja Sewa Tanah**

Belanja Sewa Tanah sebesar tahun 2023 tidak ada dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Sementara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.950.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>





#### 4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.532.050.562,00 atau 88,96% dari total anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.846.094.900,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp1.086.622.025,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.445.428.537,00 atau 133,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Sewa Alat Pengangkat	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	500.000,00
2.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.400.000,00	400.000,00	3,84	9.275.000,00
4.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	438.623.900,00	290.951.900,00	66,33	99.744.800,00
6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.380.000,00	50.380.000,00	100,00	7.835.000,00
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.985.000,00	1.985.000,00	100,00	0,00
10.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
11.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
12.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	77.500.000,00	50.000.000,00	64,51	123.900.000,00
13.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.302.261.000,00	1.203.356.202,00	92,40	407.066.415,00
14.	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.000.000,00	8.736.000,00	87,36	5.712.000,00
15.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	137.500.000,00	135.354.960,00	98,43	46.082.900,00
16.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	566.500.000,00	563.854.000,00	99,53	144.296.000,00
17.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	65.440.000,00
18.	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	75.000,00
19.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
20.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.925.000,00	5.925.000,00	100,00	1.902.310,00
21.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
22.	Belanja Sewa Peralatan Umum	232.890.000,00	209.077.500,00	89,73	172.412.800,00
23.	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
.	Jumlah	2.846.094.900,00	2.532.050.562,00	88,96	1.086.622.025,00

#### 5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar Rp1.418.405.500,00 atau 87,29% dari total anggaran Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar



Rp1.624.921.950,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp982.225.155,00 terdapat kenaikan sebesar Rp436.180.345,00 atau 44,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	135.200.000,00	134.800.000,00	99,55	109.000.000,00
2.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	347.100.000,00	263.432.500,00	75,89	241.785.000,00
3.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	1.450.000,00
5.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	159.134.655,00
6.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	360.868.000,00	356.820.000,00	98,82	373.270.000,00
7.	Belanja Sewa Hotel	780.653.950,00	662.853.000,00	84,88	97.585.500,00
.	Jumlah	1.624.921.950,00	1.418.405.500,00	87,29	982.225.155,00

6) Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi sebesar Rp79.900.000,00 atau 21,59% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi sebesar Rp370.015.920,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp1.554.678.460,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.474.778.460,00 atau 94,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	763.194.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	90.015.820,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	14.893.750,00
4.	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	80.000.000,00	79.900.000,00	99,87	0,00
5.	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	0,00	254.627.500,00
6.	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	0,00	0,00	521.863.210,00
.	Jumlah	370.015.920,00	79.900.000,00	21,59	1.554.678.460,00





**7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp3.484.393.543,00 atau 95,04% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi sebesar Rp3.666.163.600,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp1.202.188.080,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.282.205.463,00 atau 189,83% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	71.816.000,00	68.148.996,00	94,89	39.677.900,00
3.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.308.475.000,00	2.259.214.547,00	97,86	0,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.285.872.600,00	1.157.030.000,00	89,98	1.062.610.180,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>3.666.163.600,00</b>	<b>3.484.393.543,00</b>	<b>95,04</b>	<b>1.202.188.080,00</b>

**8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp42.600.000,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp44.850.000,00 sementara tahun sebelumnya tidak ada dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	0,00
2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.500.000,00	38.250.000,00	94,44	0,00
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>44.850.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>0,00</b>

**9) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

Realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp790.400.584,00 atau 90,33% dari total anggaran Belanja Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp874.932.084,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan



dan Pelatihan tahun 2022 sebesar Rp1.394.129.490,00 terdapat penurunan sebesar Rp603.728.906,00 atau 43,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,  
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	368.244.594,00	337.694.594,00	91,70	394.375.490,00
2.	Belanja Bimbingan Teknis	506.687.500,00	452.708.000,00	89,34	294.914.000,00
3.	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	704.840.000,00
.	Jumlah	874.932.094,00	790.400.594,00	90,33	1.394.129.490,00

10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp600.000,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp600.000,00. Sementara tahun sebelumnya tidak ada dianggarkan.

c. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.575.207.859,00 atau 94,10% dari total anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.736.547.720,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp7.843.048.047,48 terdapat penurunan sebesar Rp5.267.840.188,48 atau 67,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.814.900,00	2.814.900,00	100,00	0,00
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.966.149.933,00	1.804.810.072,00	91,79	1.879.271.791,48
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	619.267.926,00	619.267.926,00	100,00	2.798.163.528,00
4.	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	39.226.982,00	39.226.982,00	100,00	3.153.422.728,00
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	109.087.899,00	109.087.899,00	100,00	12.190.000,00
.	Jumlah	2.736.547.720,00	2.575.207.859,00	94,10	7.843.048.047,48

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp35.500.721.399,00 atau 83,58% dari total anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp42.470.871.629,00, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp41.066.968.641,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.566.247.242,00 atau 13,55% dengan rincian sebagai berikut:





**Tabel V.1.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Blaaa	10.829.563.164,00	9.631.273.461,00	88,93	9.752.488.686,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	489.162.192,00	446.917.192,00	95,25	94.780.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.162.591.273,00	25.412.975.746,00	81,54	31.208.119.975,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.055.000,00	8.055.000,00	100,00	11.580.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
.	Jumlah	42.470.871.829,00	35.500.721.399,00	83,58	41.066.968.641,00

**e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.119.999.833,00 atau 85,04% dari total anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 4.844.545.283,00, dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.734.072.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.385.927.806,00 atau 50,69% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.65 Rincian Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.079.220.000,00	2.354.674.550,00	76,46	1.691.300.000,00
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.765.325.283,00	1.765.325.283,00	100,00	1.042.772.027,00
.	Jumlah	4.844.545.283,00	4.119.999.833,00	85,04	2.734.072.027,00

**3. Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp20.733.409.978,00 atau 100,29% dari total anggaran Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp20.673.213.944,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.038.761.804,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.694.648.174,00 atau 129,38% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.598.985.000,00	17.661.571.345,00	100,38	6.131.147.460,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	2.245.980.000,00	2.241.589.689,00	99,80	2.077.365.400,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	100,00	830.248.944,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>20.673.213.944,00</b>	<b>20.733.409.978,00</b>	<b>100,29</b>	<b>9.038.761.804,00</b>

**a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi tahun 2023 sebesar Rp17.661.571.345,00 atau 100,36 dari anggaran sebesar Rp17.596.985.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.131.147.460,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.530.423.885,00 atau 188,06%.

**Tabel V.1.67 Rincian Penerima Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.046.985.000,00	16.111.571.345,00	100,40	4.611.147.460,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>17.596.985.000,00</b>	<b>17.661.571.345,00</b>	<b>100,36</b>	<b>6.131.147.460,00</b>

**1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi tahun 2023 sebesar Rp16.111.571.345,00 atau 100,40 dari anggaran sebesar Rp16.046.985.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.611.147.460 terdapat kenaikan sebesar Rp11.500.423.885,00 atau 249,40%.





**Tabel V.1.68 Rincian Penerima Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.290.000.000,00	12.159.999.345,00	98,94	4.611.147.460,00
2.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.756.985.000,00	3.951.572.000,00	105,17	0,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>16.046.985.000,00</b>	<b>16.111.571.345,00</b>	<b>100,40</b>	<b>4.611.147.460,00</b>

**2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi tahun 2023 sebesar Rp1.550.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.320.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp230.000.000,00 atau 17,42%. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

**3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat tidak dianggarkan tahun 2023. Dibandingkan dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00.

**b. Belanja Hibah Dana Bos**

Belanja Hibah Dana Bos tahun 2023 sebesar Rp2.241.589.689,00 atau 99,80 dari anggaran sebesar Rp2.245.980.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.077.365.400,00 terdapat kenaikan sebesar Rp164.224.289,00 atau 7,90%, adapun rincian penerimanya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel V.1.69 Rincian Penerima Hibah Dana Bos Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikdas Swasta	1.698.460.000,00	1.695.230.100,00	99,80	2.077.365.400,00
2.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Setdikmen Swasta	547.520.000,00	546.359.589,00	99,78	0,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>2.245.980.000,00</b>	<b>2.241.589.689,00</b>	<b>99,80</b>	<b>2.077.365.400,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

**c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp830.248.944,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2023 sebesar Rp830.248.944,00. Dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp830.248.944,00 atau sama banyak dengan tahun sebelumnya.

**Tabel V.1.70 Rincian Penerima Hibah kepada Partai Politik**

No	Partai Politik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	69.066.816,00	69.066.816,00	100,00	69.066.816,00
2.	Partai Nasdem	88.533.984,00	88.533.984,00	100,00	88.533.984,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	84.440.326,00	84.440.326,00	100,00	84.440.326,00
4.	Partai Amanat Nasional	142.029.048,00	142.029.048,00	100,00	142.029.048,00
5.	Partai Golongan Karya	145.448.688,00	145.448.688,00	100,00	145.448.688,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.367.128,00	36.367.128,00	100,00	36.367.128,00
7.	Partai Bulan Bintang (PBB)	37.199.956,00	37.199.956,00	100,00	37.199.956,00
8.	Partai Gerindra	124.227.096,00	124.227.096,00	100,00	124.227.096,00
9.	Partai Demokrat	70.087.752,00	70.087.752,00	100,00	70.087.752,00
10.	Partai Berkarya	32.878.104,00	32.878.104,00	100,00	32.878.104,00
	<b>Jumlah</b>	<b>830.278.900,00</b>	<b>830.278.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>830.278.900,00</b>

**4. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp145.686.080,00.

<b>B. Belanja Modal</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	<b>139.713.064.438,00</b>	<b>202.072.297.511,67</b>

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp139.713.064.438,00 atau 93,84% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp148.875.544.589,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp202.072.297.511,67 terjadi penurunan sebesar Rp62.359.233.073,67 atau 30,85% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	1.142.997.230,00	19.108.000,00	1,67	11.111.952.077,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.309.890.874,00	26.339.182.991,00	93,03	31.337.498.900,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.659.919.525,00	33.431.528.257,00	88,30	69.288.671.860,08
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.100.973.060,00	77.154.111.140,00	98,78	89.128.228.696,59
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.809.763.900,00	2.769.134.050,00	98,55	1.205.948.175,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	652.400.000,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>Jumlah</b>	<b>148.875.544.589,00</b>	<b>139.713.064.438,00</b>	<b>93,84</b>	<b>202.072.297.511,67</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp19.108.000,00 atau 1,67% dari total anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.142.997.230,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.092.844.077,00 terjadi penurunan sebesar Rp11.092.844.077,00 atau 99,82%.

**2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.339.182.991,00 atau 93,03% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.309.890.874,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp31.337.496.900,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.998.313.909,00 atau 15,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.72 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	4.434.308.140,00	4.130.939.860,00	93,15	4.955.758.796,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	5.403.479.000,00	5.352.719.250,00	99,06	1.143.100.000,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.000.000,00	18.463.634,00	81,46	0,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	67.762.800,00	58.900.000,00	86,92	58.447.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.024.424.348,00	7.139.973.241,00	101,64	4.652.321.105,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	515.029.417,00	511.996.900,00	99,41	1.336.749.140,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.989.529.770,00	6.571.384.411,00	82,24	3.503.214.023,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.324.800.000,00	1.324.092.000,00	99,94	11.919.824.856,00
9.	Belanja Modal Komputer	1.119.210.745,00	1.070.920.695,00	95,68	3.066.151.703,00
10.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	17.770.000,00
11.	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
12.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	35.630.077,00
13.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
14.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	47.436.000,00	44.789.000,00	94,41	16.136.000,00
15.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
16.	Belanja Modal Rambu-Rambu	334.560.656,00	85.700.000,00	25,61	536.210.000,00
17.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31.350.000,00	31.324.000,00	99,91	72.384.400,00
-	Jumlah	28.309.890.874,00	26.339.182.991,00	93,03	31.337.496.900,00

**3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.431.528.257,00 atau 88,30% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.859.519.525,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp69.288.671.660,08 terdapat penurunan sebesar Rp35.857.143.403,08 atau 51,75% dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel V.1.73 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.674.328.919,00	31.255.549.257,00	87,81	67.680.355.910,08
2.	Belanja Modal Tugu Tsik Kontrol/Pasti	2.185.190.606,00	2.175.979.000,00	99,57	1.628.315.750,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>37.859.519.525,00</b>	<b>33.431.528.257,00</b>	<b>88,36</b>	<b>69.288.671.660,08</b>

**4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp89.128.228.699,59 atau 95,76% dari total anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp93.071.814.561,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp62.841.156.713,00 terjadi kenaikan sebesar Rp11.974.117.559,59 atau 13,43% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.74 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.612.759.992,00	68.264.299.400,30	95,32	49.054.764.926,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	18.935.093.949,00	18.467.916.430,07	97,53	11.759.982.132,00
3.	Belanja Modal Instalasi	1.113.200.000,00	1.090.586.970,22	97,97	0,00
4.	Belanja Modal Jaringan	1.410.760.620,00	1.305.425.899,00	92,53	2.026.409.656,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>93.071.814.561,00</b>	<b>89.128.228.699,59</b>	<b>95,76</b>	<b>62.841.156.713,00</b>

**5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp77.154.111.140,00 atau 98,78% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.100.973.060,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp89.128.228.699,59 terjadi penurunan sebesar Rp11.974.117.559,59 atau 13,43% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.75 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.275.562.823,00	65.991.305.034,00	99,57	68.264.299.400,30
2.	Belanja Modal Bangunan Air	10.312.261.700,00	10.239.236.770,00	99,29	18.467.916.430,07
3.	Belanja Modal Instalasi	239.755.899,00	179.860.000,00	75,01	1.090.586.970,22
4.	Belanja Modal Jaringan	1.273.382.639,00	743.709.336,00	58,40	1.305.425.899,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>78.100.973.060,00</b>	<b>77.154.111.140,00</b>	<b>98,78</b>	<b>89.128.228.699,59</b>

**6. Belanja Modal Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset dianggarkan sebesar Rp652.400.000,00 namun tidak ada realisasinya. Belanja Modal Aset Lainnya di anggarakan di sub unit Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

<b>C. Belanja Tak Terduga</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	150.000.000,00	3.061.054.001,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp150.000.000,00 atau 15,00% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2022 sebesar Rp3.061.054.001,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.911.054.001,00 atau 95,09%.

<b>5.1.3. Transfer</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	92.627.871.216,00	86.917.238.179,00

Realisasi transfer Tahun 2023 sebesar Rp92.627.871.216,00 atau 99,83% dari anggaran transfer sebesar Rp92.778.971.754,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 naik sebesar Rp5.710.633.037,00 atau 6,57% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.76 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil	1.580.709.754,00	1.429.609.216,00	90,44	1.095.023.679,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	100,00	85.822.214.500,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>92.778.971.754,00</b>	<b>92.627.871.216,00</b>	<b>99,83</b>	<b>86.917.238.179,00</b>

**A. Transfer Bagi Hasil**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp1.429.609.216,00 atau 90,44% dari anggaran belanja sebesar Rp1.580.709.754,00. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp1.641.329.910,00 terjadi kenaikan sebesar Rp334.585.537,00 atau 30,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.77 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.306.754.754,00	1.188.858.383,00	90,97	923.276.367,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	273.955.000,00	240.750.833,00	87,87	171.747.312,00
.	<b>Jumlah</b>	<b>1.580.709.754,00</b>	<b>1.429.609.216,00</b>	<b>90,44</b>	<b>1.095.023.679,00</b>

**1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.188.858.383,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp1.306.754.754,00, dibandingkan dengan tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp1.095.023.679,00 terdapat kenaikan sebesar Rp265.582.016,00 atau 28,76 %.



**2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa yang terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp240.750.833,00 atau 87,87% dari anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp273.955.000,00. Dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp171.747.312,00 terjadi kenaikan sebesar Rp69.003.521,00 atau 40,17%.

**B. Transfer Bantuan Keuangan**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp91.198.262.000,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp91.198.262.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp85.822.214.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp5.376.047.500,00 atau 6,26% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.78 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.346.027.000,00	49.346.027.000,00	100,00	48.201.063.500,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	41.852.235.000,00	41.852.235.000,00	100,00	37.621.151.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.198.262.000,00</b>	<b>91.198.262.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85.822.214.500,00</b>

**1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp49.346.027.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp49.346.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp48.201.063.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.144.963.500,00 atau 2,37%. Adapun rincian Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2023 dapat sebagai berikut:

**Tabel V.1.79 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	LUBUK GADANG	1.738.041.349,00	1.738.041.349,00	100,00	1.869.688.492,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.785.510.387,00	1.785.510.387,00	100,00	1.569.310.600,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.970.883.770,00	1.970.883.770,00	100,00	1.869.080.543,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.180.478.375,00	1.180.478.375,00	100,00	1.209.110.840,00
5	PASIR TALANG	1.144.265.590,00	1.144.265.590,00	100,00	1.169.874.854,00
6	KOTO BARU	1.197.890.072,00	1.197.890.072,00	100,00	1.240.637.776,00
7	SAKO PASIA TALANG	1.053.412.916,00	1.053.412.916,00	100,00	1.047.352.224,00
8	PASAR MUARA LABUH	1.028.858.723,00	1.028.858.723,00	100,00	1.045.825.133,00
9	PULAKEK KOTO BARU	1.243.240.506,00	1.243.240.506,00	100,00	1.258.962.000,00
10	BOMAS	1.235.717.314,00	1.235.717.314,00	100,00	1.236.409.546,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.066.065.820,00	1.066.065.820,00	100,00	1.063.806.931,00
12	SAKO SELATAN PASIA	1.065.835.915,00	1.065.835.915,00	100,00	1.048.927.867,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	TALANG				
13	PASIR TALANG BARAT	1.075.981.115,00	1.075.981.115,00	100,00	1.087.527.292,00
14	PASIR TALANG TIMUR	1.142.114.029,00	1.142.114.029,00	100,00	1.149.565.845,00
15	PASIR TALANG SELATAN	1.097.498.230,00	1.097.498.230,00	100,00	1.098.387.705,00
16	PAKAN RABAA	1.449.959.589,00	1.449.959.589,00	100,00	1.227.368.179,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.538.817.508,00	1.538.817.508,00	100,00	1.569.573.205,00
18	PAKAN RABAA UTARA	1.669.971.411,00	1.669.971.411,00	100,00	1.397.237.413,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.884.573.910,00	1.884.573.910,00	100,00	1.403.087.749,00
20	LUBUK MALAKO	1.568.307.350,00	1.568.307.350,00	100,00	1.548.030.415,00
21	BIDAR ALAM	1.138.613.714,00	1.138.613.714,00	100,00	1.159.751.478,00
22	PADANG AIR DINGIN	1.122.584.182,00	1.122.584.182,00	100,00	1.105.289.352,00
23	PADANG LIMA SUNDAL	1.070.556.134,00	1.070.556.134,00	100,00	1.060.088.448,00
24	PADANG GANTIANG	1.065.941.183,00	1.065.941.183,00	100,00	1.036.223.234,00
25	ABAI	1.228.186.796,00	1.228.186.796,00	100,00	1.252.236.925,00
26	DUSUN TANGAH	1.157.208.879,00	1.157.208.879,00	100,00	1.163.654.719,00
27	LUBUK ULANG ALING	1.091.191.927,00	1.091.191.927,00	100,00	1.127.204.528,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	1.102.006.784,00	1.102.006.784,00	100,00	1.109.839.466,00
29	SITAPUS	1.044.581.685,00	1.044.581.685,00	100,00	1.069.057.018,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.317.220.265,00	1.317.220.265,00	100,00	1.322.398.089,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.101.040.975,00	1.101.040.975,00	100,00	1.073.404.387,00
32	ALAM PAUH DUO	1.500.899.201,00	1.500.899.201,00	100,00	1.358.009.817,00
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.207.585.802,00	1.207.585.802,00	100,00	1.212.159.967,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.148.451.884,00	1.148.451.884,00	100,00	1.196.727.334,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.062.607.785,00	1.062.607.785,00	100,00	1.090.998.839,00
36	SUNGAI KUNYIT	1.304.829.574,00	1.304.829.574,00	100,00	1.368.820.288,00
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.244.721.288,00	1.244.721.288,00	100,00	1.267.266.963,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.110.287.396,00	1.110.287.396,00	100,00	1.117.475.850,00
39	TALUNAN MAJU	1.190.107.927,00	1.190.107.927,00	100,00	1.200.894.490,00
	JUMLAH	49.346.027.000,00	49.346.027.000,00	100,00	48.201.063.600,00

**2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp41.852.235.000,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp41.852.235.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2022 sebesar Rp37.621.151.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.231.084.000,00 atau 11,24% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	LUBUK GADANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.632.844.170,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.552.268.227,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.507.364.710,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.188.980.771,00
5	PASIR TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.132.208.905,00
6	KOTO BARU	1.178.075.000,00	1.178.075.000,00	100,00	1.174.559.167,00
7	SAKO PASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.055.469.360,00
8	PASAR MUARA LABUH	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.069.231.861,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022
9	PULAKEK KOTO BARU	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.179.443.386,00
10	BOMAS	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.166.779.518,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.053.886.860,00
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.061.738.264,00
13	PASIR TALANG BARAT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.066.362.612,00
14	PASIR TALANG TIMUR	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.103.697.501,00
15	PASIR TALANG SELATAN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.112.259.920,00
16	PAKAN RABAA	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.256.607.647,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.327.479.731,00
18	PAKAN RABAA UTARA	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.390.393.747,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.390.107.696,00
20	LUBUK MALAKO	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.190.390.274,00
21	BIDAR ALAM	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.110.371.006,00
22	PADANG AIR DINGIN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.085.450.532,00
23	PADANG LIMA SUNDAL	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.048.248.240,00
24	PADANG GANTIANG	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.101.997.921,00
25	ABAI	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.176.101.211,00
26	DUSUN TANGAH	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.124.799.914,00
27	LUBUK ULANG ALING	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.112.693.362,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.090.794.374,00
29	SITAPUS	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.084.762.371,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.218.270.842,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.066.477.411,00
32	ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.387.923.032,00
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.143.095.371,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.148.731.083,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.076.886.442,00
36	SUNGAI KUNYIT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.238.805.507,00
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.196.109.074,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.042.252.000,00	1.042.252.000,00	100,00	1.076.003.054,00
39	TALUNAN MAJU	1.176.075.000,00	1.176.075.000,00	100,00	1.122.489.647,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.852.235.000,00</b>	<b>41.852.235.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.242.173.720,00</b>

<b>5.1.4. Surplus / (Defisit)</b>	<b>31 Des 2023</b>	<b>31 Des 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(38.026.254.472,49)</b>	<b>(15.881.948.443,67)</b>

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalami defisit sebesar Rp38.026.254.472,49. Jika dibandingkan dengan defisit tahun 2022 sebesar Rp15.881.948.443,67 kenaikan defisit sebesar Rp22.144.306.028,82 atau 139,43%.

<b>6.1.5. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>31 Des 2023</b>	<b>31 Des 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>92.755.029.657,27</b>	<b>109.137.058.386,94</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp92.755.029.657,27 atau 99,99% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp92.755.109.943,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp109.137.058.386,94 terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp16.382.028.729,670 atau 15,01.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	729.000.000,00	500.000.000,00

Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp729.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Pembiayaan Rp729.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp500.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp229.000.000,00 atau 45,80%. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan ke Bank Nagari tahun 2023.

5.1.7. PEMBIAYAAN NETTO	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	92.026.029.657,27	108.637.058.386,94

Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp92.026.029.657,27 atau 99,99% dari anggaran Pembiayaan Netto Rp92.026.109.943,00. Dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp108.637.058.386,94 terjadi penurunan Pembiayaan Netto sebesar Rp16.611.028.729,670 atau sebesar 15,29%.

5.1.8. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	53.999.775.184,78	92.755.109.943,27

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp53.999.775.184,78. Dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp92.755.109.943,27 terjadi penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp38.755.334.758,490 atau sebesar 41,78%.

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.2.1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
		92.755.109.943,27	109.103.438.557,94

Nilai SAL awal sebesar Rp92.755.109.943,27 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.



5.2.2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
		92.755.029.657,27	109.137.058.386,94

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah seluruh SAL akhir tahun 2022. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp92.755.029.657,27. Terdapat selisih lebih atas penggunaan SAL tahun berjalan dari Saldo SAL awal sebesar Rp80.286,00.

5.2.3	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA) Sebelum Koreksi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
		53.999.775.184,78	92.755.109.943,27

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp53.999.775.184,78.

5.2.4.	Koreksi SiLPA	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
		(80.286,00)	33.619.829,00

Terdapat koreksi SiLPA Rp33.619.829,00. Dibandingkan dengan koreksi Silpa tahun 2022 sebesar (Rp80.286,00) terdapat penurunan sebesar (Rp33.700.115,00) atau (100,24%).

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Koreksi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
		53.999.775.184,78	92.755.109.943,27

SAL akhir setelah koreksi merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp53.999.775.184,78 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.2.1 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Koreksi Tahun 2023**

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Saldo Akhir Kas di Kasda	37.708.434.934,89	79.106.227.864,74	(41.397.792.929,85)	(52,33)
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,00	167.208.568,89	3.045.504.273,31	1.821,38
3.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.499.253,00	37.220.678,00	(19.721.425,00)	(52,99)
4.	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.133.895.004,62	12.193.379.820,62	(1.059.384.816,00)	(8,69)
5.	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	161.495.545,00	701.982.844,00	(540.487.299,00)	(76,99)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapitasi JKN	1.785.637.607,27	549.090.169,22	1.216.547.438,05	221,58
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	63.999.775.184,78	92.755.111.985,27	(38.755.336.780,49)	(41,78)

### 5.3 NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2023, adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Aset Lancar	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	101.004.176.216,21	137.521.110.127,67

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.004.176.216,21 yang terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.3.1. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas dan Bank	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27	(38.754.755.558,49)	(41,77)
2	Piutang	60.093.668.067,82	53.920.297.565,38	6.173.370.502,24	11,45
3	Penyisihan Piutang	(34.732.090.291,93)	(38.865.589.673,88)	2.133.499.381,95	(5,79)
4	Beban Dibayar Dimuka	130.959.419,00	380.518.318,00	(249.558.900,00)	(65,58)
5	Persediaan	21.474.188.507,74	27.293.655.844,90	(5.819.469.337,16)	(21,32)
	Jumlah	101.004.176.216,21	137.621.110.127,67	(36.516.933.911,46)	(26,58)

Aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.004.176.216,21 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67 Aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp36.516.933.911,46 atau turun sebesar 26,55%. Berikut akan dijelaskan secara rinci asset lancar tersebut.

1. Kas dan Bank	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)
	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.037.472.513,78 merupakan saldo buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BPBD dan Kas Lainnya.

Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 maka terdapat penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77%, dengan rincian sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Tabel V.3.1.1. Rincian Kas dan Bank

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas di Kas Daerah	37.746.132.263,89	79.143.345.993,74	(41.397.213.729,85)	(52,31)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	722.384,00	167.208.566,69	(166.486.182,69)	(99,57)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	17.499.253,00	37.220.678,00	(19.721.425,00)	(52,89)
4	Kas di Bendahara BLUD	11.133.995.004,62	12.193.379.820,82	(1.059.384.816,00)	(8,69)
	Kas Dana Kapitasi FKTP	1.765.637.607,27	549.090.169,22	1.216.547.438,05	221,56
5	Kas di Bendahara BOS	161.485.545,00	701.982.844,00	(540.497.299,00)	(76,99)
6	Kas di Bendahara BOK	3.211.990.456,00	0,00	3.211.990.456,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.037.472.513,78</b>	<b>92.792.226.072,27</b>	<b>(38.754.756.558,49)</b>	<b>(41,77)</b>

1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.745.553.063,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.1. Rincian Kas Daerah

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang No. Rek 1301.0101.00286.6	37.767.148.801,89	79.025.469.443,74	(41.258.320.641,85)	(52,21)
2	Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas	0,00	515.015,00	(515.015,00)	(100,00)
3	Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang ditutup	0,00	79.315.680,00	(79.315.680,00)	(100,00)
4	Mutasi Saldo Kas Bendahara BPBD	0,00	38.045.855,00	(38.045.855,00)	(100,00)
5	Kelebihan Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi Puskesmas Pauh Duo ke Kasda	(4.487.100,00)	0,00	(4.487.100,00)	0,00
6	Kas Bendahara BOS Yang disetorkan ke kasda yang berasal dari temuan Pemeriksaan Inspektorat	(16.529.438,00)	0,00	(16.529.438,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.746.132.263,89</b>	<b>79.143.345.993,74</b>	<b>(41.397.213.729,85)</b>	<b>(52,31)</b>

a. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan rekening Koran kas Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdaftar pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan nomor rekening 1301.0101.00286.6, saldo kas di rekening koran kas umum daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.767.148.801,89.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.025.469.443,74, kas di Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp41.258.320.641,85 atau turun sebesar 52,21%.

b. Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo direkening BLUD Puskesmas atas nama UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL dengan nomor rekening 13010101003202 yang terdaftar pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh sebesar Rp515.015,00. Saldo tersebut merupakan penerimaan dari jasa giro bulan Oktober 2022 dimana sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 9 Maret 2023 sekaligus atas rekening tersebut sudah dilakukan penutupan.

Untuk selanjutnya, nomor rekening tersebut sudah tidak aktif seiring dengan perubahan status UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

c. Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang ditutup

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo direkening Kas Bendahara BOS pada sekolah yang sudah ditutup sebesar Rp79.315.680,00 atas saldo sekolah yang sudah ditutup tersebut telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Adapun rincian saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang tutup tersebut sebagai berikut:

No	Sekolah	Rekening	Tanggal Penyetoran ke Kasda dan Penutupan Rekening	Saldo Akhir Direkening Saat Penutupan	Penyetoran Tunai		Saldo Akhir Yang Disetor ke Kasda
					Kas Tunai	Tanggal Penyetoran ke Kasda	
1	SD N 08 PAKAN RABAA	13000210022094	Per 9 Maret 2023	41.051,00			41.051,00
2	SD N 01 KUTI ANYIR	13000210022381	Per 9 Maret 2023	8.848.795,00			8.848.795,00
3	SD N 08 SAWAH SILUAK	13000210022367	Per 9 Maret 2023	6.440.742,00			6.440.742,00
4	SD N 15 SIKUMBANG	13000210021879	Per 9 Maret 2023	947.632,00	11.061,00	10 Maret 2023	958.723,00
5	SD N 16 SIFOTU	13000210022707	Per 9 Maret 2023	5.108.505,00	66.926,00	10 Maret 2023	5.175.431,00
6	SD N 17 SUNGAI CANGKAR	13000210022330	Per 9 Maret 2023	3.551.290,00			3.551.290,00
7	SD N 20 BARIANG RAO-RAO	13000210022471	Per 9 Maret 2023	6.571.894,00			6.571.894,00
8	SD N 30 SUNGAI SALAK	13000210077931	Per 9 Maret 2023	7.641.122,00			7.641.122,00
9	SD N 13 KANDANG BANYAK	13000210040991	Per 9 Maret 2023	2.515.041,00			2.515.041,00
10	SD N 11 BATU NAGO	13000210022987	Per 9 Maret 2023	1.298.989,00			1.298.989,00
11	SD N 14 SINUEK	13000210022471	Per 9 Maret 2023	302.795,00	80.000,00	10 Maret 2023	382.795,00
12	SMP NEGERI 22 SOLOK SELATAN	13000210048812	Per 9 Maret 2023	5.351.027,00			5.351.027,00
13	SMP NEGERI 33 SOLOK SELATAN	13000210083401	Per 9 Maret 2023	488.595,00			488.595,00
14	SMP NEGERI 34 SOLOK SELATAN	13000210083771	Per 9 Maret 2023	16.226.204,00			16.226.204,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Sekolah	Rekening	Tanggal Penyetoran ke Kasda dan Penutupan Rekening	Saldo Akhir Direkening Saat Penutupan	Penyetoran Tunai		Saldo Akhir Yang Disetor ke Kasda
					Kas Tunai	Tanggal Penyetoran ke Kasda	
15	SMP NEGERI 35 SOLOK SELATAN	13000210147311	Per 9 Maret 2023	15.763.450,00	53.151,00	10 Maret 2023	15.816.601,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>79.054.517</b>	<b>221.168,00</b>		<b>79.316.680,00</b>

d. Mutasi Saldo Kas Bendahara BPBD

Kas Di Bendahara BPBD merupakan kas yang berasal dari sumbangan dana untuk bantuan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan. Dana ini berasal dari sumbangan masyarakat dan badan usaha lainnya serta dari Pemerintah daerah lainnya. Saldo kas di bendahara BPBD sebesar Rp38.045.855,00 terdapat pada 2 (dua) rekening sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	Rekening	Saldo	Penyetoran Ke Kasda
1	Bank Negeri Kantor Kas Kantor Bupati - Nama Rek. Bantuan Bencana Alam Kab. Solok Selatan	1301.0101.00378-2	140.200,00	9 Maret 2023
2	BRI Unit Lubuk Gadang - Nama Rek. Bantuan Bencana Solok Selatan TH 2016	554401000188302	37.905.655,00	9 Maret 2023
	<b>JUMLAH</b>		<b>38.046.855,00</b>	

e. Kelebihan Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi Puskesmas Pauh Duo ke Kasda sebesar Rp4.487.100,00

Pada tanggal 15 Agustus 2023 terdapat kelebihan penyetoran pendapatan non kapitasi ke kas daerah yang berasal dari UPT Puskesmas Pauh Duo sebesar Rp4.487.100,00. Dimana sampai dengan 31 Desember 2023, belum terjadi pengembalian ke rekening puskesmas tersebut.

f. Kas Bendahara BOS Yang disetorkan ke kasda yang berasal dari temuan Pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp16.529.438,00,

Pada tahun 2023 terdapat penyetoran pengembalian ke kas daerah yang berasal dari temuan pemeriksaan inspektorat sebesar Rp16.529.438,00 terhadap beberapa sekolah, antara lain:

No	Nama Sekolah	Jumlah Pengembalian	Tanggal Setor	Keterangan
1	SD N 08 BATANG LOLO	807.651,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
2	SD N 21 MPL BATANG PAGU	300.000,00	09/11/2023	Bukti Setor lengkap
3	SD N 03 PEKONINA	3.092.300,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
4	SD N 14 SAPAN SARI	1.808.047,00	28/12/2023	2 bukti setor
5	SD N 12 PINCURAN TUJUAH	200.000,00	28/12/2023	Bukti Setor lengkap
6	SMPN. 07 SOLOK SELATAN	3.500.000,00	28/12/2023	Bukti setor ada
7	SMPN. 25 SOLOK SELATAN	5.711.040,00	28/12/2023	Bukti setor ada
8	SMPN. 01 SOLOK SELATAN	300.000,00	28/12/2023	Bukti setor ada
9	SMPN. 05 SOLOK SELATAN	810.400,00	29/12/2023	Bukti setor ada
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.529.438,00</b>		





2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dibendahara penerimaan merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada Tahun 2023, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke kas daerah. Kas tersebut baru disetorkan ke kas pada tahun 2024. Atas penyeteroran kas tersebut dihitung sebagai realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023. Selain itu terdapat saldo kas yang berada pada rekening pendapatan QRIS Bank Nagari.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.499.253,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.721.425,00 atau turun sebesar 52,99% jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.220.678,00. Rincian kas di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	545.001,00	545.001,00	0,00	100,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	14.662.500,00	(14.662.500,00)	0,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.550.000,00	3.750.000,00	4.800.000,00	0,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	757.500,00	(757.500,00)	100,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	8.401.252,00	17.502.677,00	(9.101.425,00)	(52,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>17.499.253,00</b>	<b>37.220.678,00</b>	<b>(19.721.425,00)</b>	<b>(52,89)</b>

Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	OPD
12-Jan-2024	SET RETR KARCIS WISATA HOT WATER BOOM 31 DES 2023	8.550.000,00	Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22-Jan-2024	TRF CR 9910001241207209011	545.001,00	Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
31-Jan-2024	62/LG/002/UM PELIMPAHAN E-RETRIBUSI KOPERINDAGKOP KAB SOLOK SELATAN TH 2023	3.000,00	Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	DANA NON KAPITASI PUBKESMAS LJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023	8.355.100,00	Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Kesehatan
	BUNGA TABUNGAN TK TAHUN 2023	46.152,00	Kas di Bendahara Penerimaan	Dinas Pendidikan
	<b>Jumlah</b>	<b>17.499.253,00</b>		



3) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp722.384,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp166.486.182,69 atau turun sebesar 99,57%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.1.3. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	722.384,00	994.398,86	(272.014,86)	(27,36)
2	Dinas Kesehatan	0,00	355.000,00	(355.000,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	3.037.027,02	(3.037.027,02)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	43.147,88	(43.147,88)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(100,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(100,00)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	24.640.000,00	(24.640.000,00)	(100,00)
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.392,93	(4.392,93)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	0,00	54.763.600,00	(54.763.600,00)	(100,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	10.400.000,00	(10.400.000,00)	(100,00)
12	Sekretariat DPRD	0,00	40.970.000,00	(40.970.000,00)	(100,00)
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>722.384,00</b>	<b>167.238.566,69</b>	<b>(166.486.182,69)</b>	<b>(99,57)</b>

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 lebih rinci terdapat pada **Lampiran 1**.

4) Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan kas pada BLUD RSUD Kabupaten Solok Selatan, yang terhitung tanggal 1 Januari 2015 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 440.437-2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 31 Desember 2014.

Saldo pada Kas BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.133.995.004,62 dengan rincian sebagai berikut:





**Tabel V.3.1.1.4. Kas BLUD RSUD**

No	Uraian	Rekening	31-Dec-23	31-Dec-22	Peningkatan/ Penurunan	Persen tase (%)
1	Bank Nagari Muara Labuh	130002101208731	10.998.447.951,02	11.948.252.108,02	(950.804.157,00)	(7,98)
2	Bank Nagari Muara Labuh	13000101003298	93.925.164,80	209.334.987,60	(115.409.803,00)	(55,13)
3	Kas Tunai Di Bendahara Penerimaan		5.088.500,00	0,00	5.088.500,00	0,00
3	Kas Tunai Di Bendahara Pengeluaran		36.535.388,00	34.792.748,00	1.742.644,00	5,01
<b>JUMLAH</b>			<b>11.133.995.004,62</b>	<b>12.193.379.820,62</b>	<b>(1.059.384.816,00)</b>	<b>(8,89)</b>

**5) Kas di Bendahara Kapitasi JKN**

Kas di Bendahara Kapitasi JKN merupakan kas pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Dimana pada tahun sebelumnya, Puskesmas tergabung kedalam UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang telah berdiri semenjak 1 Januari 2017. Namun pada tahun 2022 berubah statusnya menjadi UPT PUSKESMAS.

Per 31 Desember 2023 saldo kas pada UPT PUSKESMAS sebesar Rp1.765.637.607,27 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.1.5. Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN**

No	Uraian	Rekening	31-Dec-23	31-Dec-22	Peningkatan/ Penurunan	Persen tase
1	KAPITASI UPT PUSKESMAS KOTO PARIK GADANG DIAHEH	1301.0101.00484-4	128.015.670,00	4.802.127,00	121.213.443,00	2.524,16
2	KAPITASI UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGU	1301.0101.00485-2	600.692.910,00	147.013.792,00	453.679.118,00	240,58
3	KAPITASI UPT PUSKESMAS PAUH DUO	1301.0101.00482-2	106.189.917,22	60.373.757,22	45.796.160,00	75,85
4	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR	1301.0101.00484-1	553.732.610,00	218.769.242,00	334.963.368,00	155,45
5	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR JUJUAN	1301.0101.00480-0	278.821.740,00	54.382.876,00	224.438.864,00	409,02
6	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR BALAI JANGGO	1301.0101.00486-6	128.456.541,00	33.202.995,00	95.253.546,00	286,88
7	KAPITASI UPT PUSKESMAS SANGIR BATANG HARI	1301.0101.00487-4	58.833.259,00	0,00	58.833.259,00	0,00
8	KAPITASI UPT PUSKESMAS LUBUK ULANG ALING	1301.0101.00426-1	13.915.080,05	32.545.380,00	(18.630.319,95)	(57,24)
<b>JUMLAH</b>			<b>1.765.637.607,27</b>	<b>549.090.169,22</b>	<b>1.216.547.438,05</b>	<b>221,58</b>



6) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada pada bendahara Sekolah Negeri (SDN dan SMPN) yang masih aktif yang berasal dari sisa bantuan operasional sekolah pada 31 Desember 2023, sebesar Rp161.495.545,00, sementara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp701.982.844,00 artinya terdapat penurunan sebesar Rp540.487.299,00 atau 76,99% seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

No	Sekolah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SD	57.043.729,00	428.498.073,00	(371.454.344,00)	(86,69)
2	SMP	104.451.816,00	273.484.771,00	(169.032.955,00)	(61,81)
	<b>JUMLAH</b>	<b>161.495.545,00</b>	<b>701.982.844,00</b>	<b>(540.487.299,00)</b>	<b>(76,99)</b>

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp161.495.545,00 tersebut, pada 31 Desember 2023 terdapat sisa Kas Bendahara BOS yang masih berada di Kas Daerah sebesar Rp17.108.638,00 yang belum disetorkan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara BOS.

Adapun rincian sisa kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2.

7) Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK merupakan sisa kkas yang berada pada bendahara puskesmas yang berasal dari sisa Dana DAK BOK. Adapun Kas di Bendahara BOK per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp3.211.990.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.1.1.7. Kas di Bendahara BOK

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	UPT Puskesmas KPGD	658.035.300,00	0,00	658.035.300,00	100,00
2	UPT Puskesmas Sungai Pagu	417.045.360,00	0,00	417.045.360,00	100,00
3	UPT Puskesmas Pauh Duo	293.065.300,00	0,00	293.065.300,00	100,00
4	UPT Puskesmas Sangir	186.329.120,00	0,00	186.329.120,00	100,00
5	UPT Puskesmas Sangir Jujuan	363.242.125,00	0,00	363.242.125,00	100,00
6	UPT Puskesmas Sangir Balai Janggo	777.763.540,00	0,00	777.763.540,00	100,00
7	UPT Puskesmas Sangir Batang Hari	226.354.100,00	0,00	226.354.100,00	100,00
8	UPT Puskesmas Lubuk Ulang Aling	290.155.611,00	0,00	290.155.611,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.211.990.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.990.456,00</b>	<b>100,00</b>





<b>B. Piutang</b>	<b>31-Dec-23</b>	<b>31-Dec-22</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>25.361.577.775,69</b>	<b>17.054.707.891,50</b>

Saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.361.577.775,69 Jika dibandingkan dengan saldo piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp17.054.707.891,50, mengalami kenaikan sebesar Rp8.306.869.884,19 atau naik 48,71%, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.2. Piutang Netto**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	PIUTANG	60.093.668.067,62	53.920.297.565,38	6.173.370.502,24	11,45
2	PENYISIHAN PIUTANG	(34.732.090.291,93)	(36.865.589.673,88)	2.133.499.381,95	(5,79)
	<b>PIUTANG NETTO</b>	<b>25.361.577.775,69</b>	<b>17.054.707.891,50</b>	<b>8.306.869.884,19</b>	<b>48,71</b>

Dalam melakukan penyisihan piutang, metode penyisihan piutang tak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tak tertagih pada saat pelaporan keuangan, metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.2.2. Rincian Piutang**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
I	PIUTANG PENDAPATAN	59.735.653.167,62	53.765.242.065,38	5.970.411.102,24	11,10
	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	(34.730.300.217,43)	(36.864.814.396,38)	2.134.514.178,95	(5,79)
	<b>PIUTANG PENDAPATAN NETTO</b>	<b>25.005.352.950,19</b>	<b>16.900.427.669,00</b>	<b>8.104.925.281,19</b>	<b>47,96</b>
II	PIUTANG LAINNYA	358.014.900,00	155.055.500,00	202.959.400,00	100,00
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(1.780.074,50)	(775.277,50)	(1.014.797,00)	100,00
	<b>PIUTANG LAINNYA NETTO</b>	<b>356.224.825,50</b>	<b>154.280.222,50</b>	<b>201.944.603,00</b>	<b>100,00</b>

Rincian piutang di atas terdiri dari:

**I. Piutang Pendapatan**

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.005.352.950,19 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel V.3.1.2.3. Rincian Piutang Pendapatan**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	PIUTANG PENDAPATAN	59.735.653.167,62	53.765.242.055,38	5.970.411.102,24	11,10
	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	(34.730.300.217,43)	(36.864.814.396,38)	2.134.514.178,95	(5,79)
	<b>PIUTANG PENDAPATAN NETTO</b>	<b>25.005.352.950,19</b>	<b>16.900.427.669,00</b>	<b>8.104.925.281,19</b>	<b>47,96</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	<b>Piutang Pajak</b>	13.223.511.675,00	18.018.014.963,00	(4.794.503.288,00)	(26,61)
	<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(8.629.250.289,09)	(10.381.931.529,09)	1.752.681.240,00	(16,88)
	<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>4.594.261.385,91</b>	<b>7.636.083.433,91</b>	<b>(3.041.822.048,00)</b>	<b>(39,83)</b>
2	<b>Piutang Retribusi</b>	2.062.825.350,00	1.970.109.750,00	92.715.600,00	4,71
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(1.756.281.888,00)	(1.926.103.288,00)	169.821.400,00	(8,82)
	<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>306.543.462,00</b>	<b>44.006.462,00</b>	<b>262.537.000,00</b>	<b>896,89</b>
3	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>	28.342.289.419,62	30.242.352.032,38	(1.900.062.612,76)	(6,28)
	<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</i>	(24.344.768.040,34)	(24.556.779.579,29)	212.011.538,95	(0,86)
	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto</b>	<b>3.997.521.379,28</b>	<b>5.685.572.453,09</b>	<b>(1.688.051.073,81)</b>	<b>(42,30)</b>
4	<b>Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	16.107.026.723,00	3.534.765.320,00	12.572.261.403,00	355,67
	<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto</b>	<b>16.107.026.723,00</b>	<b>3.534.765.320,00</b>	<b>12.572.261.403,00</b>	<b>355,67</b>

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.005.352.950,19 sebagaimana terinci dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Piutang Pajak

Nilai saldo piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.594.261.385,91. Jika dibandingkan dengan nilai saldo piutang pajak piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.636.083.433,91 terjadi penurunan saldo piutang pajak sebesar Rp3.051.730.617,20 atau turun sebesar 39,96%.

Tabel V.3.1.2.4. Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	<b>Piutang Pajak</b>	13.223.511.675,00	18.018.014.963,00	(4.804.461.649,00)	(26,88)
	<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(8.629.250.289,09)	(10.381.931.529,09)	1.752.731.031,80	(16,88)
	<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>4.594.261.385,91</b>	<b>7.636.083.433,91</b>	<b>(3.051.730.617,20)</b>	<b>(39,96)</b>
1	<b>Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	12.742.439.897,00	17.546.901.546,00	(4.804.461.649,00)	(27,38)
	<i>Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>	(8.626.844.930,20)	(10.379.575.962,00)	1.752.731.031,80	(16,89)
	<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>4.115.594.966,80</b>	<b>7.167.325.584,00</b>	<b>(3.051.730.617,20)</b>	<b>(42,58)</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	481.071.778,00	471.113.417,00	9.958.361,00	2,11
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.405.358,89)	(2.355.567,09)	(49.791,80)	2,11
	<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>478.666.419,11</b>	<b>468.757.849,91</b>	<b>9.908.569,20</b>	<b>2,11</b>

Nilai saldo piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.594.261.385,91 terdiri dari:

**1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Nilai piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.742.439.897,00 yang merupakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan penyisihan piutang pajak sebesar (Rp8.626.844.930,20), jika dibandingkan dengan nilai piutang pajak dan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2022, masing-masing sebesar Rp17.546.901.546,00 dan (Rp10.379.575.962,00), terjadi penurunan piutang pajak sebesar Rp(4.804.461.649,00) atau turun sebesar 27,38%. Sedangkan untuk penyisihan piutang pajak terjadi kenaikan sebesar Rp1.752.731.031,80 dengan persentase 16,89%.

**Tabel V.3.1.2.5. Rincian Piutang PBBP2**

Jenis Pajak	31-Dec-23	31-Dec-22
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12.742.439.897,00	17.546.901.546,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.742.439.897,00</b>	<b>17.546.901.546,00</b>
Penyisihan Piutang Pajak	(8.626.844.930,20)	(10.379.575.962,00)
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>4.115.594.966,80</b>	<b>7.167.325.584,00</b>

Pada Tahun 2023 total ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar Rp2.814.703.067,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 79.484 lembar, dan atas ketetapan Tahun 2023 tersebut terealisasi sebesar Rp1.181.945.885,00 dan dengan tidak terealisasinya ketetapan tersebut secara keseluruhan menambah nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.632.757.187,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 30.888 lembar. Untuk rincian pengelolaan PBB P2 pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Adapun nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kecamatan KPGD	749.546.596,00
2.	Kecamatan Pauh Duo	478.624.922,00
3.	Kecamatan Sangir	8.027.772.822,00
4.	Kecamatan Sangir Balai Jenggo	560.294.877,00
5.	Kecamatan Sangir Betang Hari	401.283.257,00
6.	Kecamatan Sangir Jujuan	290.181.746,00
7.	Kecamatan Sungai Pagu	2.234.735.876,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.742.439.897,00</b>



Kegiatan pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB P2 untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan yaitu Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangai Balai Janggo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir Batang Hari serta Kecamatan Sangir Jujuan, Tahun 2023 tetap dilakukan yang bertujuan untuk menyempurnakan data objek pajak dan subjek pajak di setiap kecamatan dengan cara mencocokkan data dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang terdapat dalam Daftar Hasil Rekaman (DHR) di aplikasi SISMIOP PBB P2 dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Basis Data Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.63-2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Sangir Balai Janggo serta Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.216-2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Solok Selatan.

Nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar 8.626.844.930,20 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Lancar dengan persentase penyisihan sebesar 0,5%, berjumlah Rp8.163.786,00;
2. Kategori Kurang Lancar dengan persentase pinyisihan sebesar 10%, berjumlah Rp163.778.903,00;
3. Kategori Diragukan dengan persentase pinyisihan sebesar 50%, berjumlah Rp1.008.827.656,00; dan
4. Kategori Macet dengan persentase pinyisihan sebesar 100%, berjumlah Rp7.454.238.371,00.

Untuk penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2023 selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

## 2) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.666.419,11 adalah alokasi pembayaran pajak penerangan jalan untuk Kabupaten Solok Selatan dari PT. PLN (Persero) untuk alokasi bulan Desember 2023. Penyisihan piutang ini adalah sebesar 0,5% atau Rp2.405.358,89 dengan kategori lancar.

Tabel V.3.1.2.6. Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	481.071.778,00	471.113.417,00	9.958.361,00	2,11
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.405.358,89)	(2.355.567,09)	(49.791,80)	2,11
	Piutang Pajak Netto	478.666.419,11	468.757.849,91	9.908.569,20	2,11





## 2. Piutang Retribusi

Nilai Saldo Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp306.543.462,00. Piutang ini mengalami peningkatan sebesar Rp262.537.000,00 atau naik sebesar 596,59% jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi tahun 2022 yang berjumlah Rp44.006.462,00. Adapun rincian piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.1.2.7. Piutang Retribusi

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	PIUTANG RETRIBUSI	2.062.825.350,00	1.970.109.750,00	92.715.600,00	4,71
	<i>PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI</i>	<i>(1.756.281.888,00)</i>	<i>(1.926.103.288,00)</i>	<i>169.821.400,00</i>	<i>(8,82)</i>
	<b>PIUTANG RETRIBUSI NETTO</b>	<b>306.543.462,00</b>	<b>44.006.462,00</b>	<b>262.537.000,00</b>	<b>596,59</b>
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	82.817.900,00	82.817.900,00	0,00	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>	<i>(82.817.900,00)</i>	<i>(82.817.900,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2	Piutang Retribusi IMB Dinas PTSP	25.446.250,00	25.446.250,00	0,00	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi IMB</i>	<i>(25.446.250,00)</i>	<i>(25.446.250,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Piutang Retribusi IMB Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	<i>(8.375.000,00)</i>	<i>(8.375.000,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sekretariat DPRD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	<i>(3.450.000,00)</i>	<i>(3.450.000,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Pagu	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	<i>(4.925.000,00)</i>	<i>(4.925.000,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.946.186.200,00	1.853.470.600,00	92.715.600,00	5,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</i>	<i>(1.639.642.738,00)</i>	<i>(1.809.464.138,00)</i>	<i>169.821.400,00</i>	<i>(9,39)</i>
	<b>Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto</b>	<b>306.543.462,00</b>	<b>44.006.462,00</b>	<b>262.537.000,00</b>	<b>596,59</b>



**1) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

Saldo Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**Tabel V.3.1.2.8. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	82.817.900,00	82.817.900,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(82.817.900,00)	(82.817.900,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) Netto	0,00	0,00	0,00	100,00

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang kepada PT.INDOSAT sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang atas kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Tahun 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan sampai tanggal Neraca belum pernah diterbitkan Surat Tagihan atas Retribusi tersebut. Adapun rincian dari Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.2.9. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

No	Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Wajib Retribusi	Jumlah (Rp)
1	2389	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.142.000,00
2	2390	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.268.000,00
3	2391	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.145.000,00
4	2392	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
5	2393	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
6	2394	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.025.000,00
7	2395	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.851.900,00
	<b>JUMLAH PIUTANG KEPADA PT. INDOSAT</b>			<b>82.817.900,00</b>
	<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>			<b>-82.817.900,00</b>

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 kepada PT. INDOSAT dengan Penyisihan atas Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar (Rp82.817.900,00) termasuk penyisihan piutang Kategori Macet dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%.

Atas piutang retribusi menara telekomunikasi tersebut telah dilakukan pelimpahan pengurusan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui KPKNL Padang dengan surat Sekretaris Daerah nomor 900/71/BPKD/II-2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal permintaan pengurusan piutang dan surat Bupati Solok Selatan nomor 900/140/BPKD/III-2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal permintaan pelimpahan pengurusan piutang, dan pelimpahan piutang tersebut telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan surat nomor : SP3N-111/PUPNG.04/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengurusan piutang Retribusi Menara Telekomunikasi milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah





beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan upaya penagihanpun telah dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Paksa Nomor SP-86/PUPNC.04.00/2019 tanggal 26 April 2019, akan tetapi sampai saat penyajian Laporan Keuangan ini Pihak Penanggung Hutang belum melunasi Piutang tersebut.

2) **Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp25.446.250,00.

Tabel V.3.1.2.10. Piutang Retribusi IMB

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Retribusi IMB Dinas PTSP	25.446.250,00	25.446.250,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(25.446.250,00)	(25.446.250,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi IMB Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Retribusi IMB sebesar Rp25.446.250,00 adalah piutang retribusi IMB yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Piutang ini disisihkan sebesar 100% atau Rp25.446.250,00 dengan kategori macet.

3) **Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas pemanfaatan/pemakaian fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan yang dipisahkan ini sebesar Rp8.375.000,00 dengan penyisihan 100% dan kategori macet.

Tabel V.3.1.2.11. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(8.375.000,00)	(8.375.000,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sekretariat DPRD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(3.450.000,00)	(3.450.000,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Pagu	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(4.925.000,00)	(4.925.000,00)	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

**4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

Saldo Piutang Retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp306.543.462,00 yang terdiri dari piutang retribusi tahun 2016 sd 2023. Penetapan piutang retribusi pelayanan pasar baru dilakukan pada tahun 2017 maka total piutang retribusi saat ini merupakan gabungan piutang pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023.

**Tabel V.3.1.2.12. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.946.186.200,00	1.853.470.600,00	92.715.600,00	5,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.639.642.738,00)	(1.809.464.138,00)	169.821.400,00	(9,39)
	Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto	306.543.462,00	44.006.462,00	262.537.000,00	696,59

Nilai piutang retribusi pelayanan pasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.946.186.200,00 dengan penyisihan sebesar Rp1.639.642.738,00.

Untuk rincian piutang retribusi pasar selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

**3. Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun sekarang nilai dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok selatan ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) belum disampaikan berhubung RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat belum terlaksana, sementara piutang dari PT Balairung tahun ini tidak ada disebabkan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian.

Jenis Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

**4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.997.521.379,28. Jika dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp5.685.572.453,09 terdapat penurunan piutang sebesar Rp1.688.051.073,81 atau turun sebesar 29,69% sesuai dengan tabel berikut.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Tabel V.3.1.2.13. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	28.342.289.419,62	30.242.352.032,38	(1.900.062.612,76)	(6,28)
	PENYISIHAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	(24.344.769.040,34)	(24.556.779.579,29)	212.011.539,95	(0,86)
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH NETTO</b>	<b>3.997.521.379,28</b>	<b>5.685.572.453,09</b>	<b>(1.688.051.073,81)</b>	<b>(29,69)</b>
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR	18.402.559,62	18.402.559,62	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(18.402.559,62)	(9.769.123,07)	(8.633.436,55)	88,37
	<b>Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.436,55</b>	<b>(8.633.436,55)</b>	<b>(100,00)</b>
2	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD RSUD	4.049.399.370,00	5.747.915.543,00	(1.698.516.173,00)	(29,55)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(51.877.990,72)	(72.277.503,22)	20.399.512,50	(28,22)
	<b>Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto</b>	<b>3.997.521.379,28</b>	<b>5.675.638.039,78</b>	<b>(1.678.116.660,50)</b>	<b>(29,57)</b>
3					
3	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.500.415.808,00	21.700.661.271,00	(200.245.463,00)	-0,92
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(21.500.415.808,00)	(21.700.661.271,00)	200.245.463,00	-0,92
	<b>Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(454.333.948,00)	(454.333.948,00)	0,00	0,00
	<b>Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	2.319.737.734,00	2.319.737.734,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	(2.319.737.734,00)	(2.319.737.734,00)	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Piutang Dana Revolving Dinas BPMP/KB (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	2.114.475.400,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(2.114.475.400,00)	(2.114.475.400,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Piutang Dana Revolving Dinas KOPERINDAG	205.262.334,00	205.262.334,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(205.262.334,00)	(205.262.334,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	100,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	100,00
	Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	100,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

**1) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang yang berasal dari denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan. Pada tahun 2022, nilai saldo piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp0,00 dimana nilai piutang sebesar Rp18.402.559,62 dengan penyisihan sebesar Rp18.402.559,62.

Tabel V.3.1.2.14. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR	18.402.559,62	18.402.559,62	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(18.402.559,62)	(9.769.123,07)	(8.633.436,55)	88,37
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	8.633.436,55	(8.633.436,55)	(100,00)





**2) Piutang BLUD RSUD**

Per 31 Desember 2023 Nilai Saldo Piutang BLUD RSUD sebesar Rp3.997.521.379,28, dimana nilai piutang sebesar Rp4.049.399.370,00 dengan penyisihan sebesar Rp51.877.990,50. Jika dibandingkan dengan piutang yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp5.675.638.039,78 terjadi penurunan piutang sebesar Rp1.678.116.660,50 atau sebesar 29,57%.

**Tabel V.3.1.2.15. Piutang BLUD RSUD**

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD RSUD	4.049.399.370,00	5.747.915.543,00	(1.698.516.173,00)	(29,55)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(51.877.990,72)	(72.277.503,22)	20.399.512,50	(28,22)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	3.997.521.379,28	5.675.638.039,78	(1.678.116.660,50)	(29,57)

Adapun rincian piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2023 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel V.3.1.2.16. Rincian Piutang BLUD RSUD**

NO	URAIAN	JUMLAH	STATUS KONFIRMASI
	<b>TAHUN 2019</b>		
1	PT. REKIN	154.000,00	Terkonfirmasi
2	PT. SUPREME ENERGY	410.000,00	Terkonfirmasi
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>564.000,00</b>	
	<b>TAHUN 2020</b>		
1	PT. SUPREME ENERGY	3.057.500,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI PARKIR	9.000.000,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI KANTIN	6.000.000,00	Terkonfirmasi
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>18.057.500,00</b>	
	<b>TAHUN 2021</b>		
1	RETRIBUSI PARKIR	1.000.000,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI KANTIN	9.200.000,00	Terkonfirmasi
3	JAMPERSAL	8.164.200,00	Terkonfirmasi
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>18.364.200,00</b>	
	<b>TAHUN 2022</b>		
1	KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN	33.676.285,00	Terkonfirmasi
2	PT. MITRA KERINCI	18.007.100,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI PARKIR	10.000.000,00	Terkonfirmasi
4	RETRIBUSI KANTIN	8.200.000,00	Terkonfirmasi
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>67.883.385,00</b>	
	<b>TAHUN 2023</b>		
1	PT. MITRA KERINCI	5.158.000,00	Terkonfirmasi
2	RETRIBUSI PARKIR	10.500.000,00	Terkonfirmasi
3	RETRIBUSI KANTIN	16.300.000,00	Terkonfirmasi
4	KLAIM BPJS Des 2023	3.912.572.285,00	Terkonfirmasi
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>3.944.530.285,00</b>	
	<b>TOTAL PIUTANG SELURUHNYA</b>	<b>4.049.399.370,00</b>	

**3) Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)**

Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.500.415.808,00 adalah Piutang yang telah dikeluarkan Surat Penetapannya oleh BPK-RI, dengan penyisihan 100% sebesar Rp21.500.415.808,00 dengan kategori macet. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi atas piutang ini. Adapun rincian piutang ini sebagai berikut:



Tabel V.3.1.2.17. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
4	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.500.415.808,00	21.700.661.271,00	(200.245.463,00)	(0,92)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(21.500.415.808,00)	(21.700.661.271,00)	200.245.463,00	(0,92)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Untuk rincian piutang Tuntutan Perbendaharaan lebih lanjut dilihat pada Lampiran 6.

#### 4) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Penyisihan piutang ini adalah 100% sebesar Rp454.333.948,00 dengan kategori macet. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi atas piutang ini.

Tabel V.3.1.2.18. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(454.333.948,00)	(454.333.948,00)	0,00	0,00
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 terdapat pada OPD berikut:

NO	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	454.333.948,000	454.333.948,000	0,00	0,00
1	Sekretariat Daerah	70.310.000,000	70.310.000,000	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	384.023.948,000	384.023.948,000	0,00	0,00

Untuk rincian piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah lebih lanjut dilihat pada Lampiran 7.

#### 5) Piutang Dana Revolving

Nilai Saldo Piutang Dana Revolving sebesar Rp0,00 dimana piutang tersebut seluruhnya sudah macet dengan penyisihan sebesar Rp2.319.737.734,00.

Piutang revolving adalah Piutang yang dipersepsikan sebagai dana bergulir pada SKPD BPMPrKB sekarang menjadi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperindag sekarang menjadi Dinas Perindagkop UKM.





Tabel V.3.1.2.19. Dana Revolving

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	2.319.737.734,00	2.319.737.734,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	(2.319.737.734,00)	(2.319.737.734,00)	0,00	0,00
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Dana Revolving Dins BPMPrKB (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	2.114.475.400,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(2.114.475.400,00)	(2.114.475.400,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Dana Revolving Dins KOPERINDAG	205.262.334,00	205.262.334,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana revolving	(205.262.334,00)	(205.262.334,00)	0,00	0,00
	Piutang Dana Revolving Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi piutang dana revolving. Piutang ini termasuk kategori macet dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%, Rincian Piutang Revolving tersebut adalah sebagai berikut:

a. Revolving Fund BPMPr&KB

Piutang Dana Bergulir (revolving) per 31 Desember 2023 pada BPMPrKB (sekarang DINSOSPMD) adalah sebesar Rp2.114.475.400,00 dengan penyisihan piutang sebesar (Rp2.114.475.400,00) dimana saat ini piutang tersebut termasuk dalam kategori macet.

Pada tahun 2023 ini, dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang revolving tersebut dimana sesuai dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegiatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006, nilai denda sebesar Rp11.063.949.170,00 dihapuskan dari perhitungan piutang, sehingga piutang revolving tersebut hanya terdiri dari sisa nilai pokok ditambah dengan sisa bunga.

Tabel V.3.1.2.20. Piutang Dana Revolving BPMPr&KB (DINSOSPMD)

No	Uraian	Jumlah	Kategori	Persentase	JUMLAH
			Likuiditas	Penyisihan	PENYISIHAN
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pokok Dana Bergulir BPM,Pr&KB 2006	1.847.881.700,00	Macet	100,00%	1.847.881.700,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPM,Pr&KB 2006	266.793.700,00	Macet	100,00%	266.793.700,00
JUMLAH		2.114.475.400,00			2.114.475.400,00



Rincian piutang revolving lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegiatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006 huruf B sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8.

Selain itu, dalam Keputusan Bupati di atas, sebagaimana yang terdapat pada huruf C, juga ditetapkan bahwa nilai piutang revolving yang disalurkan ke PDAM sebesar Rp751.266.400,00 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp636.666.400,00 dan sisa bunga sebesar Rp114.600.000,00 seluruhnya dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

**b. Revolving Fund Koperindag (DINAS PERINDAGKOP-UKM)**

Nilai piutang Dana Revolving Fund Koperindag Per Desember 2023 sebesar Rp205.262.334,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp182.669.067,00 dan Piutang Bunga Rp22.593.267,00. Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp205.262.334,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100%.

**Tabel V.3.1.2.21. Rincian Piutang Revolving KOPERINDAG  
(DINAS PERINDGKOP dan UKM)**

No.	Uraian	Piutang Lain-lain PAD yang Bah - KOPERINDAG (DINAS PERINDGKOP dan UKM)					
		Jumlah Dana di Salurkan		Setor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2023		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	329.000.000,00	39.540.000,00	296.884.593,00	30.199.733,00	62.115.467,00	9.340.287,00
2	UKM	357.000.000,00	42.840.000,00	296.446.400,00	26.687.000,00	120.553.600,00	13.253.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>686.000.000,00</b>	<b>82.380.000,00</b>	<b>593.330.993,00</b>	<b>56.886.733,00</b>	<b>182.669.067,00</b>	<b>22.593.267,00</b>

**a) Revolving Fund 2006**

Nilai piutang yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2006 Per Desember 2023 sebesar Rp48.491.500,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp42.763.400,00 dan Piutang Bunga Rp5.728.100,00 dengan plafon awal sebesar Rp336.000.000,- terdiri dari plafon pokok Rp300.000.000,00 dan plafon bunga pinjaman Rp36.000.000,00. Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp48.491.500,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

**Tabel V.3.1.2.22. Rincian Piutang Revolving Tahun 2006-  
KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)**

No.	Uraian	2006						
		Jumlah Dana di Salurkan		Setor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2023		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023		
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Koperasi	140.000.000,00	16.800.000,00	126.898.900,00	13.073.400,00	13.053.400,00	3.728.100,00	
2	UKM	160.000.000,00	19.200.000,00	130.300.000,00	17.198.500,00	28.700.000,00	2.001.500,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>257.238.900,00</b>	<b>30.271.900,00</b>	<b>42.763.400,00</b>	<b>5.728.100,00</b>	
<b>JUMLAH PIUTANG</b>								<b>48.491.500,00</b>
<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>								<b>(48.491.500,00)</b>

**b) Revolving Fund Koperindag 2008**

Nilai piutang lain-lain yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2008 Per Desember 2022 sebesar Rp156.770.834,00 terdiri dari Piutang Pokok





sebesar Rp139.905.667,00 dan Piutang Bunga Rp16.865.167,00 Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp156.770.834,00 dan merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

**Tabel V.3.1.2.23. Rincian Piutang Revolving Tahun 2006-  
KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)**

No.	Uraian	2000					
		Jumlah Dana di Salurkan		Sektor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2023		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	186.000.000,00	22.740.000,00	139.847.833,00	17.128.333,00	48.052.067,00	5.813.867,00
2	UKM	197.000.000,00	23.640.000,00	106.146.400,00	12.388.900,00	90.853.600,00	11.251.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>383.000.000,00</b>	<b>46.380.000,00</b>	<b>246.094.333,00</b>	<b>29.514.833,00</b>	<b>138.905.667,00</b>	<b>16.865.167,00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG</b>						<b>156.770.834,00</b>	
<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>						<b>(156.770.834,00)</b>	

#### 5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.107.026.723,00 dimana piutang ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp12.572.261.403,00 atau naik sebesar 355,67%.

**Tabel V.3.1.2.24. Piutang Transfer Pemerintah Daerah  
Lainnya**

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
	(Rp)	(Rp)		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16.107.026.723,00	3.534.766.320,00	12.572.261.403,00	355,67
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto</b>	<b>16.107.026.723,00</b>	<b>3.534.766.320,00</b>	<b>12.572.261.403,00</b>	<b>355,67</b>

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp16.107.026.723,00 adalah Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dimana alokasi untuk Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.2.25. Piutang Transfer Pemerintah Daerah  
Lainnya**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Kurang Salur Tahun 2023
	(Rp)
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.895.862.329,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.798.498.698,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10.354.824.302,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	57.821.394,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.107.026.723,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**II. Piutang Lainnya**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp356.224.825,50 dengan penyisihan sebesar Rp1.790.074,50.

**Tabel V.3.1.2.26. Rincian Piutang Lainnya**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	<b>PIUTANG LAINNYA</b>	358.014.900,00	155.055.500,00	202.959.400,00	130,89
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.014.797,00)	130,89
	<b>PIUTANG LAINNYA NETTO</b>	<b>356.224.825,50</b>	<b>154.280.222,50</b>	<b>201.944.603,00</b>	<b>130,89</b>
	Piutang Pendapatan Kapitasi FKTP	358.014.900,00	155.055.500,00	202.959.400,00	130,89
	Penyisihan Piutang Pendapatan Kapitasi FKTP	(1.790.074,50)	(775.277,50)	(1.014.797,00)	130,89
	<b>Jumlah Piutang Lainnya Netto</b>	<b>356.224.825,50</b>	<b>154.280.222,50</b>	<b>201.944.603,00</b>	<b>130,89</b>

Piutang lainnya merupakan piutang yang terdapat pada UPT Puskesmas dan RSUD Batang Sangir dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.2.27. Piutang Lainnya - Kapitasi FKTP UPT Puskesmas**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023							TOTAL PIUTANG
		RAWATAN	PERSALINAN	ANC+USG	RUJUKAN	PNC	KB	PRO LANIS	
1	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas KPGD	1.380.000	8.000.000		1.298.400	320.000			10.898.400
2	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sungai Pagu			1.400.000			1.225.000	440.000	3.065.000
3	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Pauh Dua						1.695.000	50.000	2.045.000
4	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir	40.020.000	10.400.000		11.280.000		640.000		62.540.000
5	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Jujan		640.000	2.320.000	1.708.000		480.000		5.348.000
6	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Balai Janggo	24.240.000	11.000.000		11.460.000				46.720.000
7	Piutang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Batang Hari	3.220.000	1.000.000		4.220.000				8.440.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>68.860.000</b>	<b>31.240.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>29.984.400</b>	<b>320.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>490.000</b>	<b>139.164.400</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

**Tabel V.3.1.2.28. Piutang Lainnya - Piutang Klaim RS  
Pratama Batang Sangir**

NO	BULAN	JUMLAH
1	Piutang Klaim Oktober Pending	12.561.900
2	Piutang Klaim Oktober Susulan	182.200
3	Piutang Klaim November	97.831.100
4	Piutang Klaim Desember	106.485.300
	<b>JUMLAH</b>	<b>218.860.500</b>

C. Beban Dibayar Dimuka	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	130.959.419,00	380.518.319,00

Beban dibayar dimuka pada kondisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp130.959.419,00 jika dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2022 sebesar Rp380.518.319,00 terjadi penurunan saldo sebesar Rp249.558.900,00 atau sebesar 65,58%. Jumlah tersebut merupakan beban dibayar dimuka yang terdapat pada Perangkat Daerah yang berasal dari sisa manfaat atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.3. Beban dibayar dimuka**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	657.725,00	257.500,00	590.225,00	220,64
2	Dinas Kesehatan	5.076.242,00	0,00	5.076.242,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	3.184.133,00	3.894.896,00	(720.663,00)	(18,55)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	1.004.167,00	3.258.233,00	(2.254.066,00)	(89,18)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.101.869,00	7.476.992,00	4.624.677,00	61,85
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	7.777.192,00	1.843.496,00	6.133.696,00	373,21
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.357.425,00	7.378.117,00	(2.020.692,00)	(27,39)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.989.075,00	828.000,00	1.161.075,00	140,23
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.220.883,00	2.402.432,00	(181.549,00)	(7,56)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.084.646,00	3.394.113,00	690.533,00	20,35
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.421.550,00	277.154.696,00	(275.733.146,00)	(99,49)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	912.667,00	796.829,00	145.838,00	19,02
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.124.075,00	0,00	1.124.075,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.366.938,00	2.068.671,00	(701.733,00)	(33,92)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	751.663,00	654.771,00	96.892,00	14,80
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.896.500,00	12.134.567,00	561.933,00	4,63



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)		
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.427.975,00	1.356.925,00	71.050,00	5,24
18	Sekretariat Daerah	30.674.363,00	29.180.663,00	1.493.700,00	5,12
19	Sekretariat DPRD	7.624.046,00	2.629.433,00	4.794.613,00	169,45
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	528.458,00	515.625,00	12.833,00	2,49
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.390.321,00	2.591.646,00	1.808.675,00	70,06
22	Badan Kepegawean dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	396.842,00	988.408,00	(591.566,00)	(59,85)
23	Inspektorat Daerah	4.497.917,00	1.015.438,00	3.482.479,00	342,95
24	Kecamatan Sungai Pagu	491.417,00	1.285.267,00	(793.850,00)	(61,77)
25	Kecamatan Pauh Duo	1.208.513,00	1.312.683,00	(104.170,00)	(7,94)
26	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	1.365.742,00	1.007.038,00	358.704,00	35,62
27	Kecamatan Sangir	1.056.475,00	936.913,00	119.562,00	12,76
28	Kecamatan Sangir Jujuan	1.345.729,00	1.433.800,00	(88.071,00)	(6,14)
29	Kecamatan Sangir Batang Hari	1.727.100,00	1.793.190,00	(26.090,00)	(1,49)
30	Kecamatan Sangir Balai Janggo	3.045.971,00	2.111.338,00	934.633,00	44,27
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9.272.000,00	6.834.583,00	2.437.417,00	35,66
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	2.062.296,00	(2.062.296,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>130.869.419,00</b>	<b>380.619.319,00</b>	<b>(249.556.900,00)</b>	<b>(66,58)</b>

D. Persediaan	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	21.474.166.507,74	27.293.655.844,90

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.474.166.507,74 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.293.655.844,90 terjadi penurunan saldo persediaan sebesar Rp5.819.489.337,16 atau turun sebesar 21,32%, berikut rincian rekapitulasi saldo dan mutasi secara keseluruhan persediaan selama tahun 2023 pada tiap Perangkat Daerah:

**Tabel V.3.1.4. Rekapitulasi Persediaan per OPD**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5.631.000,00	31.337.455,00	(25.706.455,00)	(82,03)
2	Dinas Kesehatan	8.978.364.628,84	8.112.979.572,00	865.385.056,84	10,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	2.807.539.573,00	3.179.852.943,00	(372.313.370,00)	(11,71)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	6.578.759.694,00	13.391.725.942,00	(6.814.966.248,00)	(50,89)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	301.394.626,00	235.476.539,00	65.918.087,00	27,99
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	3.685.000,00	5.204.000,00	(1.519.000,00)	(29,19)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	212.245.051,00	424.185.813,00	(211.940.762,00)	(49,96)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.482.900,00	17.625.000,00	3.856.900,00	21,88
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	692.077.371,00	653.708.359,00	38.369.012,00	5,87
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.310.000,00	2.178.000,00	3.132.000,00	143,80
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.183.166,00	1.415.500,00	2.767.666,00	196,53
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.710.000,00	1.525.000,00	5.185.000,00	340,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	613.000,00	727.000,00	(114.000,00)	(15,68)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.815.000,00	1.335.000,00	5.480.000,00	410,49
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.268.704.147,90	671.684.661,90	597.019.486,00	88,88
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31.776.000,00	56.214.500,00	(24.438.500,00)	(43,47)
18	Sekretariat Daerah	6.560.090,00	6.141.000,00	2.419.090,00	39,39
19	Sekretariat DPRD	52.218.000,00	8.244.450,00	43.973.550,00	533,37
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.276.000,00	3.109.500,00	167.500,00	5,39
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	475.055.810,00	480.315.610,00	(5.260.000,00)	(1,10)
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.900.000,00	4.220.000,00	(320.000,00)	(7,58)
23	Inspektorat Daerah	771.000,00	925.500,00	(154.500,00)	(16,69)
24	Kecamatan Koto Parik Gadang Diatah	630.000,00	192.000,00	438.000,00	228,13
25	Kecamatan Sungai Pagu	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00
26	Kecamatan Sangir	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Sangir Jujuan	383.000,00	588.000,00	(203.000,00)	(34,64)
28	Kecamatan Sangir Betang Harl	288.000,00	510.000,00	(222.000,00)	(43,53)
29	Kecamatan Pauh Duo	313.000,00	860.500,00	(547.500,00)	(63,63)
30	Kecamatan Sangir Balai Janggo	873.650,00	202.000,00	671.650,00	332,50
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	970.000,00	1.174.000,00	(204.000,00)	(17,38)
	<b>Jumlah</b>	<b>21.474.166.507,74</b>	<b>27.293.655.844,90</b>	<b>(6.819.489.337,16)</b>	<b>(21,32)</b>

Rincian persediaan berdasarkan jenis persediaan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel V.3.1.4.1. Rincian persediaan per jenis persediaan

No	Jenis Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Bahan Kimia	148.407.026,00	123.424.424,00	24.982.602,00	20,24
2	Bahan Bakar dan Pelumas	86.917.200,00	32.235.015,00	54.682.185,00	169,64
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	464.665.400,00	318.337.600,00	146.327.800,00	45,97
4	Bahan Lainnya	27.708.200,00	1.374.991.579,00	(1.347.283.379,00)	(97,98)
5	Alat Tulis Kantor	503.105.076,00	542.308.745,00	(39.203.669,00)	(7,23)
6	Kertas dan Cover	33.976.065,00	16.250.910,00	17.725.155,00	109,07
7	Bahan Cetak	731.003.106,00	689.425.794,00	61.577.312,00	9,20
8	Benda Pos	3.060.000,00	2.950.000,00	110.000,00	3,73
9	Alat Listrik	60.476.823,00	79.858.600,00	(19.381.777,00)	(24,27)
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.950.000,00	11.074.683,00	(9.124.683,00)	(82,39)
11	Obat	11.968.181.363,84	9.969.519.422,00	1.998.661.961,84	20,05
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.829.596.430,00	13.428.228.942,00	(6.598.632.512,00)	(49,14)
13	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	473.962.645,90	609.485.245,90	(135.522.600,00)	(22,24)
14	Natura	53.913.152,00	28.320.885,00	25.592.267,00	90,37
15	Pakan	87.244.000,00	87.244.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.474.166.507,74</b>	<b>27.293.656.844,90</b>	<b>(5.819.489.337,16)</b>	<b>(21,32)</b>

#### 1. Persediaan Bahan Kimia

Persediaan Bahan Kimia Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp148.407.026,00 sementara pada 31 Desember 2022 sebesar Rp123.424.424,00. Terjadi kenaikan nilai persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp24.982.602,00 atau naik sebesar 20,24 %. Berikut daftar persediaan Bahan Kimia pada setiap OPD:

Tabel V.3.1.4.2. Persediaan Bahan Kimia

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	142.779.026,00	123.424.424,00	19.354.602,00	15,68
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>148.407.026,00</b>	<b>123.424.424,00</b>	<b>24.982.602,00</b>	<b>20,24</b>

#### 2. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp86.917.200,00 dan rincian persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:





Tabel V.3.1.4.3. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	84.214.200,00	29.149.515,00	55.064.685,00	188,80
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.703.000,00	3.065.500,00	(382.500,00)	(12,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>86.917.200,00</b>	<b>32.235.015,00</b>	<b>54.682.185,00</b>	<b>189,84</b>

**3. Persediaan Bibit Ternak- Bibit Ikan**

Persediaan Bibit Ternak-Bibit Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp464.665.400,00.dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel V.3.1.4.4. Persediaan Bibit Ternak-Bibit Ikan

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	464.665.400,00	318.337.800,00	146.327.800,00	45,97
	<b>Jumlah</b>	<b>464.665.400,00</b>	<b>318.337.800,00</b>	<b>146.327.800,00</b>	<b>45,97</b>

**4. Persediaan Bahan Lainnya**

Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.708.200,00 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti dibawah ini:

Tabel V.3.1.4.5. Persediaan Bahan Lainnya

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	3.464.000,00	(3.464.000,00)	(100,00)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	19.089.000,00	1.368.063.779,00	(1.348.974.779,00)	(98,60)
3	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	0,00	1.070.800,00	(1.070.800,00)	(100,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
7	Sekretariat DPRD	7.108.200,00	2.208.000,00	4.901.200,00	221,87
	<b>Jumlah</b>	<b>27.708.200,00</b>	<b>1.374.991.579,00</b>	<b>(1.347.283.379,00)</b>	<b>(97,98)</b>

**5. Persediaan Alat Tulis Kantor**

Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp502.397.076,00, dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti tabel di bawah ini:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Tabel V.3.1.4.6. Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.475.000,00	22.335.285,00	(19.860.285,00)	(88,92)
2	Rumah Sakti Umum Daerah (BLUD)	19.253.800,00	792.000,00	18.461.800,00	2.331,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	478.250,00	1.163.500,00	(685.250,00)	(58,90)
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.532.000,00	4.944.000,00	(3.412.000,00)	(69,01)
5	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	305.000,00	704.000,00	(399.000,00)	(56,68)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	823.343,00	1.030.635,00	(207.292,00)	(20,11)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.900,00	1.678.000,00	(779.100,00)	(46,43)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	439.189.350,00	481.498.975,00	(42.309.625,00)	(8,79)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.365.000,00	435.000,00	930.000,00	213,79
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.008.633,00	1.353.500,00	1.655.333,00	122,30
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.935.000,00	740.000,00	1.195.000,00	161,49
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	338.600,00	227.800,00	111.000,00	48,77
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.005.000,00	1.335.000,00	(330.000,00)	(24,72)
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.617.250,00	4.617.250,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.773.000,00	3.195.000,00	(422.000,00)	(13,21)
17	Sekretariat Daerah	3.271.300,00	3.317.500,00	(46.200,00)	(1,39)
18	Sekretariat DPRD	12.937.800,00	3.266.000,00	9.671.800,00	296,14
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.646.000,00	2.908.500,00	(1.262.500,00)	(43,41)
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	430.000,00	(430.000,00)	(100,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.271.000,00	3.293.000,00	(2.022.000,00)	(81,40)
22	Inspektorat Daerah	671.000,00	925.500,00	(354.500,00)	(38,30)
23	Kecamatan Koto Park Gadang Diateh	380.000,00	192.000,00	188.000,00	97,92
24	Kecamatan Sungai Pagu	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
25	Kecamatan Sangir Jujuan	168.000,00	376.000,00	(208.000,00)	(55,32)
26	Kecamatan Pauh Duo	68.000,00	236.000,00	(167.000,00)	(71,08)
27	Kecamatan Sangir Balai Janggo	873.650,00	860.500,00	13.150,00	1,53
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	502.397.076,00	542.306.745,00	(39.911.669,00)	(7,36)

**6. Persediaan Kertas Cover**

Persediaan Kertas Cover per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.891.065,00 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Tabel V.3.1.4.7. Persediaan Kertas Cover

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	3.845.000,00	498.000,00	3.347.000,00	672,09
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00
4	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	567.500,00	0,00	567.500,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	326.340,00	434.010,00	(107.670,00)	(24,81)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.584.000,00	1.648.000,00	936.000,00	56,80
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.525.125,00	0,00	5.525.125,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.975.000,00	705.000,00	2.270.000,00	321,99
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	274.400,00	499.400,00	(225.000,00)	(45,05)
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00
14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.335.500,00	6.335.500,00	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	1.853.200,00	265.000,00	1.588.200,00	599,32
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	4.830.000,00	(4.830.000,00)	(100,00)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	0,00
19	Inspektorat Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	Kecamatan Sungai Pagu	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	138.000,00	122.000,00	16.000,00	13,11
22	Kecamatan Peuh Duo	215.000,00	275.000,00	(60.000,00)	(21,82)
23	Kantor Keseluan Bangsa dan Politik	515.000,00	639.000,00	(124.000,00)	(19,41)
	<b>Jumlah</b>	<b>32.891.065,00</b>	<b>16.260.910,00</b>	<b>16.640.155,00</b>	<b>102,40</b>

**7. Persediaan Bahan Cetak**

Persediaan bahan cetak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp731.003.106,00 dengan rincian persediaan per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

**Tabel V.3.1.4.8. Persediaan Bahan Cetak**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	2.812.500,00	4.500.000,00	(1.687.500,00)	(37,50)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	243.953.896,00	169.638.584,00	74.315.312,00	43,81
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	550.000,00	1.038.000,00	(488.000,00)	(47,01)
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.700.000,00	485.000,00	3.215.000,00	662,89
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	561.600,00	561.600,00	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	14.855.000,00	(14.855.000,00)	(100,00)
8	Sekretariat Daerah	2.077.500,00	2.200.000,00	(122.500,00)	(5,57)
9	Sekretariat DPRD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD)	475.055.610,00	475.055.610,00	0,00	0,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	350.000,00	602.000,00	(452.000,00)	(56,36)
12	Kecamatan Sangir Jujuen	105.000,00	210.000,00	(105.000,00)	(50,00)
13	Kecamatan Sangir Batang Hari	150.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
<b>Jumlah</b>		<b>731.003.106,00</b>	<b>668.426.794,00</b>	<b>61.577.312,00</b>	<b>9,20</b>

**8. Persediaan Benda Pos**

Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.060.000,00 dengan rincian persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.9. Persediaan Benda POS**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	600.000,00	1.700.000,00	(1.100.000,00)	(64,71)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
6	Sekretariat Daerah	250.000,00	410.000,00	(160.000,00)	(39,02)
7	Sekretariat DPRD	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	840.000,00	100.000,00	740.000,00	740,00
10	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
11	Kecamatan Pauh Duo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	80.000,00	(80.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>3.060.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3,73</b>





### 9. Persediaan Alat Listrik

Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.476.823,00 dengan rincian persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.10. Persedian Alat Listrik**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.615.000,00	3.219.000,00	(1.604.000,00)	(49,83)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.750.000,00	539.000,00	1.211.000,00	224,68
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	51.724.400,00	74.508.600,00	(22.784.200,00)	(30,58)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.157.000,00	1.400.000,00	757.000,00	54,07
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	329.333,00	22.000,00	307.333,00	1.396,97
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.000,00	170.000,00	310.000,00	182,35
8	Sekretariat Daerah	1.108.090,00	0,00	1.108.090,00	0,00
9	Sekretariat DPRD	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
11	Kecamatan Sangir Jujuan	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.476.823,00</b>	<b>79.858.600,00</b>	<b>(19.381.777,00)</b>	<b>(24,27)</b>

### 10. Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.950.000,00 dengan rincian per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.11. Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	7.489.683,00	(7.489.683,00)	(100,00)
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.950.000,00	3.450.000,00	(1.500.000,00)	(43,48)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	70.000,00	(70.000,00)	(100,00)
8	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Pauh Duo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>11.074.683,00</b>	<b>(9.124.683,00)</b>	<b>(82,39)</b>



### 11. Persediaan Obat

Persediaan Obat per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.968.181.383,84 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.12. Rincian Persediaan Obat**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	0,00	619.170,00	(619.170,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	8.976.571.528,84	8.112.979.572,00	863.592.056,84	10,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	2.744.741.521,00	1.777.366.546,00	967.375.075,00	54,43
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	246.668.134,00	78.554.134,00	168.314.000,00	214,26
	<b>Jumlah</b>	<b>11.968.181.383,84</b>	<b>9.989.519.422,00</b>	<b>1.998.661.961,84</b>	<b>20,06</b>

### 12. Persediaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat

Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.829.596.430,00 dengan rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.13. Persediaan Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat**

No	Perangkat Daerah	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	6.572.436.444,00	13.390.064.442,00	(6.817.627.998,00)	(50,92)
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	563.104,00	0,00	563.104,00	0,00
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	210.093.882,00	0,00	210.093.882,00	0,00
5	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi usaha kecil dan menengah	28.503.000,00	38.164.500,00	(9.661.500,00)	(25,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.829.596.430,00</b>	<b>13.428.228.942,00</b>	<b>(6.608.632.512,00)</b>	<b>(49,14)</b>

**Tabel V.3.1.4.14. Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat**

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
1	2	3
1	Perluasan Jaringan Air Bersih   [-] Air Bersih Jorong Kampung Palak	99.917.000,00
2	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK)   [-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Timur	2.218.023.739,00
3	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK)   [-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Lubuk Gadang Utara	438.000.000,00
4	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK)   [-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Padang Air Dingin	918.000.000,00
5	Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK)   [-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Talao Sungai Kuruyit	1.113.000.000,00
6	Lanjutan MCK Masjid Nurul Falaq Padang Aro, Spesifikasi : Pembangunan Gedung Sederhana	99.810.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
1	2	3
7	Pembangunan gedung serba guna jorong bangun rejo, Spesifikasi : Pembangunan Gedung Sederhana	148.914.000,00
8	Pembangunan MCK Mushalla Kec. Pauh Duo, Spesifikasi : Pembangunan Gedung Sederhana	99.915.000,00
9	-Rehabilitasi Gedung Kejar Solok Selatan (2022)	467.192.705,00
10	-Rehab Ruangn SKCK dan Sat. Intelkom Polres Solok Selatan (2021)	99.908.000,00
11	a. Rumah Gadang Panjang Abai	199.780.000,00
12	b. Balai Adat Pasir Talang	469.976.000,00
13	c. Perencanaan Pembangunan Gedung Satiantas Polres Solok Selatan	99.250.000,00
14	d. Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Blok Masjid Al Mukaramah	99.750.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.572.436.444,00</b>

**13. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 sebesar Rp473.962.645,90 dengan rincian persediaan Untuk Tujuan Startegis/Berjaga-Jaga per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.15. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.829.264,00	419.635.668,00	(211.806.404,00)	(50,47)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	28,57
2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	248.133.381,90	175.849.577,90	72.283.804,00	41,11
	<b>Jumlah</b>	<b>473.962.645,90</b>	<b>609.485.245,90</b>	<b>(135.522.600,00)</b>	<b>(22,24)</b>

**14. Persediaan Natura**

Persediaan Natura per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.913.152,00 dengan rincian persediaan Natura per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.16. Persediaan Natura**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	22.705.152,00	25.601.935,00	(2.896.783,00)	(11,31)
2	Sekretariat DPRD	31.208.000,00	2.718.950,00	28.489.050,00	1.047,80
	<b>Jumlah</b>	<b>53.913.152,00</b>	<b>28.320.885,00</b>	<b>25.592.267,00</b>	<b>90,37</b>

**15. Persediaan Pakan**

Persediaan Pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.244.000,00 dengan rincian persediaan Pakan per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1.4.17. Persediaan Pakan**

No	Perangkat Daerah	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	87.244.000,00	87.244.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>87.244.000,00</b>	<b>87.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

<b>5.3.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
		59.780.251.630,24	58.874.415.357,24

Investasi Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp59.874.415.357,24 dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp905.836.273,00 atau naik 1,54% dari tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Investasi Permanen</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	59.780.251.630,24	58.874.415.357,24

Investasi Permanen tahun 2023 sebesar Rp59.780.251.630,24 dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp905.836.273,00 atau naik 1,54% dari tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24. Investasi Permanen merupakan investasi permanen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V.3.2. Rincian Investasi Permanen**

No	Jenis Penyertaan	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Bank Nagari	16.225.000.000,00	15.496.000.000,00	729.000.000,00	4,70
2	PT. Balaiung Citra Jaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3	PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai	42.055.251.630,24	41.878.415.357,24	176.836.273,00	0,42
	<b>Jumlah</b>	<b>59.780.251.630,24</b>	<b>58.874.415.357,24</b>	<b>905.836.273,00</b>	<b>1,54</b>

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada masing-masing perusahaan/BUMD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.2.1. Metode Penilaian Investasi Permanen**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Metode Penilaian
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	16.225.000.000,00	Metode Biaya
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balaiung Citra Jaya	1.500.000.000,00	Metode Biaya
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai	42.055.251.630,24	Metode Ekuitas
	<b>Jumlah</b>	<b>59.780.251.630,24</b>	

Berikut rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023:

a. Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp16.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.2.2. Nilai Penyertaan Modal Bank Nagari**

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Saldo Awal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada	15.496.000.000,00	14.996.000.000,00	500.000.000,00	0,03





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Bank Nagari				
2	Penyertaan Modal Tahun Berjalan	729.000.000,00	500.000.000,00	229.000.000,00	0,31
	Jumlah	16.225.000.000,00	15.496.000.000,00	729.000.000,00	0,04

Terdapat kenaikan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera sebesar Rp729.000.000,00 atau meningkat sebesar 0,04%.

Adapun rician penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) per tahunnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel V.3.2.3. Nilai Penyertaan Modal di Bank Nagari**

No	Tahun Penyertaan	Konversi Modal Disetor	Nomor Urut Saham	Tgl Sertifikat Saham	Nomor Seri Saham
1	2007	2.000.000.000,00	A.000012	20 September 2007	261,642 s/d 263,641
2	2009	421.000.000,00	A.000032	03 September 2009	360,836 s/d 361,256
3	2010	1.579.000.000,00	A.000051	06 September 2010	406,726 s/d 407,304
4	2012	633.000.000,00	A.000076	28 June 2012	481,691 s/d 482,323
5	2012	1.363.000.000,00	A.000101	10 January 2013	597,398 s/d 598,760
6	2015	2.000.000.000,00	A.000179	2 Februari 2016	1.149,281 s/d 1.151,280
7	2016	2.000.000.000,00	A.000200	09 Februari 2017	1.358,722 s/d 1.360,721
8	2018	1.500.000.000,00	A.000226	07 Juni 2018	1.574,966 s/d 1.576,485
9	2019	1.000.000.000,00	A.000242	07 April 2020	1.679,145 s/d 1.680,144
10	2020	2.000.000.000,00	A.000250	26 Januari 2021	1.713,848 s/d 1.715,847
11	2021	500.000.000,00	A.000xxx		
12	2022	500.000.000,00	A.000xxx		
13	2023	729.000.000,00	A.000xxx		
	JUMLAH	16.225.000.000,00			

Adapun jumlah lembar saham berdasarkan modal yang disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal Per Saham	Total Nilai Saham	Persentase Kepemilikan
SeriA	16.225	1.000.000,00	16.225.000.000,00	0,88

- b. Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.2.4. Nilai Penyertaan Modal PT. Balairung Citra Jaya per Tahun**

Tahun	Jumlah	Jenis Saham
2007	900.000.000,00	seri A no 52-708 s.d 53-607
2008	600.000.000,00	seri B no. 35-137-400 s.d 35-737-399
TOTAL	1.500.000.000,00	

Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyertaan modal.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

- c. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PDAM Tirta Saribu Sungai Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp42.055.251.630,24 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel V.3.2.5. Nilai Penyertaan Modal di PDAM Tirta Saribu Sungai**

No	Jenis Penyertaan	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Penyertaan Modal Awal	41.878.415.357,24	25.078.354.596,00	16.800.050.761,24	66,99
2	Penyesuaian Penyertaan Modal Tahun Berjalan	0,00	18.479.223.397,96	(18.479.223.397,96)	(100,00)
3	Penyesuaian yang diakibatkan oleh Perhitungan kompensasi laba operasional PDAM	176.836.273,00	(1.679.172.636,72)	1.856.008.909,72	(110,53)
	<b>Jumlah</b>	<b>42.055.251.630,24</b>	<b>41.878.415.357,24</b>	<b>176.836.273,00</b>	<b>0,42</b>

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PDAM Tirta Saribu Sungai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh adanya penyesuaian nilai laba yang pada PDAM Tirta Saribu Sungai pada tahun 2023 sebesar Rp176.836.273,00 sebagaimana terdapat pada laporan keuangan PDAM Tahun 2023 *Audited*.

Semenjak tahun 2018, kepemilikan PDAM Tirta Saribu Sungai 100% dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga seluruh aktivitas operasional PDAM mempengaruhi nilai penyertaan modal.

<b>5.3.3 ASET TETAP</b>	<b>31 Des 2023</b>	<b>31 Des 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.130.605.024.681,27</b>	<b>2.992.000.662.981,27</b>

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nilai perolehan per 31 Desember 2022	Rp	2.992.000.662.981,27
Penambahan Tahun 2023	Rp	165.553.522.036,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.157.554.185.017,27</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	26.949.160.336,00
<b>Aset Tetap per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>3.130.605.024.681,27</b>
Akumulasi penyusutan s/d Tahun 2023	Rp	(1.315.682.288.253,68)
<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (Nilai Buku)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.814.922.736.427,59</b>

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:





Tabel V.3.3.1. Rincian Aset Tetap per Golongan

Jenis Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Tanah	366.709.927.859,00	124.816.750,00	0,00	366.834.744.609,00
Peralatan dan Mesin	343.903.123.810,99	31.130.880.908,00	5.805.507.472,00	369.488.477.246,99
Gedung dan Bangunan	757.522.080.597,20	43.824.640.839,00	9.295.751.086,00	792.050.970.350,20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.410.782.448.374,04	77.798.945.275,00	4.344.289.829,00	1.484.236.103.721,04
Aset Tetap Lainnya	48.007.519.047,04	5.542.804.218,00	151.652.268,00	53.397.770.996,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.015.563.293,00	7.133.454.048,00	7.562.059.582,00	66.586.957.759,00
Nilai Aset Tetap	2.992.000.662.981,27	166.553.322.036,00	26.848.160.336,00	3.130.605.824.681,27
Akumulasi Penyusutan	(1.150.700.964.067,79)			(1.316.682.288.263,66)
Nilai Buku	1.841.299.698.913,48			1.814.923.736.427,69

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap lebih rinci disajikan pada *Lampiran 9* sampai dengan *Lampiran 25*. Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan aset tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.3.1 TANAH	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	366.834.744.609,00	366.709.927.859,00

Perhitungan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp.366.834.744.609,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	366.709.927.859,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	124.816.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>366.834.744.609,00</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
<b>Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>366.834.744.609,00</b>

Aset Tetap berupa tanah senilai Rp366.834.744.609,00 merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah sebanyak 407 persil, dari jumlah aset tanah tersebut sebagian sudah memiliki sertifikat sebanyak 176 bidang/persil dari 407 persil bidang tanah, sementara untuk yang belum bersertifikat masih dalam proses alas hak maupun peningkatan sertifikasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan.

Adapun penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp 124.816.750,00 terdiri dari:

Belanja Modal Tanah	Rp	19.108.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal KIB C	Rp	104.639.665,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.069.085,00
<b>Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>124.816.750,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Rincian Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp19.108.000,00 yang berasal dari belanja modal tanah tahun 2023 untuk pengadaan tanah jalan berupa penggantian tanaman pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp104.639.665,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB C pada Kecamatan Sangir yang merupakan pekerjaan pematangan lahan pada Kantor Camat Sangir yang menambah nilai aset tanah.

Penambahan nilai aset tanah sebesar Rp1.069.085,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang berasal dari atribusi atas belanja barang dan jasa berupa honorarium pelaksana pekerjaan pada Kecamatan Sangir untuk pekerjaan rehabilitasi gedung kantor (pekerjaan pematangan lahan).

Selain penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah untuk tahun 2023, juga terdapat mutasi Aset Tetap Tanah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp11.499.066.214,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.2. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Tanah (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Tanah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	9.833.851.214,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	832.680.000,00	0,00
3.	Dinas Perhubungan	0,00	832.680.000,00
4.	Dinas Kesehatan	0,00	335.000.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	335.000.000,00	0,00
6.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.833.851.214,00	0,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	697.535.000,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	697.535.000,00	0,00
Jumlah		11.499.066.214,00	11.499.066.214,00

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	369.488.477.246,99	343.963.123.810,99

Perhitungan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp369.520.286.246,99 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	343.963.123.810,99
Penambahan Tahun 2023	Rp	31.130.860.908,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>375.093.984.718,99</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	5.605.507.472,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023	Rp	369.488.477.246,99
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Rp	(271.954.129.505,09)
Nilai Buku	Rp	97.534.347.741,90

Tabel V.3.3.3. Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1.	Alat Besar	13.895.811.979,00	3.928.925.790,00	257.500,00	17.824.280.269,00
2.	Alat Angkutan	73.103.206.933,00	6.898.787.560,00	1.156.325.000,00	78.845.669.493,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.243.248.047,00	30.847.634,00	-	2.274.095.681,00
4.	Alat Pertanian	2.892.176.745,00	84.722.750,00	-	2.748.898.495,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.949.548.383,60	6.380.432.238,00	1.266.591.014,00	74.061.390.565,60
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.356.216.983,00	337.633.803,00	211.198.000,00	13.482.654.786,00
7.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	77.921.787.596,91	8.288.117.641,00	2.316.935.824,00	83.890.969.413,91
8.	Alat Laboratorium	33.300.083.595,08	1.164.897.024,00	478.368.624,00	34.006.611.995,08
9.	Alat Peralaksanaan	124.206.000,00	1.270.000,00	-	125.476.000,00
10.	Komputer	51.846.048.990,40	3.229.885.970,00	169.231.710,00	55.006.701.250,40
11.	Alat Keselamatan Kerja	1.800.816.225,00	658.991.000,00	-	2.459.810.225,00
12.	Rambu – Rambu	3.975.718.941,00	85.700.000,00	-	4.061.418.941,00
13.	Peralatan Olah Raga	654.450.408,00	49.849.500,00	1.800.000,00	702.499.908,00
Jumlah		343.983.123.810,99	31.130.860.908,00	8.605.607.472,00	369.488.477.246,99

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.130.860.908,00 yang berasal dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	22.506.603.027,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BOS dan BLUD)	Rp	3.832.579.964,00
Reklasifikasi dari entry Belanja Modal KIB C	Rp	426.321.838,00
Reklasifikasi dari entry Belanja Modal KIB E	Rp	46.597.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya/rusak berat	Rp	676.725.310,00
Hibah	Rp	3.557.091.270,00
Atribusi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai	Rp	84.942.499,00
<b>Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp</b>	<b>31.130.860.908,00</b>

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebesar Rp22.506.603.027,00, berikut rincian belanja modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

**Tabel V.3.3.4. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1	Dinas Pendidikan	2.840.965.968,00
2	Dinas Kesehatan	7.934.481.540,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	7.633.634.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	339.225.634,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.710.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.500.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00
8	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	158.580.000,00
9	Kantor Kesatuan Bangsa	56.310.000,00
10	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	108.500.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	266.160.000,00
12	Sekretariat Daerah	1.824.036.480,00
13	Sekretariat DPRD	131.387.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	153.000.000,00
15	Inspektorat Daerah	12.950.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.800.000,00
17	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.900.000,00
18	Kecamatan KPGD	40.597.730,00
19	Kecamatan Sangir	39.111.375,00
20	Kecamatan Sangir Jujuan	5.737.050,00
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	10.000.000,00
22	Kecamatan Pauh Duo	1.980.000,00
23	Kecamatan Sangir Balai Janggo	19.560.000,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.549.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.840.000,00
26	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	603.452.250,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	273.494.000,00
28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.111.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.606.603.027,00</b>

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, belanja modal dari Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.832.579.964,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.5. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Belanja BOS, Kapitasi JKN dan BLUD**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Pendidikan	2.558.754.266,00
2.	Dinas Kesehatan	460.432.883,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	813.392.815,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.832.579.964,00</b>

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.558.754.266,00, adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :





Tabel V.3.3.6. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Belanja BOS

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Besar	4.486.290,00
2.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.125.000,00
3.	Alat Pertanian	8.000.000,00
4.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.212.820.309,00
5.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	44.287.100,00
6.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	250.000,00
7.	Alat Laboratorium	255.967.844,00
8.	Komputer	886.266.223,00
9.	Alat Keselamatan Kerja	31.771.500,00
10.	Peralatan Olah Raga	16.800.000,00
Jumlah		2.688.784.286,00

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp460.432.883,00 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.3.7. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari Dana Kapitasi JKN

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	227.493.083,00
2.	Komputer	232.939.800,00
Jumlah		460.432.883,00

Rincian realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD sebesar Rp813.392.815,00 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.3.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari BLUD

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	447.945.586,00
2.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	5.453.368,00
3.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	136.437.771,00
4.	Alat Laboratorium	94.812.250,00
5.	Komputer	127.543.840,00
6.	Alat Keselamatan Kerja	1.200.000,00
Jumlah		813.392.815,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB C sebesar Rp 426.321.838,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal Gedung dan Bangunan yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.9. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.687.188,00
2.	Alat Laboratorium	419.634.650,00
Jumlah		426.321.838,00



Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB E sebesar Rp 46.597.000,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal Aset Tetap Lainnya yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.10. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.597.000,00
2.	Alat Keselamatan Kerja	3.000.000,00
Jumlah		46.597.000,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Aset Rusak) sebesar Rp676.725.310,00 pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan operasional minibus dan jeep yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lain melalui pinjam pakai.

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari hibah sebesar Rp3.557.091.270,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan yang asetnya telah diterima pada tahun anggaran 2014 dan 2015 yang lalu, sedangkan dokumen dan berita acara hibah diserahterimakan pada tahun anggaran 2023 dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KN.01.08/D.I/2820/2023 tanggal 04 April 2023, sehingga menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.11. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah

No.	Jenis	Harga Perolehan (Rp)
1.	Alat Angkutan	1.026.483.000,00
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	608.976.040,00
3.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.912.768.230,00
4.	Alat Laboratorium	7.864.000,00
Jumlah		3.557.091.270,00

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp84.989.999,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.12. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Atribusi Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Pegawai

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan	62.850.999,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
2.	Dinas Kesehatan	4.989.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	6.540.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.250.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	570.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
6.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	3.002.500,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
7.	Sekretariat Daerah	1.440.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.250.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	680.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
10.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.250.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.140.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
<b>Jumlah</b>		<b>84.942.499,00</b>	

Sedangkan pengurangan terhadap nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.605.507.472,00 terdiri dari :

Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB C	Rp	76.856.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB E	Rp	259.872.386,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain (Rusak Berat)	Rp	3.742.027.497,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	82.020.000,00
Dibawah nilai minimum kapitalisasi/Ekstrakomtabel	Rp	709.378.104,00
Hibah	Rp	136.917.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	511.646.485,00
Penghapusan dari Buku Inventaris	Rp	86.790.000,00
<b>Jumlah Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp</b>	<b>5.605.507.472,00</b>

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke KIB C sebesar Rp76.856.000,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD Dinas Pendidikan senilai Rp56.856.000 dan Kecamatan Sangir senilai Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.13. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Harga Perolehan (Rp)	UPT	Ket
1.	Dinas Pendidikan	11.100.000,00	SMP N 9 Solok Selatan	Gazebo
		2.760.000,00	SDN 03 Dusun Tengah	Teralis gedung
		12.000.000,00	SDN 16 Kampung Baru	Teralis gedung
		9.000.000,00	SDN 18 Trans Dusun Tengah	Teralis gedung
		5.000.000,00	SDN 22 Taluk Aia Putih	Tempat Parkir
		5.300.000,00	SDN 03 Pekonina	Teralis gedung
		11.696.000,00	SDN 05 Pasar Muara Labuh	Pemasangan rangka aluminium dan kaca
2.	Kecamatan Sangir	20.000.000,00		Pemasangan interior gedung
<b>Jumlah</b>		<b>76.856.000,00</b>		

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke KIB E sebesar Rp259.872.386,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap



Lainnya pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.14. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya**

No.	Jenis	Harga Perolehan (Rp)
1.	Buku, Atlas dan Peta	6.879.493,00
2.	Alat Musik Modern/Band	252.992.893,00
<b>Jumlah</b>		<b>259.872.386,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp3.742.027.497,00 merupakan reklasifikasi yang mengurangi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan kondisi aset tersebut yang rusak berat dan tidak dioperasikan lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.15. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain dengan Kondisi Rusak**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peralatan dan Mesin					Jumlah (Rp)
		Alat Angkutan (Rp)	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp)	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (Rp)	Alat Kedokteran dan Kesehatan (Rp)	Komputer (Rp)	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	2.285.072.624,00	29.007.073,000	2.314.079.697,00
2.	Sekretariat Daerah	1.156.325.000,00	63.739.800,00	204.883.000,00	-	3.000.000,00	1.427.947.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.156.325.000,00</b>	<b>63.739.800,00</b>	<b>204.883.000,00</b>	<b>2.285.072.624,00</b>	<b>32.007.073,00</b>	<b>3.742.027.497,00</b>

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp82.020.000,00 yang mengurangi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berupa e-Barcode untuk pencatatan obat-obatan.

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang mempunyai harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (ekstrakomtable) dan tidak memenuhi kriteria aset tetap pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 709.378.104,00, dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.16. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Ekstrakomtable)**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	266.954.804,00
2.	Dinas Kesehatan	44.419.400,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	363.490.000,00
4.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	257.500,00
5.	Sekretariat Daerah	22.288.400,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.800.000,00
7.	Kecamatan KPGD	7.168.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>709.378.104,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.917.000,00 yang merupakan hibah dari Dinas Pendidikan senilai Rp124.997.000,00 kepada beberapa sekolah





swasta/yayasan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 420/1793/BAST/DISDIK/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan hibah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan kepada instansi lain berupa hadiah senilai Rp11.920.000,00, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/205/BPL.2-DPKPLHHUB/VIII-2023, tanggal 28 Agustus 2023, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/207/BPL.2-DPKPLHHUB/VIII-2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/212/BPL.2-DPKPLHHUB/VIII-2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.17. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berupa Hibah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Harga Perolehan (Rp)	Penerima	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	114.333.330,00	SD YPTSS Sungai Kunyit	Lap Top
		2.572.222,00	SD YPTSS Sungai Kunyit	Router
		8.091.448,00	SD YPTSS Sungai Kunyit	LCD Projector/Infocus
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	5.000.000,00	SMA N 03 Solok Selatan	Lemari Es
		3.500.000,00	SMA N 01 Solok Selatan	A.C. Split
		1.710.000,00	MAN 01 Solok Selatan	Dispenser
		1.710.000,00	MTsN 02 Solok Selatan	Dispenser
Jumlah		136.917.000,00		

Reklasifikasi entry belanja modal Peralatan dan Mesin ke belanja barang dan jasa sebesar Rp511.646.485,00, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang merupakan barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.18. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan	175.519.961,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
2.	Dinas Kesehatan	53.395.700,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	125.905.084,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
4.	Sekretariat Daerah	156.325.740,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
Jumlah		511.646.485,00	

Terdapat pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan penghapusan dari Daftar Inventaris atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 pada Kecamatan Sungai Pagu sebesar Rp 86.790.000,00, merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang dihapuskan karena bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lalu dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.424-2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Bencana Kebakaran Berupa Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Selain penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap, terdapat mutasi saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta adanya re-organisasi atas perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.19. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Peralatan dan Mesin (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Peralatan dan Mesin (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	270.423.225,00	684.956.650,00
2.	Dinas Kesehatan	306.267.938,00	5.247.131.129,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.252.131.129,00	301.057.838,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	736.221.650,00	396.600.000,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	13.750.000,00
6.	Dinas Perhubungan	0,00	6.797.747.886,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.304.523.791,00	752.449.491,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	415.310.000,00	455.400.000,00
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.850.000,00	0,00
10.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	55.390.000,00	0,00
11.	Kantor Kesatuan Bangsa	240.350.000,00	226.600.000,00
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	451.800.000,00	0,00
13.	Sekretariat Daerah	1.401.459.867,00	1.384.865.310,00
14.	Sekretariat DPRD	484.165.000,00	61.859.200,00
15.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	539.706.366,00	808.541.701,00
16.	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	0,00
17.	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.999.000,00	0,00
18.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	226.600.000,00	367.595.000,00
19.	Kecamatan Sangir	4.150.000,00	0,00
20.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	224.014.505,00	0,00
21.	Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan	0,00	1.982.490.744,00
22.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	35.000.000,00
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	25.000.000,00
24.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.982.490.744,00	452.467.992,00
25.	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.875.000,00	0,00
26.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.984.826,00	0,00
Jumlah		20.003.513.041,00	20.003.513.041,00

**5.3.33 Gedung dan Bangunan**

**31 Des 2023**

**31 Des 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**792.050.970.350,20**

**757.522.080.597,20**

Perhitungan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 792.050.970.350,20 adalah sebagai berikut :





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	757.522.080.597,20
Penambahan Tahun 2023	Rp	43.824.640.839,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>801.346.721.436,20</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	9.295.751.086,00
<b>Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>792.050.970.350,20</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>(161.895.552.315,00)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>630.155.418.035,20</b>

Adapun rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.3.20. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

No.	Jenis	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.797.427.766,63	39.371.172.467,00	6.823.975.036,00	731.244.625.196,63
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	31.021.126.660,00	1.872.328.108,00	62.085.660,00	32.801.368.018,00
3.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.888.820.481,00	0,00	0,00	2.888.820.481,00
4.	Bangunan Menara Perambuan	730.511.520,00	0,00	0,00	730.511.520,00
5.	Tugu/Tanda Batas	22.084.195.290,67	2.551.142.284,00	279.890.400,00	24.365.647.164,67
<b>Jumlah</b>		<b>757.522.080.597,20</b>	<b>43.824.640.839,00</b>	<b>9.295.751.086,00</b>	<b>792.050.970.350,20</b>

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.824.640.839,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	33.210.869.269,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLUD)	Rp	220.658.988,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB B	Rp	76.856.000,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	7.365.709.582,00
Hibah	Rp	2.486.957.000,00
Atribusi belanja barang dan jasa	Rp	32.456.000,00
Koreksi Tambah Nilai Pencatatan	Rp	431.134.000,00
<b>Jumlah penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>43.824.640.839,00</b>

Realisasi belanja modal atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp33.210.869.269,00, adapun rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut :



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

**Tabel V.3.3.20. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Pendidikan	16.927.535.550,00
2.	Dinas Kesehatan	696.491.816,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	6.408.695.298,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	4.545.528.187,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.500.000,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	494.731.693,00
7.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.345.149.935,00
8.	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	123.014.000,00
9.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	49.776.750,00
10.	Sekretariat Daerah	217.579.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.952.000,00
12.	Kecamatan KPGD	200.000,00
13.	Kecamatan Sangir	195.763.000,00
14.	Kecamatan Sangir Jujuan	48.107.717,00
15.	Kecamatan Sangir Batang Hari	174.075.000,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	982.814.223,00
17.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	860.854.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.210.869.269,00</b>

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja modal Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebesar Rp220.658.988,00 berupa bangunan tempat kerja.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp76.856.000,00, yang berasal dari Dinas Pendidikan senilai Rp56.856.000 dan Kecamatan Sangir senilai Rp20.000.000, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.21. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Harga Perolehan (Rp)	UPT	Ket
1.	Dinas Pendidikan	11.100.000,00	SMP.N 9 Solok Selatan	Gazebo
		2.760.000,00	SDN 03 Dusun Tengah	Teras gedung
		12.000.000,00	SDN 16 Kampung Baru	Teras gedung
		9.000.000,00	SDN 18 Trans Dusun Tengah	Teras gedung
		5.000.000,00	SDN 22 Taluk Aia Putih	Tempat Parkir
		5.300.000,00	SDN 03 Pekonina	Teras gedung
		11.696.000,00	SDN 05 Pasar Muera Labuh	Pemasangan rangka aluminium dan kaca
2.	Kecamatan Sangir	20.000.000,00		Pemasangan interior gedung
<b>Jumlah</b>		<b>76.856.000,00</b>		

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi KIB F sebesar Rp7.365.709.582,00, merupakan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaan fisik bangunannya dan telah dimanfaatkan, sehingga dilakukan reklasifikasi ke golongan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian yang terdiri atas :





Tabel V.3.3.22. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / UPB	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	755.784.953,00	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
2.	Dinas Kesehatan	19.255.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.590.669.629,00	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
Jumlah		7.365.709.582,00	

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah sebesar Rp2.486.957.000,00, merupakan gedung dan bangunan yang perolehannya bersumber dari hibah instansi lain kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, merupakan serah terima hibah yang dilakukan oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berupa pembangunan sarana dan prasarana Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran 2007 yang lalu dan proses serah terima hibah dilakukan pada tahun 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 000.3.3.2/8831/Bangda tanggal 09 Agustus 2023, sebagaimana daftar berikut :

Tabel V.3.3.23. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No.	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Uraian
1.	Kecamatan KPGD	540.646.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aula
2.	Kecamatan Sungai Pagu	316.470.000,00	Rumah Dinas Camat
3.	Kecamatan Sangir	818.912.000,00	Bangunan Kantor dan Aula
4.	Kecamatan Sangir Jujuan	477.343.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aula
5.	Kecamatan Sangir Batang Hari	335.586.000,00	Rumah Dinas Camat dan Aula
Jumlah		2.486.957.000,00	

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah nilai perolehan aset gedung dan bangunan adalah sebesar Rp32.456.000,00. Penambahan nilai gedung bangunan tersebut berasal dari kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan yang penganggarannya pada belanja operasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 serta atribusi atas honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada beberapa OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.24. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Atribusi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPT	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Kesehatan	1.151.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Pertanahan	1.230.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.060.000,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor (pemasangan keramik)
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.760.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
5.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.590.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
6.	Sekretariat Daerah	680.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPT	Jumlah (Rp)	Ket
7.	Kecamatan Sangir Jujuan	1.830.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
8.	Kecamatan Sangir Batang Hari	1.340.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
9.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.715.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
<b>Jumlah</b>		<b>32.456.000,00</b>	

Penambahan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 431.134.000,00, merupakan penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan berupa Bangunan Fasilitas Umum Lainnya /Toilet yang berlokasi di RTH Solok Selatan Kecamatan Sangir yang sebelumnya tercatat secara gabungan pada bangunan RTH Padang Aro.

Sementara pengurangan terhadap nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 9.295.751.086,00, berasal dari :

Reklasifikasi ke KIB A	Rp	104.639.665,00
Reklasifikasi ke KIB B	Rp	426.321.838,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	290.747.955,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	6.906.262.298,00
Hibah	Rp	95.717.570,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	200.000,00
Penghapusan aset	Rp	1.040.727.760,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	431.134.000,00
<b>Jumlah pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>9.295.751.086,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 104.639.665,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB A karena realisasi hasil pekerjaan menambah nilai Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Sangir.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 426.321.838,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal Gedung dan Bangunan ke KIB B karena realisasi merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.25. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No.	UPT	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SDN 02 Sungai Kuryit	6.697.189,00	Tiang Bendera
2.	TKN 02 Sungai Pagu	140.060.480,00	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)
3.	TKN 01 Sangir	140.071.480,00	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)
4.	TKN 01 Sangir Balai Jenggo	139.502.690,00	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)
<b>Jumlah</b>		<b>426.321.838,00</b>	





Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp290.747.955,00, merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB D karena realisasi merupakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.26. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	199.624.620,00	Realisasi Belanja Modal berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain
2.	Kecamatan Sangir	91.123.335,00	Realisasi Belanja Modal berupa saluran drainase
Jumlah		290.747.955,00	

Realisasi belanja modal berupa lampu jalan dan taman sebesar Rp199.624.620,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Sedangkan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D pada Kecamatan Sangir sebesar Rp91.123.335,00 merupakan pekerjaan pembangunan drainase/saluran.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di reklasifikasi ke KIB F merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 yang belum selesai proses pengerjaannya sehingga direklasifikasi ke KIB F berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp 6.906.262.298,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.27. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	590.141.000,00
2.	Dinas Kesehatan	49.824.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Pertanahan	6.108.385.298,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	49.850.000,00
5.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.952.000,00
Jumlah		6.906.262.298,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 95.717.570,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada Nagari Lubuk Malako berupa pekerjaan rehabilitasi bangunan Pasar Banca Kapeh Nagari Lubuk Malako dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900/05/NPHD/DPPKUKM-2023 tanggal 29 Desember 2023.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp200.000,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke belanja barang dan jasa, yang merupakan belanja (keramik) pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.040.727.760,00, merupakan penghapusan atas gedung dan bangunan yang disebabkan karena kondisi aset tetap yang tidak layak dan tidak representatif lagi digunakan, serta efisiensi pemanfaatan lahan untuk



pembangunan gedung baru yang anggaran pembangunannya telah tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, sehingga harus dilakukan pembongkaran dan dihapus dari Daftar Inventaris berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.440-2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.28. Rincian Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Asrama Permanen	Kecamatan Sangir Jujuan SDN 08 Koto Gadang	2007	80.943.650,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kecamatan Pauh Duo SDN 02 Pekan Selasa	2007	242.326.110,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	Toilet RTH Padang Aro, Kecamatan Sangir	2016	431.134.000,00
3.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Bangunan Gedung Pertokoan Lainnya (dst)	Lapak PKL RTH Muara Labuh, Kecamatan Sangir	2018	75.740.000,00
4.	Sekretariat Daerah	Pagar Permanen	Gerbang Kantor Bupati, Kecamatan Sangir	2013	199.640.000,00
5.	Kecamatan Sangir	Gedung Pos Jaga Permanen	Kecamatan Sangir	2017	10.944.000,00
Jumlah					1.040.727.760,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 431.134.000,00 merupakan koreksi pencatatan nilai gedung dan bangunan berupa Bangunan Olahraga Terbuka Permanen RTH Padang Aro pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yang mana bangun tersebut berupa bangunan toilet yang tercatat secara gabungan dengan bangunan Taman RTH Padang Aro sehingga dilakukan koreksi pencatatannya sesuai klasifikasi jenis aset.

Disamping itu terdapat mutasi pencatatan Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pendayagunaan barang milik daerah serta re-organisasi karena perubahan SOTK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.29. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Gedung dan Bangunan (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Gedung dan Bangunan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	63.482.477.130,00
2.	Dinas Kesehatan	194.463.875,00	1.285.659.458,00
3.	Dinas Perhubungan	0,00	11.619.048.973,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	12.814.789.254,00	289.652.700,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	180.502.459,00	0,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.105.157.000,00	0,00
7.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	53.482.477.130,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Gedung dan Bangunan (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Gedung dan Bangunan (Rp)
8.	Sekretariat Daerah	0,00	1.390.204.156,00
9.	Inspektorat Daerah	898.398.834,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	5.263.051.249,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	269.652.700,00	0,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	898.398.834,00
13.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.263.051.249,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>74.209.492.300,00</b>	<b>74.209.492.300,00</b>

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	1.484.235.103.721,04	1.410.782.448.374,04

Perhitungan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.484.235.103.721,04 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.410.782.448.374,04
Penambahan Tahun 2023	Rp	77.796.945.275,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.488.579.393.649,04</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.344.289.928,00
<b>Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.484.235.103.721,04</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan s.d 31 Desember 2023	Rp	(881.832.606.433,59 )
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp</b>	<b>602.402.497.287,45</b>

Jumlah tersebut dengan rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

**Tabel V.3.3.30. Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Jenis	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1	Jalan	916.742.379.447,00	64.090.734.244,00	1.536.415.728,00	979.296.697.963,00
2	Jembatan	219.525.556.682,00	2.212.347.500,00	-	221.737.904.182,00
3	Bangunan Air Irigasi	156.702.041.792,00	2.679.482.220,00	69.746.000,00	159.311.788.012,00
4	Bangunan Pengaliran Pasang Surut	412.912.506,00	-	-	412.912.506,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	378.175.445,00	100.568.000,00	-	478.743.445,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	70.287.251.098,04	7.580.919.355,00	2.609.448.200,00	75.258.722.253,04
7	Bangunan Pengembangan	5.665.659.967,00	51.860.000,00	-	5.717.519.967,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

	Sumber Air Dan Air Tanah				
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.763.695.538,00	-	-	2.763.695.538,00
9	Bangunan Air Kotor	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1.351.015.874,00	-	-	1.351.015.874,00
11	Instalasi Air Kotor	1.577.327.000,00	-	-	1.577.327.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	336.606.538,00	-	-	336.606.538,00
13	Instalasi Gardu Listrik	20.385.855.555,00	404.989.545,00	-	20.790.855.100,00
14	Instalasi Pengaman	167.869.050,00	-	-	167.869.050,00
15	Jaringan Air Minum	11.072.828.816,00	128.680.000,00	128.680.000,00	11.072.828.816,00
16	Jaringan Listrik	3.314.145.566,00	547.354.411,00	-	3.861.499.977,00
17	Jaringan Telepon	80.717.500,00	-	-	80.717.500,00
18	Jaringan Gas	6.400.000,00	-	-	6.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.410.782.448.374,04</b>	<b>77.796.945.275,00</b>	<b>4.344.289.928,00</b>	<b>1.484.235.103.721,04</b>

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp77.796.945.275,00 berasal dari:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	77.154.111.140,00
Reklasifikasi dari KIB C	Rp	290.747.955,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	186.350.000,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	165.736.180,00
<b>Jumlah Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp</b>	<b>77.796.945.275,00</b>

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari belanja modal adalah sebesar Rp77.154.111.140,00 berikut rincian penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari realisasi belanja modal Tahun anggaran 2023:

**Tabel V.3.3.31. Rincian Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	73.569.659.588,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3.533.271.552,00
3.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	51.180.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>77.154.111.140,00</b>

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KIB C sebesar Rp290.747.955,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan yang menambah nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan pada Kecamatan Sangir, dengan rincian sebagai berikut :





Tabel V.3.3.32. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	199.624.820,00	Realisasi Belanja Modal berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain
2.	Kecamatan Sangir	91.123.335,00	Realisasi Belanja Modal berupa saluran drainase
Jumlah		290.747.955,00	

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KIB F sebesar Rp 186.350.000,00, merupakan reklasifikasi dari aset Kontruksi Dalam Pengerjaan berupa Perencanaan yang telah selesai pengerjaan fisiknya dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap sehingga menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.33. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Arteri	78.800.000,00	Perencanaan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Jalan Desa Lain-lain	14.800.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	14.830.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	26.600.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	26.600.000,00	Perencanaan
Jumlah			186.350.000,00	

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan aset adalah sebesar Rp165.736.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.34. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	118.858.265,00	atribusi belanja barang dan jasa (perencanaan)
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	45.267.000,00	atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
3.	Kecamatan Sangir	930.915,00	atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
4.	Dinas Pertanian	680.000,00	atribusi belanja barang dan jasa (honorarium pelaksanaan kegiatan)
Jumlah		165.736.180,00	

Sedangkan untuk perhitungan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.344.289.928,00 adalah sebagai berikut:



Reklasifikasi ke KIB E	Rp	2.403.719.200,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	214.271.750,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	1.726.298.978,00
<b>Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.344.289.928,00</b>

Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan ke KIB E sebesar Rp2.403.719.200,00 merupakan reklasifikasi atas belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang realisasinya merupakan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi (lanjutan pembangunan trotoar Padang aro serta pengawasan dan perencanaan) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.

Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 214.271.750,00 merupakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan berupa Perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan dicatat dalam Daftar Inventaris sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.35. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Paket Pekerjaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Padang Aro- Sungai Padi	79.725.750,00
2.	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah Irigasi Bandar Sungai Dahan	69.746.000,00
3.	Perencanaan Pembangunan Trotoar Muara Labuh	64.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>214.271.750,00</b>

Reklasifikasi entry belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp1.726.298.978,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke belanja barang dan jasa yang merupakan alokasi belanja kegiatan yang bukan merupakan aset tetap atau yang tidak menambah nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.36. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Barang dan Jasa**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	98.999.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec, KPGD, Pauh Duo)
		98.999.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec Sanggih )
		62.316.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec SBH, SBJ)
		98.838.000,00	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kec Sungai Pagu, SJJ)
		1.097.537.978,00	Pemeliharaan Rutin Jalan
		128.680.000,00	Lanjutan Air Bersih Jorong Kampung Palek Nagari Pasir Talang Selatan
		129.214.000,00	Normalisasi sungai
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan	11.715.000,00	Belanja Perencanaan dan Pengawasan utang Tahun 2022 yang dibayar tahun





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Perhubungan		2023
<b>Jumlah</b>		<b>1.726.298.978,00</b>	

Selain penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023, juga terdapat mutasi antar Perangkat Daerah atas saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya re-organisasi dan perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.37. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
1.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0,00	9.070.015.883,00
2.	Dinas Pertanian ketahanan Pangan dan Perikanan	9.070.015.883,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.070.015.883,00</b>	<b>9.070.015.883,00</b>

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	<b>51.398.770.995,04</b>	<b>46.007.519.047,04</b>

Perhitungan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.398.770.995,04 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>46.007.519.047,04</b>
Penambahan Tahun 2023	Rp	5.542.804.216,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>51.550.323.263,04</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	151.552.268,00
<b>Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>51.398.770.995,04</b>

Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.542.804.216,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	Rp	2.570.255.650,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	198.878.400,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB B	Rp	259.872.386,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D	Rp	2.403.719.200,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	110.078.580,00
<b>Jumlah Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>5.542.804.216,00</b>

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja modal Aset Tetap Lainnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan tahun 2023 adalah sebesar Rp2.570.255.650,00 berupa buku/bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.3.3.38. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Belanja BOS

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Jumlah (Rp)
		Bahan Perpustakaan (Rp)	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp)	
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.431.033.894,00	139.221.755,00	2.570.255.650,00

Realisasi Belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp198.878.400,00 berupa buku/bahan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp259.872.386,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.39. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Jumlah (Rp)
		Bahan Perpustakaan (Rp)	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp)	
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.679.493,00	252.992.893,00	259.672.386,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB D sebesar Rp2.403.719.200,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan direalisasikan dalam bentuk Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi (lanjutan pembangunan trotoar Padang Aro serta pengawasan dan perencanaan pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi) yang berada di Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 110.078.580,00 merupakan atribusi atas honorarium pekerjaan lanjutan pembangunan trotoar Padang Aro pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan senilai Rp 2.110.000,00 dan atribusi atas belanja peralatan sekolah pada Dinas Pendidikan senilai Rp 107.968.580,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.40. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	UPT	Ket
1.	Dinas Pendidikan	15.681.800,00	SDN 04 Timbulun	Belanja Buku dan bahan kepustakaan
		15.602.500,00	SDN 08 Karang Putih	Buku dan alat musik modern/band
		4.960.000,00	SDN 16 Bukit Malintang	Camera dan alat music modern/band





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	UPT	Ket
		10.811.300,00	SDN 19 Teluak Ala Putih	Belanja Buku
		18.218.800,00	SDN 25 Sungai Linkitang	Buku dan alat music modern/band
		8.033.000,00	SDN 27 Pasir Putih	Buku dan alat music modern/band
		2.899.700,00	SDN 16 BLOK NOL	Buku dan bahan kepustakaan
		6.489.190,00	SDN 02 Sikumbang	Buku dan alat music modern/band
		7.089.100,00	SDN 07 Mudiak Lawe	Buku dan bahan kepustakaan
		13.220.390,00	SDN 13 Bengko	Buku dan alat music modern/band
		5.172.800,00	SDN 15 Kampai	Buku dan bahan kepustakaan
2.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	2.110.000,00		honorarium pekerjaan lanjutan pembangunan Trotoar Padang Aro
<b>Jumlah</b>		<b>110.078.880,00</b>		

Sedangkan perhitungan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 151.552.268,00 dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi ke KIB B	Rp	46.597.000,00
Dibawah nilai minimum kapitalisasi/Ekstrakomtabel	Rp	8.632.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	96.323.268,00
<b>Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>151.552.268,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.597.000,00 merupakan realisasi atas entry belanja modal Aset Tetap Lainnya ke KIB B realisasinya dalam bentuk aset Peralatan Dan Mesin pada Dinas Pendidikan berupa alat kantor dan alat rumah tangga dan alat keselamatan kerja, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.41. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin**

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan		
1.	SMP.N 5 Solok Selatan	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2.997.000,00
2.	BMP.N 28 Solok Selatan	Kursi Tamu	6.600.000,00
3.	SMP.N 28 Solok Selatan	Loudspeaker	4.000.000,00
4.	SMP.N 36 Solok Selatan	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2.500.000,00
5.	SMP.N 36 Solok Selatan	Meja Kerja Kayu	3.500.000,00
6.	SDN 05 Srumbuk	Lemari Kayu	5.000.000,00
7.	SDN 05 Srumbuk	Tenda	3.000.000,00
8.	SDN 05 Srumbuk	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3.000.000,00
9.	TKN 01 Sangir	Focusing Screen/Layer LCD Projector	2.000.000,00
10.	TKN 01 Sangir	Loudspeaker	500.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
11.	TKN 01 Sungai pegu	Rek Kayu	2.500.000,00
12.	UPT SKB	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5.000.000,00
13.	UPT SKB	Loudspeaker	6.000.000,00
Jumlah			46.597.000,00

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang mempunyai harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (ekstrakomtable) tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.632.000,00, dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.42. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Ekstrakomtable)**

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan		
1.	SMP.N 5 Solok Selatan	Gordyin/Kray	732.000,00
2.	SMP.N 32 Solok Selatan	Gordyin/Kray	4.900.000,00
3.	SDN 10 Batang Pasempen	Gordyin/Kray	3.000.000,00
Jumlah			8.632.000,00

Reklasifikasi entry belanja modal Aset Tetap Lainnya ke belanja barang dan jasa sebesar Rp96.323.268,00 merupakan belanja barang berupa barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Dinas Pendidikan berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.43. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Belanja Barang dan Jasa yang Mempunyai Masa Manfaat Kurang dari 12 Bulan**

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga			
1.	SMP.N 2 Solok Selatan	Buku Agama	10.700,00	Buku tuntunan sholat
2.	SMP.N 5 Solok Selatan	Alat Musik Modern/band	2.777.775,00	Perlengkapan drum band
3.	SMP.N 8 Solok Selatan	Buku Umum lain lain	1.000.000,00	Buku induk siswa
4.	SMP.N 11 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan	3.886.000,00	Kain tabir dan buku induk siswa
5.	SMP.N 14 Solok Selatan	Alat Musik Modern/Band (stik drum band)	21.241.731,00	Pakaian drumband dan perlengkapan
6.	SMP.N 17 Solok Selatan	Permainan Olag raga	1.465.200,00	Pakaian seragam voly
7.	SMP.N 23 Solok Selatan	Alat kesenian lain-lain	9.117.500,00	Pakaian drumband dan mayoret
8.	SMP.N 28 Solok Selatan	Buku umum lain lain	3.600,00	Buku referensial
9.	SMP.N 32 Solok Selatan	Alat kesenian lain-lain	11.600.000,00	Pakaian drum band
10.	SDN 02 Tanjung Puan Abai	Buku Umum lain-lain	17.800,00	Juz Amma
11.	SDN 05 Ombak Kubu	Buku Umum lain-lain	19.048,00	Buku referensi





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

12.	SDN 07 Sitapus	Buku umum lain-lain	250.000,00	Buku induk siswa
13.	SDN 13 Batu Gajah	Buku umum lain-lain	11.100,00	Buku sholat jerezah
14.	SDN 17 Rantau Lima Kapeh	Buku umum lain-lain	331.539,00	Buku referensi dan buku assesment
15.	SDN 18 Trans Dusun Tengah	Buku Umum lain-lain	38.826.100,00	Pembayaran honorarium, transportasi dan belanja barang dan jasa
16.	SDN 10 Padang Darek	Buku Umum lain-lain	10.300,00	Buku cerita binatang
17.	SDN 04 Sungai Gadiang	Buku Umum lain-lain	45.000,00	Aquran
18.	SDN 07 Mercu	Alat kesenian lain-lain	4.000.000,00	Belanja bahan habis pakai
19.	SDN 04 Timbulun	Buku Umum lain-lain	15.200,00	Buku Iqra 2
20.	SDN 07 Sungai Duo	Buku Umum lain-lain	25.000,00	Buku saku pramuka dan Buku Iqra
21.	SDN 12 Pinang Awan	Buku Umum lain-lain	462.575,00	Buku register
22.	SDN 13 Simencung	Buku Umum lain-lain	500,00	Buku tulis
23.	SDN 02 Pekan Selasa	Agama Islam	332.000,00	Aquran
24.	SDN 06 Mudlak Lolé	Buku Umum lain-lain	310.900,00	Buku register dan daftar nilai siswa
25.	SDN 09 Kepela Bukit	Alat music modern/band	200.000,00	Sik dan tali senar
26.	SDN 11 Lubuk Jaya	Buku Umum lain-lain	600.000,00	Buku klepper dan register siswa
27.	SDN 14 Mudlak Lolé	Buku Umum lain-lain	16.700,00	Buku referensial
28.	SDN 03 Sungai Kalu	Buku Umum lain-lain	8.000,00	Buku saku
29.	SDN 09 Sungai Pangkur	Buku Umum lain-lain	15.000,00	Pildacil
30.	TKN 01 KPGD	Buku Umum lain-lain	223.000,00	Buku referensi umum
31.	TKN 01 SANGIR	Buku umum lain-lain	1.500.000,00	Buku cerita dan puzzle
<b>Jumlah</b>			<b>96.323.268,00</b>	

<b>5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	<b>66.596.957.759,00</b>	<b>67.015.563.293,00</b>

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp66.596.957.759,00 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>67.015.563.293,00</b>
Penambahan Tahun 2023	Rp	7.133.454.048,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>74.149.017.341,00</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	7.552.059.582,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>66.596.957.759,00</b>

Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp7.133.454.048,00 terdiri dari:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB C	Rp	6.906.262.298,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D	Rp	214.271.750,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	12.920.000,00
<b>Jumlah penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi</b>	<b>Rp</b>	<b>7.133.454.048,00</b>

**Dalam Pengerjaan**

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.906.262.298,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya beserta dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.44. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	UPT	Pekerjaan
1.	Dinas Pendidikan	33.848.360,00	SMP.N 8 Solok Selatan	Perencanaan
		15.928.840,00	SMP.N 11 Solok Selatan	Perencanaan
		27.723.360,00	SMP.N 14 Solok Selatan	Perencanaan
		21.782.840,00	SMP.N 28 Solok Selatan	Perencanaan
		39.925.500,00	SDN 06 Buluh Kasok	Perencanaan
		10.213.500,00	SDN 01 Taleo	Perencanaan
		42.711.000,00	SDN 02 Sungai Kuyit	Perencanaan
		3.375.000,00	SDN 07 Marcu	Perencanaan
		34.849.500,00	SDN 04 Timbulun	Perencanaan
		52.340.120,00	SDN 08 Durian Tarung	Perencanaan
		84.626.000,00	SDN 08 Karang Putih	Perencanaan
		995.700,00	SDN 13 Aie Manyuruk	Perencanaan
		17.133.310,00	SDN 14 Pedang Aro	Perencanaan
		89.522.000,00	SDN 21 Matus	Perencanaan
		26.507.561,00	SDN 23 Tandai	Perencanaan
		60.737.700,00	SDN 31 Sungai Lambai	Perencanaan
		2.987.100,00	SDN 32 Taratak	Perencanaan
		3.982.400,00	SDN 21 MPL Belang Pagu	Perencanaan
10.951.800,00	SDN 24 Lundang	Perencanaan		
2.	Dinas Kesehatan	49.924.000,00		Perencanaan pagar RS Batang Sangir
3.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	6.109.395.298,00		Lanjutan pekerjaan fisik dan perencanaan
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	49.850.000,00		Perencanaan RTH Muars Labuh
5.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.952.000,00		Lanjutan pekerjaan fisik dan perencanaan taman
<b>Jumlah</b>		<b>6.906.262.298,00</b>		





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp214.271.750,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.3.3.45. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Paket Pekerjaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Padang Aro- Sungai Padi	78.725.750,00
2.	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah Irigasi Bandar Sungai Dehan	69.746.000,00
3.	Perencanaan Pembangunan Trotoar Muara Labuh	64.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>214.271.750,00</b>

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 12.920.000,00, berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melekat pada pekerjaan berupa perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.3.46. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	9.850.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	570.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
3.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.500.000,00	Atribusi belanja barang jasa dan belanja pegawai/honorarium
	<b>Jumlah</b>	<b>12.920.000,00</b>	

Sedangkan perhitungan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 7.552.059.582,00, dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi ke KIB C	Rp	7.365.709.582,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	186.350.000,00
<b>Pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp</b>	<b>7.552.059.582,00</b>

Pengurangan atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.365.709.582,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam pengerjaan ke KIB C Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena pembangunan fisik gedung dan bangunan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel V.3.3.47. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / UPB	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	755.784.953,00	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
2.	Dinas Kesehatan	19.255.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.590.669.629,00	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
Jumlah		7.365.709.682,00	

Pengurangan atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp186.350.000,00, merupakan reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke KIB D Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yang telah selesai pekerjaan pembangunannya dan telah dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.3.47. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	Jalan Kabupaten Arteri	78.800.000,00	Perencanaan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Jalan Desa Lain-lain	14.800.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	12.360.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	14.830.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	26.800.000,00	Perencanaan
		Jalan Desa Lain-lain	26.800.000,00	Perencanaan
Jumlah			186.350.000,00	

Selain penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, juga terdapat mutasi antar Perangkat Daerah karena adanya re-organisasi terhadap SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.48. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Antar OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	49.600.000,00
2.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	49.600.000,00	0,00
Jumlah		49.600.000,00	49.600.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	(1.315.682.288.253,68)	(1.150.700.964.067,79)

Kabupaten Solok Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan juga menyajikan penyusutan terhadap Aset Tetap, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa, sesuai kebijakan perhitungan penyusutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan melalui Aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp(1.315.682.288.253,68), dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	(1.150.700.964.067,79)
Koreksi		
Penambahan	Rp	6.131.969.061,00
Pengurangan	Rp	4.137.899.745,00
Jumlah Setelah Koreksi/ Saldo per 1 Januari 2023	Rp	(1.148.706.894.751,79)
Beban Penyusutan Tahun 2023	Rp	(166.975.393.501,89)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	(1.315.682.288.253,68)

Atas penghapusan Aset Tetap yang telah dipindahtangankan dan dihapus, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain kondisi rusak berat dan hilang serta pemutakhiran KIB dan mutasi antar Perangkat Daerah pada Aplikasi SIMDA BMD saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2023 terkoreksi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.3.49. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(238.731.854.803,09)	5.940.638.895,00	2.655.587.838,00	(235.448.785.944,09)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(143.527.793.479,00)	191.332.986,00	1.378.587.774,00	(144.715.048.887,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(788.441.315.785,70)	0,00	103.744.135	(788.545.059.920,70)
	Jumlah Penyusutan	(1.150.700.964.067,79)	6.131.969.061,00	4.137.899.745,00	(1.148.706.894.751,79)

Akumulasi penyusutan Aset Tetap masing-masing golongan aset per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

**Tabel V.3.3.50. Beban dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(235.446.785.944,09)	(36.507.343.561,00)	(271.954.129.505,09)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(144.715.048.867,00)	(17.180.503.428,00)	(161.895.552.315,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(768.545.059.920,70)	(113.287.546.512,89)	(881.832.606.433,59)
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(1.148.706.894.751,79)</b>	<b>(166.975.393.501,89)</b>	<b>(1.315.682.288.253,68)</b>

Sedangkan daftar rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 untuk tiap golongan aset pada masing-masing OPD disajikan pada lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

5.3.4 Aset Lainnya	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	17.825.165.322,50	10.333.988.409,00

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Jenis dan nilai saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel V.3.4.1. Rekapitulasi Aset Lainnya**

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Aset Tidak Berwujud	1.540.963.875,00	1.456.943.875,00	82.020.000,00	5,62
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(973.215.033,50)	(856.628.646,00)	(116.586.387,50)	13,61
3	Aset Tidak Berwujud Setelah Amortisasi	567.748.841,50	602.315.229,00	(34.566.387,50)	(5,74)
4	Aset Lain-lain	27.427.296.606,24	27.677.715.898,24	(250.419.293,00)	(0,90)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(23.408.342.125,24)	(23.310.222.672,24)	(98.119.453,00)	0,42
6	Aset Lain-lain Setelah Penyusutan	4.018.954.481,00	4.367.493.227,00	(348.538.746,00)	(7,98)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	13.238.462.000,00	5.364.179.953,00	7.874.282.047,00	146,79
<b>Jumlah</b>		<b>17.825.165.322,50</b>	<b>10.333.988.409,00</b>	<b>7.491.176.913,50</b>	<b>462,49</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

<b>5.3.4.1 Aset Tak Berwujud</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>
	567.748.841,50	602.315.229,00

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp567.748.841,50 adapun mutasi rincian Aset Tak Berwujud tahun 2023 dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.458.943.875,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	82.020.000,00
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi</b>	<b>Rp</b>	<b>1.540.963.875,00</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp</b>	<b>(973.215.033,50)</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023 (setelah amortisasi)</b>	<b>Rp</b>	<b>567.748.841,50</b>

Tabel V.3.4.2. Rincian Aset Tak Berwujud 2023

SKPD/ Jenis	31 Des 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
<b>1. Rumah Sakit Umum Daerah</b> - Billing Sistem	496.100.000,00	0,00	0,00	496.100.000,00
<b>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b> - Website - SIPPD - Sistem Perencanaan RKPD - E-Musrenbang - ARCGIS - E-RAPAT	20.000.000,00 148.500.000,00 48.510.000,00 100.775.000,00 164.038.795,00 19.900.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000.000,00 148.500.000,00 48.510.000,00 100.775.000,00 164.038.795,00 19.900.080,00
<b>3. Badan Pengelola Keuangan Daerah</b> - Software oracle; dan - SIM BPHTB PBB P2 - Sistem Integrasi BPHTB - Sistem E-Collector PBB P2	54.750.000,00 98.870.000,00 98.920.000,00 98.830.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54.750.000,00 98.870.000,00 98.920.000,00 98.830.000,00
<b>4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan</b> - Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00
<b>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> - Microsoft Office	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
<b>6. Dinas Kesehatan</b> - E-Barcode Obat-obatan - E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	0,00 82.020.000,00	0,00 0,00	15.000.000,00 82.020.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.458.943.875,00</b>	<b>82.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.963.875,00</b>

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp82.020.000,00 pada tahun 2023 merupakan pengadaan sistem pencatatan persediaan obat-obatan E-Barcode pada Dinas Kesehatan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Nilai amortisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.4.3. Amortisasi per SKPD  
Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Pelaporan	Umur Ekonomis 120 bulan	Amortisasi
1	Rumah Sekit Umum Daerah	496.100.000,00				484.000.000,00
	Billing System	121.000.000,00	31-Des-14	31-Des-23	108	108.900.000,00
		375.100.000,00	31-Des-09	31-Des-23	120	375.100.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	601.723.875,00				275.890.033,50
	Web Site	20.000.000,00	31-Des-14	31-Des-23	108	18.000.000,00
	SIPPD	148.500.000,00	31-Des-18	31-Des-23	84	103.950.000,00
	Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	31-Des-16	31-Des-23	84	33.967.000,00
	E-Musrembang	100.775.000,00	31-Des-19	31-Des-23	60	50.387.500,00
	ARCGIS	164.038.795,00	21-Jan-20	31-Des-23	48	65.615.517,50
	E-RAPAT	19.900.080,00	24-Nov-22	31-Des-23	24	3.980.016,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	351.370.000,00				167.923.000,00
	Software Oracle	54.750.000,00	31-Des-14	31-Des-23	108	49.275.000,00
	SIM BPHTB PBB P2	98.870.000,00	31-Des-20	31-Des-23	48	39.548.000,00
	Sistem Integrasi BPHTB	98.920.000,00	31-Des-20	31-Des-23	48	39.568.000,00
	Sistem E-Colektor PBB P2	98.830.000,00	31-Des-20	31-Des-23	48	39.832.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	57.750.000,00				23.100.000,00
	Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	31-Des-20	31-Des-23	48	23.100.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.000.000,00				11.100.000,00
	Microsoft Office	37.000.000,00	04-Okt-21	31-Des-23	36	11.100.000,00
6	Dinas Kesehatan	97.020.000,00				11.202.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	15-Nov-22	31-Des-23	24	3.000.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	82.020.000,00	31-Des-23	31-Des-23	12	6.202.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.540.963.875,00</b>				<b>973.215.033,50</b>





**Tabel V.3.4.4. Beban dan Akumulasi Amortisasi  
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi s/d 2022	Beban Amortisasi 2023	Akumulasi Amortisasi s/d 2023	Nilai Buku s/d 31 des 2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah	496.100.000,00	471.900.000,00	12.100.000,00	484.000.000,00	12.100.000,00
	Biling System	121.000.000,00	96.800.000,00	12.100.000,00	108.900.000,00	12.100.000,00
		375.100.000,00	375.100.000,00	0,00	375.100.000,00	-
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	501.723.875,00	225.717.646,00	50.172.387,00	275.890.033,00	225.833.841,50
	Web Site	20.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00
	SIPPD	148.500.000,00	89.100.000,00	14.850.000,00	103.950.000,00	44.550.000,00
	Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	29.106.000,00	4.851.000,00	33.957.000,00	14.553.000,00
	E-Musrenbang	100.775.000,00	40.310.000,00	10.077.500,00	50.387.500,00	50.387.500,00
	ARCGIS	164.038.795,00	49.211.638,00	16.403.875,00	65.615.517,50	98.423.277,50
	E-RAPAT	19.900.080,00	1.990.008,00	1.990.008,00	3.980.016,00	15.820.064,00
	Badan Pengelola Keuangan Daerah	381.370.000,00	132.786.000,00	35.137.000,00	167.923.000,00	193.447.000,00
	Software Oracle	54.750.000,00	43.800.000,00	5.475.000,00	49.275.000,00	5.475.000,00
SIM BPHTB PBB P2	98.870.000,00	29.661.000,00	9.887.000,00	39.548.000,00	58.322.000,00	
Sistem Integrasi BPHTB	56.920.000,00	29.676.000,00	9.892.000,00	39.568.000,00	58.352.000,00	
Sistem E-Collector PBB P2	66.630.000,00	29.649.000,00	8.883.000,00	38.532.000,00	58.298.000,00	
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan	57.750.000,00	17.325.000,00	5.775.000,00	23.100.000,00	34.650.000,00
	Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	17.325.000,00	5.775.000,00	23.100.000,00	34.650.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	25.900.000,00
	Microsoft Office	37.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	25.900.000,00
6	Dinas Kesehatan	97.020.000,00	1.500.000,00	8.702.000,00	11.202.000,00	85.818.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	82.020.000,00	0,00	8.202.000,00	8.202.000,00	73.818.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.540.963.875,00</b>	<b>656.828.946,00</b>	<b>118.586.387,00</b>	<b>973.215.033,00</b>	<b>667.748.841,50</b>

<b>5.3.4.2. Aset Lain lain</b>	<b>31 Des 2023</b>	<b>31 Des 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>27.427.296.606,24</b>	<b>27.677.715.899,24</b>

Perhitungan aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp27.427.296.606,24 adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	27.677.715.899,24
Penambahan Tahun 2023	Rp	4.099.683.997,00
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b>Rp</b>	<b>31.777.399.896,24</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.350.103.290,00
<b>Saldo Aset lain-lain Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>27.427.296.606,24</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(23.408.342.125,24)
<b>Nilai Buku Aset Lain-lain setelah Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>4.018.954.481,00</b>

Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp4.099.683.997,00 merupakan penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap dengan kondisi rusak berat. Adapun rincian penambahan aset lain-lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Aset Lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp 2.585.702.497,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.4.5. Penambahan Aset Lain-lain dengan Kondisi Rusak Berat**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peralatan dan Mesin				Jumlah (Rp)
		Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp)	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (Rp)	Alat Kedokteran dan Kesehatan (Rp)	Komputer (Rp)	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	-		2.285.072.624,00	29.007.073,00	2.314.079.697,00
2.	Sekretariat Daerah	63.739.800,00	204.883.000,00	-	3.000.000,00	271.622.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.739.800,00</b>	<b>204.883.000,00</b>	<b>2.285.072.624,00</b>	<b>32.007.073,00</b>	<b>2.585.702.497,00</b>

2. Penambahan dari Aset Lain-lain dengan kondisi hilang ke Aset Lain-lain rusak berat sebesar Rp357.656.500,00 merupakan reklasifikasi aset yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah dilakukan penelusuran dan inventarisasi, aset tersebut ditemukan kembali dalam keadaan rusak berat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.344.500,00
2.	Satuan Polisi Pemong Praja Dan Pemadam Kebakaran	800.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	77.928.000,00
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia	15.887.000,00
5.	Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.832.000,00
6.	Kecamatan Pauh Duo	8.930.000,00
7.	Kecamatan Sangir Balai Jango	935.000,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>357.656.500,00</b>

3. Penambahan Aset Lainnya (aset dimanfaatkan pihak lain) sebesar Rp 1.156.325.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten





Solok Selatan yang dipinjam pakai oleh instansi pemerintah lain/vertikal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	384.365.000,00	Pinjam Pakai ke Kapolres
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	384.365.000,00	Pinjam Pakai ke DANDIM
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	367.595.000,00	Pinjam Pakai ke Kejaksaan
Jumlah		1.166.325.000,00	

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp4.350.103.290,00 terdiri atas :

1. Reklasifikasi atas aset lain-lain kondisi hilang ke Aset lain-lain rusak berat sebesar Rp 357.656.500,00, adalah atas inventarisasi dan penelusuran yang dilakukan kembali terhadap barang milik daerah pada beberapa OPD yang sebelumnya dilaporkan sebagai barang hilang telah ditemukan kembali keberadaannya dalam kondisi rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.344.500,00
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	800.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	77.928.000,00
4.	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.887.000,00
5.	Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.832.000,00
6.	Kecamatan Pauh Duo	8.930.000,00
7.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	935.000,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.000.000,00
Jumlah		367.666.800,00

2. Pengurangan aset lain-lain berupa kendaraan yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lain berupa kendaraan operasional jenis minibus dan jeep di reklasifikasi kembali ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 676.725.310,00.
3. Penghapusan atas aset lain-lain berupa alat kantor dan rumah tangga dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan sebesar Rp 3.315.721.480,00 dan kemudian dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.321-2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:



**Tabel V.3.4.6. Pengurangan Aset Lain-lain dari Penghapusan atas Aset Lain-lain**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	616.672.892,00
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.334.122,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	44.922.850,00
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	34.120.150,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	68.129.975,00
6.	Setuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	93.832.229,00
7.	Sekretariat Daerah	903.250.932,00
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	516.638.214,00
9.	Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.650.000,00
10.	Kecamatan KPGD	214.912.300,00
11.	Kecamatan Sungai Pagu	24.505.000,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	118.718.200,00
13.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	326.133.116,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	165.901.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.315.721.480,00</b>

Selain penambahan dan pengurangan nilai Aset Lain-lain untuk Tahun 2023, juga terdapat mutasi Aset Lain-lain antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp1.159.859.312,00, berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel V.3.4.7. Mutasi Aset Lain-lain antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	0,00	486.927.850,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	486.927.850,00	0,00
3.	Sekretariat Daerah	0,00	379.997.000,00
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	379.997.000,00	0,00
5.	Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan	0,00	292.934.462,00
6.	Dinas Pertanian	292.934.462,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.159.859.312,00</b>	<b>1.159.859.312,00</b>

**5.3.4.3. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)**

31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
13.328.462.000,00	5.364.179.953,00

Pada akhir tahun 2023 Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKO Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.





Sesuai Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok Nomor S-68/KPN.0303/2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023, terdapat alokasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp13.238.462.000,00

5.3.5. KEWAJIBAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Rp18.841.445.391,97	Rp23.302.465.783,51

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp18.841.445.391,97 merupakan jumlah kewajiban per 31 Desember 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.5.1. Rincian Kewajiban

JENIS KEWAJIBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen tase
	(Rp)	(Rp)		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18.841.445.391,97	23.302.465.783,51	(4.461.020.391,54)	(19,14)
Jumlah Kewajiban	18.841.445.391,97	23.302.465.783,51	(4.461.020.391,54)	(19,14)

#### A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.841.445.391,97 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.751.975.217,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.461.020.391,54 atau turun sebesar 19,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.5.2 Kewajiban Jangka Pendek

No	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan diterima dimuka	31.214.835,00	44.512.023,00	(13.297.188,00)	(29,87)
2	Utang Beban	18.772.533.227,97	23.220.835.631,51	(4.448.302.403,54)	(19,16)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	1,56
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.841.445.391,97</b>	<b>23.302.465.783,51</b>	<b>(4.461.020.391,54)</b>	<b>(19,14)</b>

##### 1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.214.835,00 sebagai berikut:



**Tabel V.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka**

No	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	22.500.000,00	37.500.000,00	(15.000.000,00)	(40,00)
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	8.714.835,00	7.012.023,00	1.702.812,00	24,28
	<b>Jumlah</b>	<b>31.214.835,00</b>	<b>44.512.023,00</b>	<b>(13.297.188,00)</b>	<b>(29,87)</b>

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.500.000,00 pada BLUD RSUD merupakan pendapatan atas sewa ATM sementara pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame sebesar Rp8.714.835,00.

## 2. Utang beban

Saldo Utang beban per 31 Desember 2023 Rp18.772.533.227,97 terdiri dari utang beban pegawai, utang barang dan jasa, utang beban transfer dan utang belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.5.4 Jenis Utang Beban**

No	UTANG BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	UTANG BEBAN PEGAWAI	5.015.998.106,00	1.572.923.889,51	3.443.074.416,49	218,90
2	UTANG BEBAN BARANG DAN JASA	12.963.977.271,97	20.687.008.389,00	(7.723.031.117,03)	(37,33)
3	UTANG BEBAN TRANSFER	201.637.850,00	358.040.853,00	(156.403.003,00)	(43,55)
4	UTANG BEBAN BELANJA MODAL	590.920.000,00	602.862.700,00	(11.942.700,00)	(1,98)
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.772.533.227,97</b>	<b>23.220.635.631,51</b>	<b>(4.448.302.403,54)</b>	<b>(19,15)</b>

Utang beban tersebut terdapat pada OPD sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel V.3.5.5 Utang Beban Per OPD**

No	OPD	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan / Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.067.543,00	298.439.984,00	(295.372.421,00)	(98,97)
2	Dinas Kesehatan	5.082.980.492,00	4.927.021.205,00	155.959.287,00	3,17
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	8.342.550.871,97	16.584.317.393,00	(8.241.766.721,03)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	137.384.743,00	139.629.646,00	(2.234.903,00)	(1,60)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	522.585.345,00	505.983.506,00	16.591.839,00	3,28
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan	4.979.093,00	1.469.521,00	3.509.572,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	OPD	31-Des-23	31-Des-22	Kenalkan / Penurunan	Persen tase
		(Rp)	(Rp)		
	Transmigrasi				
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.527.695,00	7.514.697,00	12.998,00	0,17
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	312.394,00	0,00	312.394,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pisu	88.000,00	2.163.132,00	(2.075.132,00)	(95,93)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.595.257,00	0,00	5.595.257,00	100,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.394.200,00	6.726.210,00	(5.332.010,00)	(79,27)
13	Dinas Pertanian	1.124.500,00	2.687.100,00	(1.562.600,00)	(58,15)
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.851.415,00	4.490.786,00	360.629,00	8,03
15	Sekretariat Daerah	197.461.948,00	19.769.082,00	177.692.866,00	898,84
16	Sekretariat DPRD	9.681.276,00	10.491.990,00	(810.714,00)	(7,73)
17	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	1.311.379,00	1.330.586,00	(19.207,00)	(1,44)
18	Kecamatan Sungai Pagu	962.029,00	4.498.451,00	(3.536.422,00)	(78,61)
19	Kecamatan Sangir	1.078.092,00	529.933,00	548.159,00	103,06
20	Kecamatan Sangir Jujan	634.140,00	1.898.968,00	(1.264.828,00)	(66,61)
21	Kecamatan Sangir Batang Hari	103.000,00	415.500,00	(312.500,00)	0,00
22	Kecamatan Pauh Duo	199.500,00	136.000,00	63.500,00	46,69
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.000,00	1.069.873,00	(849.873,00)	(79,44)
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	345.983,00	225.104,00	120.879,00	53,70
25	Inspektoral Daerah	0,00	8.310.000,00	(8.310.000,00)	(100,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.028.216,00	1.400.000,00	(371.784,00)	(26,58)
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.443.184.358,00	688.569.026,51	3.754.615.331,49	545,28
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.727.958,00	1.737.958,00	(10.000,00)	(0,58)
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.772.833.227,97</b>	<b>23.220.835.631,51</b>	<b>(4.448.002.403,54)</b>	<b>(19,16)</b>

Utang beban tersebut dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

**1) Utang beban pegawai**

Saldo Utang beban pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.015.998.106,00 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah, yang belum direalisasikan sampai dengan tahun anggaran berakhir.



**Tabel V.3.5.6 Utang Beban pegawai**

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	291.791.074,00	(291.791.074,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	609.336.594,00	431.635.762,00	177.700.832,00	41,17
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	164.692.067,00	408.789.729,00	(244.097.662,00)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	137.512.815,00	(137.512.815,00)	(100,00)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	377.444,00	(377.444,00)	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.574.093,00	705.000,00	2.869.093,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.775.100,00	0,00	2.775.100,00	0,00
8	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.903.132,00	(1.903.132,00)	0,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	710.000,00	(710.000,00)	(100,00)
10	Dinas Pertanian	0,00	710.100,00	(710.100,00)	0,00
11	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sekretariat DPRD	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	0,00
13	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	0,00	232.080,00	(232.080,00)	0,00
14	Kecamatan Sungai Pagu	0,00	3.640.000,00	(3.640.000,00)	0,00
15	Inspektorat Daerah	0,00	8.310.000,00	(8.310.000,00)	(100,00)
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.235.620.252,00	326.546.453,51	3.909.073.798,49	1.197,10
	<b>Jumlah</b>	<b>6.015.998.106,00</b>	<b>1.619.063.589,51</b>	<b>3.396.934.516,49</b>	<b>209,81</b>

Jenis Utang beban pegawai selanjutnya dijelaskan dalam lampiran 26.

**2) Utang Beban Barang dan Jasa**

Saldo utang beban barang jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.963.977.271,97 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel V.3.5.7 Utang Beban Barang dan Jasa**

No	Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
1	2				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.067.543,00	6.648.890,00	(3.581.347,00)	(53,86)
2	Dinas Kesehatan	3.882.733.898,00	3.804.465.443,00	(21.731.545,00)	(0,56)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	8.177.858.604,97	18.175.527.664,00	(7.997.669.059,03)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	137.394.743,00	2.116.831,00	135.277.912,00	6.390,59
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	522.585.345,00	493.673.362,00	28.911.983,00	5,86





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase (%)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.405.000,00	764.521,00	640.479,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.752.595,00	7.514.697,00	(2.762.102,00)	(36,76)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	312.394,00	0,00	312.394,00	0,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88.000,00	280.000,00	(172.000,00)	(66,15)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	5.595.257,00	0,00	5.595.257,00	0,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.394.200,00	6.016.210,00	(4.622.010,00)	(76,83)
14	Dinas Pertanian	1.124.500,00	1.977.000,00	(852.500,00)	(43,12)
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.851.415,00	4.490.796,00	360.629,00	8,03
16	Sekretariat Daerah	197.461.946,00	19.769.082,00	177.692.866,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	9.681.276,00	5.891.990,00	3.989.286,00	70,09
18	Kecamatan Koto Park Gadang Diateh	1.311.379,00	1.098.506,00	212.873,00	19,38
19	Kecamatan Sungai Pagu	962.029,00	858.451,00	103.578,00	12,07
20	Kecamatan Sangir	1.076.092,00	529.933,00	546.159,00	103,06
21	Kecamatan Sangir Jujuan	634.140,00	1.898.968,00	(1.264.828,00)	(66,61)
22	Kecamatan Sangir Batang Hari	103.000,00	415.500,00	(312.500,00)	0,00
23	Kecamatan Pauh Duo	199.500,00	136.000,00	63.500,00	46,69
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.000,00	1.069.873,00	(849.873,00)	(79,44)
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	345.983,00	225.104,00	120.879,00	53,70
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.028.216,00	0,00	1.028.216,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	5.826.256,00	3.961.720,00	1.944.536,00	48,84
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.727.958,00	1.737.958,00	(10.000,00)	(0,58)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.963.977.271,97</b>	<b>20.640.868.489,00</b>	<b>(7.676.891.217,03)</b>	<b>(37,19)</b>

Jenis Utang beban barang dan jasa selanjutnya dijelaskan dalam lampiran 27.

### 3) Utang Beban Transfer

Utang beban transfer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp201.637.850,00 Utang beban transfer merupakan utang yang timbul akibat kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, belum dibayarkan atau dibagihasikan kepada Pemerintah Nagari.

Utang transfer tersebut merupakan utang transfer terhadap alokasi kurang bayar bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari Tahun 2023.



No	Jenis Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen-tase (%)
		(Rp)	(Rp)		
1	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil Pajak Daerah	177.791.347,00	214.824.512,00	(37.033.165,00)	(17,24)
2	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil retribusi daerah	23.846.503,00	143.216.341,00	(119.369.838,00)	(83,35)
Jumlah		201.637.850,00	358.040.853,00	(156.403.003,00)	(43,68)

#### 4) Utang Beban Belanja Modal

Utang beban belanja modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp590.920.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.5.8 Utang Beban Belanja Modal

No	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen-tase
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Kesehatan	590.920.000,00	590.920.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	11.942.700,00	(11.942.700,00)	(100,00)
JUMLAH		590.920.000,00	602.862.700,00	(11.942.700,00)	(1,98)

Utang beban belanja modal pada Dinas Kesehatan merupakan Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Mercu sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayarannya.

#### 3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.697.329,00.

Tabel V.3.5.9 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Persen-tase (%)
		(Rp)	(Rp)		
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPKD)	37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	0,00
1	Utang Sisa BOS	579.200,00	0,00	579.200,00	100,00
2	Utang Jasa Giro kepada Pemerintahan Nagari	32.985.597,00	32.985.597,00	0,00	0,00
3	Utang Jasa Giro kepada Sekolah Swasta	2.866.179,00	2.866.179,00	0,00	0,00
4	Utang Jasa Giro kepada Instansi Lain	1.266.353,00	1.266.353,00	0,00	0,00
JUMLAH		37.697.329,00	37.118.129,00	579.200,00	1,56

Adapun rincian utang jangka pendek selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 28.





## B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

Per 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang jangka panjang adalah sebesar Rp0,00.

5.3.6 EKUITAS	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	1.974.690.884.204,57	2.024.726.747.023,88

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp1.974.690.884.204,57 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2022 sebesar Rp2.024.726.747.023,88 terdapat penurunan nilai sebesar Rp50.035.862.819,31 atau turun sebesar 2,47%. Penghitungan nilai ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	EKUITAS AWAL	2.024.726.747.023,88	1.916.664.776.162,30	109.061.971.871,58	5,69
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.684.992.712,31)	69.526.952.006,87	(138.211.944.721,18)	(154,36)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(1.350.870.107,00)	19.535.019.862,71	(20.885.889.969,71)	(106,92)
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(139.522.600,00)	32.013.636,00	(171.536.236,00)	(535,82)
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.211.347.507,00)	19.503.006.226,71	(20.714.353.733,71)	(106,21)
6	EKUITAS AKHIR	1.974.690.884.204,57	2.024.726.747.023,88	(50.035.862.819,31)	(2,47)

## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1 Pendapatan – LO	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	824.749.562.781,03	894.874.584.431,14

Pendapatan-LO tahun 2023 dengan realisasi Rp824.749.562.781,03 sedangkan tahun 2022 realisasi Rp894.874.584.431,14 terjadi penurunan sebesar Rp70.125.021.650,11 atau 8,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.1 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	68.913.195.401,03	63.825.454.492,14	(4.912.259.091,11)	(5,52)
2.	Pendapatan Transfer-LO	719.725.595.887,00	739.311.478.401,00	(19.585.882.714,00)	(2,72)



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	16.110.771.893,00	61.737.651.538,00	(45.626.879.645,00)	(283,20)
	Jumlah	824.749.562.781,03	894.874.684.431,14	(70.125.021.650,11)	(8,50)

Apabila diperbandingkan dengan Pendapatan – LRA dengan Pendapatan -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4.2 Perbedaan Pendapatan LRA dengan Pendapatan-LO

No	Uraian Pendapatan	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	92.121.048.048,10	93.825.454.492,14	(1.704.406.446,04)
2.	Pendapatan Transfer	764.706.642.867,00	739.311.478.401,00	45.395.164.466,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.828.208.108,00	61.737.651.538,00	(53.909.443.432,00)
	Jumlah	864.655.899.039,10	894.874.684.431,14	(10.218.685.392,04)

Dari tabel rincian pendapatan - lo diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp88.913.195.401,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp93.825.454.492,14 terjadi penurunan sebesar Rp4.912.259.091,11 atau 5,52% Pendapatan Asli Daerah-LO ini memiliki proporsi sebesar 10,78% dari keseluruhan Pendapatan-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	12.788.216.584,00	12.512.850.774,10	275.365.809,90	2,15
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.110.591.022,70	2.208.416.780,00	(95.825.767,30)	(4,54)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	2.796.556.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	13,61
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	71.217.831.077,33	76.690.423.978,04	(5.472.592.900,71)	(7,68)
	Jumlah	88.913.195.401,03	93.825.454.492,14	(4.912.259.091,11)	(5,52)

Apabila diperbandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA dengan Pendapatan Asli Daerah -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





**Tabel V.4.4 Perbedaan Pendapatan Asli Daerah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	11.176.289.585,00	12.788.216.584,00	(1.611.927.019,00)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.000.096.422,70	2.110.591.022,70	(110.494.600,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.796.556.717,00	2.796.556.717,00	0,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	72.902.648.227,09	71.217.831.077,33	1.684.817.149,76
	<b>Jumlah</b>	<b>88.875.590.931,79</b>	<b>88.913.195.401,03</b>	<b>(37.604.469,24)</b>

Dari tabel rincian pendapatan asli daerah - lo diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp12.788.216.584,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp12.512.850.774,10 terjadi penurunan sebesar Rp275.365.809,90 atau 2,15% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.5 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenalkan / Penurunan	%
1.	Pajak Hotel-LO	140.967.113,00	97.148.159,00	43.818.954,00	31,08
2.	Pajak Restoran-LO	2.528.210.675,00	1.999.906.855,00	528.304.020,00	20,89
3.	Pajak Hiburan-LO	0,00	9.170.000,00	(9.170.000,00)	0,00
4.	Pajak Reklame-LO	353.448.896,00	141.311.811,00	212.137.286,00	60,01
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.650.630.326,00	5.410.832.589,00	249.797.737,00	4,41
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	925.842.685,00	1.315.706.186,10	(390.063.503,10)	(42,13)
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.614.703.067,00	2.848.026.329,00	(31.323.262,00)	(1,11)
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	384.813.822,00	692.749.243,00	(328.135.421,00)	(89,99)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.788.216.584,00</b>	<b>12.512.850.774,10</b>	<b>275.365.809,90</b>	<b>2,15</b>

Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO diatas tersebut diperbandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel V.4.6 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah - LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah -LO**

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	140.967.113,00	140.967.113,00	0,00
2.	Pajak Restoran-LO	2.528.210.675,00	2.528.210.675,00	0,00
3.	Pajak Reklame-LO	355.151.708,00	353.448.896,00	1.702.812,00
4.	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.650.671.965,00	5.660.630.326,00	(9.958.361,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	925.642.685,00	925.642.685,00	0,00
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.211.031.597,00	2.814.703.067,00	(1.603.671.470,00)
7.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	364.613.822,00	364.613.822,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.176.269.666,00</b>	<b>12.788.216.584,00</b>	<b>(1.611.927.019,00)</b>

Terjadi selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO dikarenakan:

1. Pendapatan Pajak reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron terjadi perbedaan antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar (Rp1.702.812,00) berasal dari Jurnal Balik Pendapatan di terima di muka lainnya Rp7.012.023,00 dan pelunasan piutang reklame sebesar Rp855.000,00 dikurangi dengan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan karena masa ketetapannya lewat 31 desember 2023 sebesar Rp8.714.835,00.
2. Pendapatan Penerangan Jalan terjadi selisih (Rp9.958.361,00) dikarenakan piutang pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp471.113.417,00 yang diterima tahun 2023 dikurangi dengan munculnya piutang tahun 2023 sebesar Rp481.071.778,00 yang akan diterima tahun 2024
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terjadi perbedaan sebesar (Rp1.603.671.470,00) karena penetapan tahun 2023 sebesar Rp2.814.703.067,00 sedangkan yang ditagih sebesar Rp1.211.031.597,00 terdapat selisihnya yang akan menambah piutang sebesar Rp1.603.671.470,00

#### B. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp2.110.591.022,70 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 terjadi penurunan sebesar Rp95.825.767,30 atau 4,54% dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.4.7 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	136.175.000,00	122.519.000,00	13.656.000,00	10,02
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	110.627.000,00	132.471.000,00	(21.844.000,00)	(19,74)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	477.975.000,00	461.000.000,00	16.975.000,00	3,55
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	61.339.000,00	56.252.000,00	4.913.000,00	(9,58)
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	321.945.312,00	317.719.063,00	4.226.249,00	1,31
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	729.694.933,00	753.745.227,00	(24.050.294,00)	(3,29)
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	35.916.000,00	45.048.000,00	(9.132.000,00)	(25,42)





No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	219.352.000,00	282.505.000,00	(63.153.000,00)	(28,79)
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	27.566.777,70	35.157.500,00	(7.590.722,30)	(27,63)
	Jumlah	2.110.591.022,70	2.205.416.790,00	(95.825.767,30)	(4,54)

Dari Pendapatan Retribusi Daerah -LO diatas apabila diperbandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.8 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan  
Pendapatan Retribusi Daerah -LO

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	136.175.000,00	136.175.000,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	110.627.000,00	110.627.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	367.480.400,00	477.975.000,00	(110.494.600,00)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	51.339.000,00	51.339.000,00	0,00
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	321.945.312,00	321.945.312,00	0,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	729.694.933,00	729.694.933,00	0,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	35.916.000,00	35.916.000,00	0,00
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	219.352.000,00	219.352.000,00	0,00
9.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- LO	27.566.777,70	27.566.777,70	0,00
	Jumlah	2.000.096.422,70	2.110.591.022,70	(110.494.600,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi - LO di rekening Retribusi Pelayanan Pasar-LO sebesar Rp110.494.600,00 dikarenakan adanya penetapan retribusi pelayan pasar sebesar tahun 2023 sebesar Rp477.975.000,00 namun yang tertagih hanya Rp367.480.400,00 maka selisihnya menambah pada Piutang Retribusi Pelayan Pasar sebesar Rp110.494.600,00

#### C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.796.556.717,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 terdapat kenaikan sebesar Rp380.793.767 atau 15,76% .

#### D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp71.217.831.077,33 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.472.592.900,71 atau 7,68% dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:



**Tabel V.4.9 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	21.050.000,00	1.735.201.100,00	(1.714.151.100,00)	(8,143,23)
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	0,00	24.925.000,00	(24.925.000,00)	0,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.737.580.541,24	1.909.652.339,00	1.827.928.202,24	48,90
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	123.301.366,00	(123.301.366,00)	0,00
5.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)	0,00
6.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	5.376.329.638,00	(5.376.329.638,00)	0,00
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	2.299.098.037,00	(2.299.098.037,00)	0,00
8.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	17.995.774.341,46	6.841.059.102,00	11.124.715.239,46	61,92
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	328.368.169,63	87.658.762,28	240.709.407,35	73,30
10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	4.387.800,00	(4.387.800,00)	0,00
11.	Pendapatan dari BLUD-LO	49.165.058.025,00	58.287.511.857,00	(9.122.453.832,00)	(18,55)
	<b>Jumlah</b>	<b>71.217.831.077,33</b>	<b>76.990.423.978,04</b>	<b>(5.472.892.900,71)</b>	<b>(7,68)</b>

Perbedaan lain-lain PAD yang sah LRA dengan lain-lain PAD yang sah LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel V.4.10 Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO**

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.738.881.518,00	3.737.580.541,24	1.300.976,76
3.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	17.995.774.341,46	17.995.774.341,46	0,00
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	328.368.169,63	328.368.169,63	0,00
5.	Pendapatan dari BLUD	50.848.574.198,00	49.165.058.025,00	1.683.516.173,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.902.648.227,09</b>	<b>71.217.831.077,33</b>	<b>1.684.817.149,76</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA di pendapatan blud LO dikarenakan sebagai berikut:

1. Adanya Perbedaan sebesar Rp1.300.976,76 karena pelunasan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility
2. Adanya perbedaan sebesar Rp1.683.516.173,0 dikarenakan adanya realisasi piutang tahun 2023 sebesar Rp5.747.915.543,00 dikurangi dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp4.049.399.370,00 dan ditambah dengan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.000.000,00





## 2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2023 terdapat sebesar Rp719.725.595.687,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp739.311.478.401,00 terjadi penurunan sebesar Rp19.585.882.714,00 atau 2,72% yang mana di dalamnya terdiri dari :

**Tabel V.4.11 Rincian Pendapatan Transfer –LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	61.722.597.282,00	75.744.717.120,00	(14.022.119.838,00)	(22,71)
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	452.753.785.000,00	436.897.960.562,00	15.855.824.438,00	3,60
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	146.651.840.399,00	163.703.080.880,00	(17.051.440.481,00)	(11,62)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	51.597.573.006,00	51.465.719.639,00	131.853.367,00	0,25
5.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(64,26)
	<b>Jumlah</b>	<b>719.725.595.687,00</b>	<b>739.311.478.401,00</b>	<b>(19.585.882.714,00)</b>	<b>(2,72)</b>

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

### 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2023 sebesar Rp61.722.597.282,00 tahun 2022 Rp75.744.717.120,00 terdapat penurunan sebesar Rp14.022.119.838,00 atau 22,71% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DBH PBB-LO	31.557.623.241,00	49.679.511.041,00	(18.121.887.800,00)	(57,42)
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	4.551.585.449,00	5.206.915.840,00	(655.330.391,00)	(14,39)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	362.628.488,00	(362.628.488,00)	0,00
4.	DBH CHT-LO	16.415.505,00	46.466.128,00	(30.052.623,00)	(183,07)
5.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	12.786.004.266,00	16.215.355.856,00	(3.427.351.600,00)	(26,80)
6.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	109.511.756,00	378.155.227,00	(268.643.469,00)	(245,31)
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	660.051.866,00	1.639.733.356,00	(779.681.690,00)	(90,66)
8.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	10.631.726.013,00	45.684.974,00	10.586.041.039,00	99,57
9.	DBH SDA Perikanan-LO	1.207.679.395,00	2.170.064.211,00	(962.384.816,00)	(79,68)
	<b>Jumlah</b>	<b>61.722.697.282,00</b>	<b>75.744.717.120,00</b>	<b>(14.022.119.838,00)</b>	<b>(22,71)</b>

### 2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp452.753.785.000,00 sedang pada Tahun 2022 sebesar Rp436.897.960.562,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.855.824.438,00 atau 3,62%.



3. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp146.651.640.399,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp163.703.080.880,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.051.440.481,00 atau 11,62% dimana rincian sebagai berikut :

Tabel V.4.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan	%
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.374.625.780,00	947.799.433,00	426.826.347,00	31,05
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	9.501.537.287,00	23.778.066.100,00	(14.276.528.813,00)	(150,25)
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.289.551.200,00	17.308.967.300,00	(15.019.416.100,00)	(655,99)
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	8.777.853.393,00	(8.777.853.393,00)	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	3.666.569.223,00	(3.666.569.223,00)	0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	4.074.671.956,00	(4.074.671.956,00)	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	5.925.529.369,00	177.990.290,00	5.747.539.119,00	96,99
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	510.817.000,00	(510.817.000,00)	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	443.693.375,00	(443.693.375,00)	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	22.929.813.300,00	9.243.898.842,00	13.685.914.458,00	59,68
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	7.168.080.009,00	(7.168.080.009,00)	0,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	5.412.783.000,00	(5.412.783.000,00)	0,00
13.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pengendalian Penyakit-LO	304.594.000,00	0,00	304.594.000,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	204.803.271,00	1.200.076.143,00	(995.272.872,00)	(485,96)
15.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	23.572.290.801,00	22.813.857.894,00	758.432.907,00	3,21
16.	DAK Non Fisik-BOS	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kinerja-LO				
17.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	53.709.805.493,00	49.390.073.742,00	4.319.731.751,00	8,04
18.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	837.544.420,00	750.187.500,00	87.356.920,00	10,43
19.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.873.851.000,00	4.351.144.000,00	522.707.000,00	10,72
20.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.469.787.000,00	441.300.000,00	2.028.487.000,00	82,13
21.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan- LO	2.020.400.000,00	0,00	2.020.400.000,00	100,00
22.	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	6.410.739.281,00	146.691.270,00	6.264.048.011,00	97,71
23.	DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	5.649.655.900,00	0,00	5.649.655.900,00	100,00
24.	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB-LO	1.585.844.450,00	2.017.879.200,00	(432.034.750,00)	(27,24)
25.	DAK Non Fisik- PK2UKM-LO	373.098.250,00	377.183.000,00	(4.178.750,00)	(1,11)
26.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	466.446.597,00	167.531.750,00	298.914.847,00	64,08
27.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	201.815.000,00	535.766.500,00	(333.951.500,00)	(165,47)
	Jumlah	146.651.640.399,00	183.793.080.880,00	(17.051.440.481,00)	(11,82)

Perbedaan DAK - LRA dengan DAK - LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

**Tabel V.4.14 Perbedaan DAK - LRA dengan  
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO**

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD-LO	1.374.625.780,00	1.374.625.780,00	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD-LO	9.501.537.287,00	9.501.537.287,00	0,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP-LO	2.289.551.200,00	2.289.551.200,00	0,00
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Peruggasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	5.925.529.369,00	5.925.529.369,00	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan-LO	22.929.813.300,00	22.929.813.300,00	0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	304.594.000,00	304.594.000,00	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	204.803.271,00	204.803.271,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	23.572.290.801,00	23.572.290.801,00	0,00
9.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	53.709.805.493,00	53.709.805.493,00	0,00
11.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	837.544.420,00	837.544.420,00	0,00
12.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.873.851.000,00	4.873.851.000,00	0,00
13.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.469.787.000,00	2.469.787.000,00	0,00
14.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.020.400.000,00	2.020.400.000,00	0,00
15.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	6.410.739.281,00	6.410.739.281,00	0,00
16.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi	5.649.655.900,00	5.649.655.900,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
	Puskesmas-LO			
17.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.585.844.450,00	1.585.844.450,00	0,00
18.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	466.446.597,00	466.446.597,00	0,00
19.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	201.815.000,00	201.815.000,00	0,00
20.	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	373.006.250,00	373.006.250,00	0,00
	Jumlah	148.651.840.399,00	148.651.840.399,00	0,00

**4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2023 sebesar Rp51.465.719.839,00 sedang untuk tahun 2022 sebesar Rp51.465.719.839,00 terdapat kenaikan sebesar Rp131.853.167,00 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.782.708.381,00	12.406.484.179,00	(643.755.798,00)	(5,47)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.981.087.078,00	6.207.350.841,00	(226.263.763,00)	(3,78)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	20.612.771.458,00	19.321.418.906,00	1.291.352.552,00	6,28
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	367.457.143,00	292.324.351,00	75.132.792,00	20,44
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	12.873.548.946,00	13.238.161.562,00	(364.612.616,00)	(2,83)
	Jumlah	51.897.573.006,00	51.465.719.839,00	131.853.167,00	0,25

**5. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp11.500.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 39,13%

**3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp16.110.771.693,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.626.879.845,00 atau 283,20% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

No	Uraian	2023	2022	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	5.895.892.270,00	48.815.844.132,00	(42.719.951.862,00)	(724,57)
2	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	0,00	5.229.130.000,00	(5.229.130.000,00)	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.214.879.423,00	7.892.677.408,00	2.322.202.017,00	22,73





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023	2022	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
	Jumlah	18.110.771.893,00	61.737.651.538,00	(46.626.879.845,00)	(283,20)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA sebagai mana dengan tabel dibawah ini:

**Tabel V.4.17 Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LRA dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Seliah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	0,00	5.895.892.270,00	(5.895.892.270,00)
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	10.011.920.023,00	10.214.879.423,00	(202.959.400,00)
	Jumlah	10.011.920.023,00	18.110.771.893,00	(8.098.851.670,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan tersebut pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat sebesar Rp5.895.892.270,00 merupakan bantuan Pemerintah Pusat dengan rincian:

No	URAIAN	2023
		(Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.557.091.270,00
2.	Dinas Pertanian	166.134.000,000
3.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	540.646,000,00
4.	Kecamatan Sungai Sangir	816.912.000,00
5.	Kecamatan Sangir Jujuan	477.343.000,00
6.	Kecamatan Sangir Batang Hari	335.588.000,00
	Jumlah	5.895.892.270,00

2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp64.469.300,00 karena ada penerimaan piutang sebesar Rp155.055.500,00 dan adanya piutang tahun 2023 sebesar Rp358.014.900,00,

5.4.2 BEBAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	873.461.391.766,34	793.698.394.937,27

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan implementasi Permendagri ini terdapat penyesuaian dalam penyajian Laporan Operasional Tahun 2023.



Jumlah Beban Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp873.461.391.766,34 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp793.698.394.937,27 mengalami kenaikan sebesar Rp79.762.996.829,07 atau 10,05% yang merupakan Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.18 Rincian Beban**

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pegawai - LO	379.003.820.339,44	380.297.198.562,34	(1.293.378.222,90)	(0,34)
2	Beban Persediaan	97.695.937.920,46	82.071.298.264,75	15.624.639.655,71	19,04
3	Beban Jasa	104.865.115.711,00	85.078.381.312,52	19.786.734.398,48	23,26
4	Beban Pemeliharaan	2.471.497.437,00	6.866.731.757,00	(4.395.234.320,00)	(64,01)
5	Beban Perjalanan Dinas	35.500.721.399,00	41.087.206.641,00	(5.586.485.242,00)	(13,60)
6	Beban Hibah	27.774.142.546,00	5.965.116.904,00	21.809.025.642,00	365,61
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.447.009.682,39	137.472.897.465,09	29.974.112.217,30	21,80
9	Beban Penyisihan Piutang	4.998.579.683,05	799.037.113,85	4.199.542.569,20	525,58
10	Beban Transfer	50.819.233.213,00	49.467.550.012,00	1.151.683.201,00	2,33
11	Beban Lain-lain	3.065.333.835,00	4.592.976.904,72	(1.507.643.069,72)	(32,82)
	<b>Jumlah</b>	<b>873.461.391.766,34</b>	<b>793.698.394.937,27</b>	<b>79.762.996.829,07</b>	<b>10,05</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut :

**A. BEBAN PEGAWAI - LO**

Beban Pegawai Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp379.003.820.339,44 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp380.297.198.562,34 terjadi penurunan sebesar Rp1.293.378.222,90 atau (0,34%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.4.19 Rincian Beban Pegawai-LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	230.380.779.690,00	224.046.460.925,00	6.314.318.765,00	2,82
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	67.339.314.767,00	73.880.762.813,50	(6.541.448.046,50)	(8,85)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.381.384.770,07	72.217.621.931,21	(836.237.161,14)	(1,16)
4	Beban Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.107.343.370,00	9.323.696.803,00	(216.243.433,00)	(2,32)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	304.121.742,37	317.890.089,63	(13.768.347,26)	(4,33)
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
	KDHWKDH				
Jumlah		379.003.820.339,44	390.297.198.862,34	(1.293.378.222,90)	(0,34)

Dari tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

**1. Rincian beban Gaji dan Tunjangan – LO**

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan – LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp230.360.779.690,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp224.046.460.925,00 terjadi kenaikan sebesar Rp6.314.318.765,00 atau 2.82% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.20 Rincian Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan –LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Gaji PNS / Uang Representasi – LO	159.215.144.344,00	160.133.004.844,00	(917.860.300,00)	(0,57)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	9.922.081.600,00	5.715.086.200,00	4.206.995.400,00	73,61
3	Beban Tunjangan Keluarga – LO	15.747.741.845,00	15.802.596.138,00	(54.854.293,00)	(0,35)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.009.548.070,00	583.947.776,00	425.600.294,00	72,88
5	Beban Tunjangan Jabatan – LO	3.731.514.505,00	3.797.560.900,00	(66.046.395,00)	(1,74)
6	Beban Tunjangan Fungsional – LO	10.459.493.800,00	10.455.039.400,00	4.454.400,00	0,04
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	2.571.295.888,00	2.675.085.000,00	(103.789.134,00)	(3,88)
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	620.480.000,00	384.310.000,00	236.170.000,00	70,32
9	Beban Tunjangan Beras – LO	9.933.999.369,00	10.067.526.840,00	(133.527.271,00)	(1,52)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	736.149.300,00	434.737.260,00	301.412.040,00	69,33
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	194.573.498,00	207.434.089,00	(12.860.591,00)	(6,20)
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.938.746,00	0,00	18.938.746,00	100,00
13	Beban Pembulatan Gaji – LO	2.453.911,00	2.425.139,00	28.772,00	1,19
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	173.351,00	96.807,00	76.544,00	79,07
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan – LO	14.381.103.469,00	11.716.590.031,00	2.664.513.438,00	22,74
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	428.651.426,00	239.525.008,00	189.126.418,00	78,96
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	326.000.000,00	695.087.717,00	(369.087.717,00)	(53,10)
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.412.980,00	64.396.033,00	(33.983.053,00)	(62,47)
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	979.338.906,00	995.955.297,00	(16.616.391,00)	(1,67)
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	61.684.704,00	86.056.846,00	(24.372.142,00)	(28,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>230.360.779.690,00</b>	<b>224.046.460.925,00</b>	<b>6.314.318.765,00</b>	<b>2,82</b>



## 2. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS– LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp67.339.314.767,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.880.762.813,50,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.541.448.046,50 atau (8,85%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.21 Rincian Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS –LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67.339.314.767,00	73.796.477.813,50	(6.456.163.046,50)	(8,75)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	85.285.000,00	(85.285.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>67.339.314.767,00</b>	<b>73.880.762.813,50</b>	<b>(6.541.448.046,50)</b>	<b>(8,85)</b>

## 3. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya– LO

Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya– LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp71.381.384.770,07 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp72.217.621.931,21 terjadi penurunan sebesar Rp836.237.161,14 atau (1,16%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.22 Rincian Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Objek Lainnya –LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.650.000,00	2.737.500,00	912.500,00	33,33
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	32.500.000,00	125.143.500,00	(92.643.500,00)	(74,03)
3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.270.000,00	4.045.000,00	3.225.000,00	79,73
4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	132.297.007,12	282.576.729,88	(150.279.722,76)	(53,18)
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		81.100.000,00	(81.100.000,00)	(100,00)
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.012.782,00	42.340.000,00	(6.327.238,00)	(14,94)
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.300.000,00	18.250.000,00	(10.950.000,00)	(60,00)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.372.488,00	0,00	10.372.488,00	100,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemekalan Kekayaan Daerah	5.429.375,00	4.891.000,00	538.375,00	11,01
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga		13.150.000,00	(13.150.000,00)	(100,00)
11	Beban TPG PNSD	54.767.456.700,00	52.158.716.813,00	2.608.737.887,00	5,00
12	Beban TKG PNSD	4.854.852.900,00	4.346.927.100,00	507.925.800,00	11,68
13	Beban Tamal Guru PNSD	960.000.000,00	1.015.500.000,00	(55.500.000,00)	(5,47)
14	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.945.385.592,95	8.806.542.288,33	(2.861.156.695,38)	(32,49)
15	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.029.372.500,00	4.047.380.000,00	(18.007.500,00)	(0,44)
16	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	481.135.445,00	872.070.000,00	(390.934.555,00)	(44,83)
17	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	108.350.000,00	396.250.000,00	(287.900.000,00)	(72,68)
	<b>JUMLAH</b>	<b>71.381.384.770,07</b>	<b>72.217.621.931,21</b>	<b>(836.237.161,14)</b>	<b>(1,16)</b>

**4. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO**

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.107.343.370,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp9.323.586.803,00 terdapat penurunan sebesar Rp.216.243.433,00 atau (2,32%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.23 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	55.771.800,00	55.677.300,00	94.500,00	0,17
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	66.916.080,00	65.577.080,00	1.339.020,00	2,04
4	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.859.300,00	83.859.300,00	0,00	0,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
8	Beban Tunjangan Reses – LO	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.134.198,00	50.033.107,00	101.091,00	0,20
10	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	49.080.320,00	44.978.032,00	4.102.288,00	9,12
11	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	866.376,00	288.792,00	33,33
12	Beban Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	2.599.128,00	866.376,00	33,33
13	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1.771.656.000,00	1.762.291.500,00	9.364.500,00	0,53
14	Beban Tunjangan Transportasi – LO	3.238.900.000,00	3.471.300.000,00	(232.400.000,00)	(6,69)
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.107.343.370,00</b>	<b>9.323.586.803,00</b>	<b>(216.243.433,00)</b>	<b>(2,32)</b>

**5. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO**

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp304.121.742,37 sedang tahun 2022 sebesar Rp317.890.089,63 terdapat penurunan sebesar Rp13.768.347,26 atau 4,33% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.24 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00	869.040,00	16,67
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	469.056,00	448.414,00	20.642,00	4,60
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.360,00	1.200,00	160,00	13,33
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.466.240,00	5.010.720,00	455.520,00	9,09
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	102.960,00	9.360,00	9,09
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	308.880,00	28.080,00	9,09
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	145.562.675,63	(145.562.675,63)	(100,00)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.809.000,00	(1.809.000,00)	(100,00)
12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	72.332.541,37	0,00	72.332.541,37	0,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00
17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.687.985,00	0,00	14.687.985,00	0,00
18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>304.121.742,37</b>	<b>317.890.089,63</b>	<b>(13.768.347,26)</b>	<b>(4,33)</b>

6. **Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH – LO**  
Beban Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp510.876.000,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp510.876.000,00 tidak terdapat kenaikan atau penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.25 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	399.996.000,00	399.996.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>510.876.000,00</b>	<b>510.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi belanja pegawai di LRA adalah sebesar Rp375.400.727.878,95 Sementara itu realisasi beban pegawai di LO adalah sebesar Rp379.014.155.239,44. Terdapat perbedaan sebesar Rp3.613.427.360,49 Perbedaan belanja pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.



Tabel V.4.26 Perbedaan Belanja Pegawai- LRA dengan  
Beban Pegawai-LO

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	226.503.687.528,00	230.360.779.690,00	(3.857.092.162,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	67.328.077.992,00	67.339.314.767,00	(11.236.775,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.635.306.971,95	71.361.394.770,07	253.922.201,88
4	Beban Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.107.343.370,00	9.107.343.370,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	315.436.017,00	304.121.742,37	11.314.274,63
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00
Jumlah		375.400.727.878,95	379.003.820.339,44	(3.603.092.460,49)

## B. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp97.695.937.920,46 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp82.071.298.264,75 terjadi kenaikan sebesar Rp15.624.639.655,71 atau 19,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.27 Rincian Beban persediaan

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Bahan Pakai Habis	97.631.914.995,46	82.038.707.735,75	15.593.207.259,71	19,01
2	Beban Bahan Tak Pakai Habis	64.022.925,00	32.590.529,00	31.432.396,00	96,45
Jumlah		97.695.937.920,46	82.071.298.264,75	15.624.639.655,71	19,04

Dari tabel diatas Rincian Beban persediaan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut

### a. Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebesar Rp97.631.914.995,46 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp82.038.707.735,75 terjadi kenaikan sebesar Rp15.593.207.259,71 atau 19,01% dengan rincian sebagai berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Tabel V.4.28 Rincian Beban Bahan Pakai Habis

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.299.717.670,00	1.195.723.248,00	103.994.422,00	8,70
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	545.685.742,55	560.938.977,00	(15.253.234,45)	(2,72)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.852.891.228,00	4.891.440.925,45	961.450.302,55	19,66
4	Beban Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	9.045.000,00	1.435.000,00	15,87
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	139.414.961,00	222.574.000,00	(83.159.039,00)	(37,36)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(100,00)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	716.838.177,00	799.829.400,00	(82.791.223,00)	(10,35)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	62.117.400,00	130.176.600,00	(68.059.200,00)	(52,28)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.335.240.586,00	13.112.225.238,00	(10.776.984.652,00)	(82,19)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.848.933.527,00	2.826.380.288,00	23.553.239,00	0,83
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	116.357.056,00	250.549.969,00	(134.192.903,00)	(53,56)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.615.000,00	1.332.800,00	25.282.200,00	1.896,92
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.431.297,00	3.540.000,00	(2.108.703,00)	(59,57)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00	100,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.588.626.422,97	3.876.485.037,92	712.141.385,05	18,37
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.452.858.567,00	1.471.322.158,00	(18.463.601,00)	(1,25)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.963.256.432,00	6.356.288.146,00	606.968.286,00	11,33
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	275.142.169,00	283.615.700,00	(8.473.531,00)	(2,99)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.915.400,00	12.398.000,00	4.517.400,00	36,44



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	132.145.698,00	110.075.273,00	22.070.425,00	20,05
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	807.117.327,00	785.159.285,90	21.958.041,10	2,80
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.727.000,00	1.197.600,00	1.529.400,00	127,71
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	267.814.168,00	225.329.948,00	42.484.220,00	18,85
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	380.562.891,00	120.744.288,00	259.818.603,00	215,18
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.785.590,00	566.138.841,48	(165.353.251,48)	(29,21)
29	Beban Obat-Obatan-Obat	16.451.447.075,13	11.118.231.514,00	5.333.215.561,13	47,97
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.789.876.625,00	1.687.313.041,00	102.563.584,00	6,08
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.410.902.302,81	14.883.894.629,00	12.527.007.673,81	84,16
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	836.672.220,00	669.792.293,00	166.879.927,00	25,21
33	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	70.451.832,00	(70.451.832,00)	(100,00)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.195.548.650,00	1.963.397.527,00	(767.848.877,00)	(39,11)
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	232.523.100,00	176.339.875,00	56.183.225,00	31,86
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	58.076.500,00	64.558.000,00	(6.481.500,00)	(10,04)
37	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	118.000,00	(118.000,00)	(100,00)
38	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.397.913.135,00	4.306.860.305,00	91.052.830,00	2,11
39	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.563.370.867,00	1.909.228.618,00	674.142.049,00	35,31
40	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	80.761.000,00	(80.761.000,00)	(100,00)
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.345.922.090,00	576.398.110,00	42,83
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	1.178.266.404,00	139.538.750,00	1.038.727.654,00	744,40





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Kesehatan				
43	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.132.280.225,00	4.208.416.305,00	2.923.863.920,00	69,48
44	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	354.426.420,00	356.513.000,00	(2.086.580,00)	(0,59)
45	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500.000,00	424.612.500,00	(102.112.500,00)	(24,05)
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	213.594.637,00	10.000.000,00	203.594.637,00	2.035,95
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.479.627.324,00	672.727.690,00	806.899.634,00	119,94
48	Beban Pakaian Penyelamatan	8.799.991,00	450.000,00	8.349.991,00	1.855,55
49	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	2.180.000,00	71.750.000,00	(69.590.000,00)	(96,99)
50	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
51	Beban Pakaian Adat Daerah	161.988.993,00	145.049.999,00	16.938.994,00	11,68
52	Beban Pakaian Balik Tradisional	462.774.545,00	105.400.000,00	357.374.545,00	339,07
53	Beban Pakaian Olahraga	505.148.837,00	695.950.294,00	(190.801.427,00)	(27,42)
54	Beban Pakaian Paskibraka	180.515.835,00	117.000.000,00	63.515.835,00	54,29
55	Beban Pakaian Jas/Safari	463.315.000,00	1.000.000,00	462.315.000,00	46.231,50
56	Beban Pakaian Teknik	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
57	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	31.593.000,00	0,00	31.593.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.631.914.995,46</b>	<b>82.038.707.735,75</b>	<b>15.593.207.259,71</b>	<b>19,01</b>

**b. Beban Bahan Tak Pakai Habis**

Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebesar Rp64.022.925,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp32.590.529,00 terjadi kenaikan sebesar Rp31.432.296,00 atau 96,45 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.29 Rincian Beban Bahan Tak Pakai Habis**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	54.373.300,00	20.458.904,00	33.914.396,00	165,77
2	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.649.625,00	11.616.625,00	(1.967.000,00)	(16,93)
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	515.000,00	(515.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>64.022.925,00</b>	<b>32.590.529,00</b>	<b>31.432.396,00</b>	<b>96,45</b>

Realisasi belanja Persediaan di LRA adalah sebesar Rp99.475.775.928,33 Sementara itu realisasi beban Persediaan di LO adalah sebesar Rp97.723.502.419,30. Terdapat perbedaan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

sebesar Rp1.752.273.509,03 Perbedaan Belanja Persediaan LRA dengan Beban Persediaan LO dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.4.30 Perbedaan Belanja Persediaan- LRA dengan Beban Persediaan-LO**

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.299.717.670,00	1.299.717.670,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	570.688.344,55	545.885.742,55	24.982.602,00	123.424.424,00	148.407.026,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.882.890.533,00	5.852.891.228,00	29.999.305,00	32.235.015,00	62.234.320,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	139.414.961,00	139.414.961,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	987.278.577,00	716.838.177,00	270.440.400,00	54.723.000,00	325.163.400,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	208.445.200,00	62.117.400,00	146.327.800,00	0,00	146.327.800,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.380.044.226,00	2.335.240.586,00	44.803.640,00	9.192.000,00	53.995.640,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.849.933.527,00	2.849.933.527,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	291.303.632,00	116.357.056,00	174.946.576,00	0,00	174.946.576,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.615.000,00	26.615.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	0,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Bangkal					
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.431.297,00	1.431.297,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.560.213.827,97	4.588.626.422,97	(28.412.595,00)	627.064.821,00	498.652.226,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.470.569.322,00	1.462.858.567,00	17.710.755,00	9.915.410,00	27.626.165,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.025.383.744,00	5.963.256.432,00	62.127.312,00	17.876.000,00	80.005.312,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	275.252.169,00	275.142.169,00	110.000,00	2.950.000,00	3.060.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.915.400,00	16.915.400,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	132.145.698,00	132.145.698,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	767.735.550,00	607.117.327,00	(19.381.777,00)	79.858.600,00	60.476.823,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	267.814.168,00	267.814.168,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja	380.562.891,00	380.562.891,00	0,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.578.552,00	400.785.590,00	(207.038,00)	207.038,00	0,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat	17.222.513.972,00	16.479.011.573,97	743.502.398,03	1.541.905.047,00	2.285.407.445,03
29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.789.257.455,00	1.789.878.625,00	(619.170,00)	619.170,00	0,00
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.619.394.786,81	27.410.902.302,81	208.492.486,00	38.164.500,00	248.656.986,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	867.175.220,00	838.672.220,00	28.503.000,00	0,00	28.503.000,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.221.140.917,00	1.195.548.650,00	25.592.267,00	28.320.885,00	53.913.152,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	232.523.100,00	232.523.100,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	44.078.500,00	58.078.500,00	(14.000.000,00)	14.000.000,00	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.397.913.135,00	4.397.913.135,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.583.370.667,00	2.583.370.667,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.922.320.200,00	1.922.320.200,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas	1.202.571.952,00	1.178.266.404,00	24.305.548,00	0,00	24.305.548,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pelayanan Urusan Kesehatan					
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.145.330.225,00	7.132.280.225,00	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	354.426.420,00	354.426.420,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	322.500.000,00	322.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	213.594.637,00	213.594.637,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.479.627.324,00	1.479.627.324,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pakaian Penyelamatan	8.799.991,00	8.799.991,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Pakaian Teknik	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	31.593.000,00	31.593.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	161.988.993,00	161.988.993,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	462.774.545,00	462.774.545,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	505.148.837,00	505.148.837,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Pakaian Paskibraka	180.515.835,00	180.515.835,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Pakaian Jas/Safari	463.315.000,00	463.315.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	47.554.500,00	47.554.500,00	0,00	0,00	0,00
55	Belanja Komponen-Komponen	6.818.800,00	6.818.800,00	0,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Lainnya					
56	Belanja Pipa- Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.649.625,00	9.649.625,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	99.476.776.928,33	97.723.502.419,30	1.752.273.809,03	2.480.457.910,00	4.232.731.419,03

**C. BEBAN JASA**

Beban Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp104.865.115.711,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp85.078.381.312,52 terjadi penurunan sebesar Rp19.786.734.398,48 atau (23,26%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.31 Rincian Beban Jasa

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Jasa Kantor	72.102.224.194,00	58.171.290.161,52	13.930.934.032,48	23,95
2	Beban Premi Asuransi	20.721.632.088,00	18.006.570.500,00	2.626.061.588,00	14,51
3	Beban Sewa Tanah	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.538.925.562,00	1.079.747.025,00	1.469.178.537,00	135,14
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.416.322.167,00	989.672.884,00	426.649.283,00	43,11
6	Beban Jasa Konsultasi	3.664.293.643,00	2.609.906.127,00	954.387.416,00	36,57
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.473.244.584,00	1.082.000.000,00	391.244.584,00	36,16
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	696.266.000,00	1.364.129.490,00	(798.873.490,00)	(57,30)
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.114.674.550,00	598.500.000,00	516.174.550,00	86,24
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.338.543.023,00	1.055.615.125,00	282.927.898,00	26,80
	Jumlah	104.865.115.711,00	85.078.381.312,52	19.786.734.398,48	23,26

Dari rincian beban jasa diatas dapat pula dirinci beban jasa sebagai berikut:

**1. Beban Jasa kantor – LO**

Beban Jasa Kantor tahun 2023 sebesar Rp72.102.224.194,00 sedang tahun 2022 sebesar Rp58.171.290.161,52 terdapat kenaikan sebesar Rp13.930.934.032,48 atau 23,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.32 Rincian Beban Jasa Kantor

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	4.637.620.000,00	2.171.863.000,00	2.465.757.000,00	113,53





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan /	%
		(Rp)	(Rp)	Penurunan (Rp)	
	Pembawa Acara, dan Panitia				
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.829.905.523,00	1.200.321.791,12	629.583.731,88	52,45
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	100,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	412.762.980,00	489.261.496,00	(76.498.536,00)	(15,64)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.176.730.000,00	104.800.000,00	1.071.930.000,00	1.022,83
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.160.000,00	350.000,00	5.810.000,00	1.660,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	66.499.000,00	30.932.000,00	35.567.000,00	114,98
8	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	49.400.000,00	2.040.000,00	47.360.000,00	2.321,57
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	46.552.000,00	73.100.000,00	(26.548.000,00)	(36,32)
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	462.000.000,00	442.600.000,00	19.400.000,00	4,38
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.106.791.000,00	2.580.364.000,00	(473.573.000,00)	(18,35)
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20.028.888.877,00	20.118.981.253,40	(90.092.376,40)	(0,45)
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	27.727.400,00	24.330.222,00	3.397.178,00	13,96
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.857.955.000,00	1.492.147.000,00	365.808.000,00	24,52
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	940.500.000,00	699.400.000,00	241.100.000,00	34,47
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	522.000.000,00	460.200.000,00	61.800.000,00	13,43
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	54.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	107,69
19	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	34.800.000,00	29.400.000,00	5.400.000,00	18,37
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	737.423.000,00	384.674.000,00	352.749.000,00	91,70
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.395.640.000,00	3.249.940.000,00	1.145.700.000,00	35,25
22	Beban Jasa Tenaga	297.470.000,00	270.360.000,00	27.120.000,00	10,03



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Operator Komputer				
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.200.000,00	177.385.320,00	(134.185.320,00)	(75,85)
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.455.774.309,00	1.725.364.050,00	(269.589.741,00)	(19,83)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.332.173.000,00	2.895.797.400,00	445.375.600,00	15,43
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.581.900.000,00	1.444.550.000,00	117.350.000,00	8,12
27	Beban Jasa Tenaga Supir	1.633.400.000,00	1.251.400.000,00	382.000.000,00	30,53
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	1.476.000.000,00	1.383.550.000,00	92.450.000,00	6,68
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.029.173.943,00	1.832.139.459,00	197.034.484,00	10,75
30	Beban Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan	1.287.892.000,00	62.620.000,00	1.225.272.000,00	1.956,68
31	Beban Jasa Tata Rias	24.700.000,00	23.200.000,00	1.500.000,00	6,47
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.258.226.890,00	821.984.000,00	436.242.890,00	53,07
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	98.307.900,00	132.915.745,00	(34.607.845,00)	(26,04)
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.870.000,00	3.600.000,00	2.270.000,00	63,06
36	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	14.400.000,00	45.600.000,00	(31.200.000,00)	(68,42)
37	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.755.849.550,00	153.319.000,00	2.602.531.550,00	1.697,47
38	Beban Jasa Pelayanan Kebersihan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	116.282.787,00	30.000.000,00	86.282.787,00	287,61
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.610.000,00	11.814.000,00	(10.204.000,00)	(86,37)
41	Beban Jasa Kalibrasi	257.558.019,00	54.999.500,00	202.558.519,00	369,29
42	Beban Jasa Pengolahan Sampah	352.939.631,00	76.600.000,00	276.339.631,00	360,76
43	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	200.000,00	900.000,00	(700.000,00)	(77,78)
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	593.351.400,00	147.463.000,00	445.888.400,00	302,37
45	Beban Tagihan Telepon	232.358.556,00	302.054.143,00	(69.695.587,00)	(23,07)
46	Beban Tagihan Air	474.719.510,00	430.476.466,00	44.243.044,00	10,28
47	Beban Tagihan Listrik	7.936.305.831,00	6.884.148.558,00	1.052.157.273,00	16,28
48	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	129.570.000,00	337.825.000,00	(208.255.000,00)	(61,55)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	3.358.793.935,00	2.604.477.085,00	754.316.849,00	28,96
50	Beban Paket/Pengiriman	5.725.240,00	11.480.953,00	(5.755.713,00)	(50,13)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
51	Beban Penambahan Daya	20.043.400,00	10.123.845,00	9.919.555,00	97,88
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	209.008.083,00	270.145.370,00	(61.137.287,00)	(22,63)
53	Beban Lembur	1.604.838.500,00	1.165.360.548,00	439.477.952,00	37,71
54	Beban Medical Check Up	68.641.950,00	37.642.958,00	30.998.994,00	82,35
55	Beban Registrasi/Keanggotaan	16.725.000,00	0,00	16.725.000,00	100,00
56	Beban Pengolahan Air Limbah	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00	100,00
57	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.102.224.194,00</b>	<b>68.171.290.161,52</b>	<b>13.930.934.032,48</b>	<b>23,95</b>

**2. Beban Jasa Premi Asuransi – LO**

Beban Jasa Premi Asuransi tahun 2023 sebesar Rp20.721.632.088,00 sedang untuk tahun 2022 sebesar Rp18.095.570.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.626.061.588,00 atau 14,51% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.33 Rincian Beban Jasa Premi Asuransi – LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	603.734.300,00	564.892.500,00	38.871.800,00	6,88
2	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	68.290.000,00	0,00	68.290.000,00	100,00
3	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.887.912.240,00	17.515.708.000,00	2.372.204.240,00	13,54
4	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.155.304,00	15.000.000,00	71.155.304,00	474,37
5	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	77.540.244,00	0,00	77.540.244,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.721.632.088,00</b>	<b>18.095.570.500,00</b>	<b>2.626.061.588,00</b>	<b>14,51</b>

**3. Beban Sewa Tanah**

Beban sewa tanah tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.950.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.950.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.4.34 Rincian Beban Sewa Tanah – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)

#### 4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin – LO

Beban Sewa Sewa Peralatan dan Mesin – LO tahun 2023 sebesar Rp2.538.925.562,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.079.747.025,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.459.178.537,00 atau 135,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.35 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Alat Pengangkat	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	120,00
2	Beban Sewa Electric Generating Set	400.000,00	9.275.000,00	(8.875.000,00)	(95,69)
3	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	290.951.900,00	99.744.800,00	191.207.300,00	191,70
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.380.000,00	7.835.000,00	42.545.000,00	543,01
6	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	50.000.000,00	123.800.000,00	(73.800.000,00)	(59,64)
7	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.210.231.202,00	400.191.415,00	810.039.787,00	202,41
8	Beban Sewa Alat Pendingin	8.736.000,00	5.712.000,00	3.024.000,00	52,94
9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	135.354.950,00	46.052.900,00	89.272.050,00	193,72
10	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	563.854.000,00	144.296.000,00	419.558.000,00	290,76
11	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	65.440.000,00	(65.440.000,00)	(100,00)
12	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	1.300.000,00	75.000,00	1.225.000,00	1.633,33
13	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.925.000,00	1.902.310,00	4.022.690,00	211,46
14	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	2.080.000,00	(2.080.000,00)	(100,00)
15	Beban Sewa Peralatan Umum	209.077.500,00	172.412.800,00	36.664.700,00	21,27
16	Beban Sewa Personal Computer	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	566,67
17	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
18	Beban Sewa Kendaraan	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Bermotor Beroda Dua				
19	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
20	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
21	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Jumlah	2.538.925.562,00	1.079.747.026,00	1.459.178.537,00	135,14

**5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO**

Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO tahun 2023 sebesar Rp1.416.322.167,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp989.672.884,00 terdapat penurunan Rp426.649.283,00 atau (43,11%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.36 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	132.516.667,00	114.000.000,00	18.516.667,00	16,24
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	263.432.500,00	241.785.000,00	21.647.500,00	8,95
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000,00	1.450.000,00	(850.000,00)	100,00
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	500.000,00	0,00	500.000,00	101,00
5	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	161.582.384,00	(161.582.384,00)	102,00
6	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	356.620.000,00	373.270.000,00	(16.650.000,00)	(4,46)
7	Beban Sewa Hotel	662.653.000,00	87.585.500,00	565.067.500,00	579,05
	Jumlah	1.416.322.167,00	989.672.884,00	426.649.283,00	43,11

**6. Beban Jasa Konsultasi – LO**

Beban Jasa Konsultasi – LO tahun 2023 sebesar Rp3.564.293.543,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.609.906.127,00 terdapat kenaikan sebesar Rp954.387.416,00 atau 36,57% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.37 Rincian Beban Jasa Konsultasi- LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	763.194.000,00	(763.194.000,00)	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	14.893.750,00	(14.893.750,00)	(100,00)
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	0,00	127.567.167,00	(127.567.167,00)	(100,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Konstruksi Bangunan Gedung				
4	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	79.900.000,00	0,00	79.900.000,00	100,00
5	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	521.963.210,00	(521.963.210,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	68.148.996,00	39.677.900,00	28.471.096,00	71,76
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	1.042.910.100,00	(1.042.910.100,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Bidang Keperiwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaan Pariwisata	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)	(100,00)
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.259.214.547,00	0,00	2.259.214.547,00	100,00
11	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.157.030.000,00	0,00	1.157.030.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.564.293.543,00</b>	<b>2.609.906.127,00</b>	<b>954.387.416,00</b>	<b>36,57</b>

**7. Beban Beasiswa – LO**

Beban Beasiswa Pendidikan PNS – LO tahun 2023 sebesar Rp1.473.244.584,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.082.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp391.244.584,00 atau 36,16% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.38 Rincian Beban Beasiswa Pendidikan PNS- LO**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	199.494.584,00	0,00	199.494.584,00	100,00
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	38.250.000,00	0,00	38.250.000,00	101,00
3	Beban Beasiswa	1.235.500.000,00	1.082.000.000,00	153.500.000,00	102,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.473.244.584,00</b>	<b>1.082.000.000,00</b>	<b>391.244.584,00</b>	<b>36,16</b>

**8. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO**

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO tahun 2023 sebesar Rp595.256.000,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.394.129.490,00 terdapat penurunan sebesar Rp798.873.490,00 atau (57,30%) dengan rincian sebagai berikut:





Tabel V.4.39 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS- LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	142.550.000,00	394.375.490,00	(251.825.490,00)	100,00
2	Beban Bimbingan Teknis	452.706.000,00	294.914.000,00	157.792.000,00	101,00
3	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	704.840.000,00	(704.840.000,00)	102,00
	Jumlah	595.256.000,00	1.394.129.490,00	(798.873.490,00)	(57,30)

9. **Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO**  
Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2023 sebesar Rp1.114.674.550,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp598.500.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp516.174.550,00 atau 86,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.40 Rincian Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.114.674.550,00	328.500.000,00	786.174.550,00	100,00
2	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	270.000.000,00	(270.000.000,00)	101,00
	Jumlah	1.114.674.550,00	598.500.000,00	516.174.550,00	86,24

10. **Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO**  
Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2023 sebesar Rp1.338.543.023,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.055.615.125,00 terdapat kenaikan sebesar Rp282.927.898,00 atau 26,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.41 Rincian Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.318.043.023,00	1.044.815.125,00	273.227.898,00	100,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	101,00
3	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	4.500.000,00	10.800.000,00	(6.300.000,00)	102,00
	Jumlah	1.338.543.023,00	1.055.615.125,00	282.927.898,00	26,80



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

Selisih antara Belanja pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan beban pada LO (Laporan Operasional) sebagai berikut:

**Tabel V.4.42 Rincian selisih antara LRA dengan LO**

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	78.745.181.857,00	72.102.224.194,00	6.642.957.663,00	10.164.188.010,00	16.807.145.673,00
2	Beban Premi Asuransi	20.856.342.098,00	20.721.632.088,00	(98.290.000,00)	68.280.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.532.050.562,00	2.538.925.562,00	(6.875.000,00)	6.875.000,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.418.405.000,00	1.418.322.167,00	2.083.333,00	0,00	2.083.333,00
6	Beban Jasa Konsultasi	3.584.293.543,00	3.584.293.543,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.278.100.000,00	1.473.244.584,00	(195.144.584,00)	195.144.584,00	0,00
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	790.400.584,00	565.258.000,00	195.144.584,00	0,00	195.144.584,00
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.114.674.550,00	1.114.674.550,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.789.825.283,00	1.338.543.023,00	431.282.260,00	0,00	431.282.260,00
Jumlah		111.889.273.967,00	104.885.116.711,00	7.003.158.256,00	10.432.437.594,00	17.435.655.650,00

**D. BEBAN PEMELIHARAAN**

Beban Pemeliharaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.471.497.437,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.866.731.757,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.395.234.320,00 atau (64,01%) dengan rincian sebagai berikut:





Tabel V.4.43 Rincian Beban Pemeliharaan

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.814.900,00	0,00	2.814.900,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	1.822.591.073,00	1.629.731.457,00	192.859.616,00	11,83
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.776.903,00	2.088.887.572,00	(1.589.111.069,00)	(76,15)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.226.962,00	3.137.822.728,00	(3.098.695.766,00)	(98,75)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	109.087.999,00	12.190.000,00	96.897.999,00	794,90
Jumlah		2.471.497.437,00	6.866.731.757,00	(4.395.234.320,00)	(64,01)

Beban Pemeliharaan diatas dapat pula dirinci sebagai berikut:

**1. Beban Pemeliharaan Tanah – LO**

Beban Pemeliharaan Tanah - LO tahun 2023 sebesar Rp2.814.900,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.814.900,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.44 Rincian Beban Pemeliharaan Tanah – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.592.900,00	0,00	1.592.900,00	100,00
Jumlah		2.814.900,00	0,00	2.814.900,00	100,00

**2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO**

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO tahun 2023 sebesar Rp1.822.591.073,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.629.731.457,00 terdapat kenaikan sebesar Rp192.859.616,00 atau 11,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.45 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	113.908.869,00	0,00	113.908.869,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat	244.528.788,00	253.178.230,00	(8.649.442,00)	(3,42)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Besar Darat Lainnya				
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	37.080.660,00	(37.080.660,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	580.000,00	105.603.126,00	(105.043.126,00)	(99,47)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	1.302.783,00	(1.302.783,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.595.000,00	7.301.000,00	(2.706.000,00)	(37,06)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	28.744.000,00	10.182.400,00	18.561.600,00	182,28
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.320.000,00	11.070.000,00	(4.750.000,00)	(42,91)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	791.851.010,00	874.273.358,00	(82.622.348,00)	(9,46)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	480.000,00	55.256.000,00	(54.776.000,00)	(99,13)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	168.238.157,00	74.537.050,00	93.699.107,00	126,71
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	1.431.000,00	(1.431.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	2.870.850,00	0,00	2.870.850,00	100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.384.849,00	0,00	12.384.849,00	100,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	5.017.499,00	0,00	5.017.499,00	100,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	51.050.500,00	0,00	51.050.500,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	6.993.000,00	86.260.550,00	(79.267.550,00)	(91,89)
22	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	267.658.711,00	0,00	267.658.711,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	610.000,00	(610.000,00)	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	6.070.000,00	4.650.000,00	1.420.000,00	30,54
25	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	100,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	885.000,00	0,00	885.000,00	100,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	4.155.000,00	1.100.000,00	3.055.000,00	277,73
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.617.340,00	19.975.000,00	(4.357.660,00)	(21,82)
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.300.000,00	900.000,00	400.000,00	44,44
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Mainframe				
33	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.750.000,00	2.175.000,00	(425.000,00)	(19,54 )
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.630.000,00	3.600.000,00	7.030.000,00	195,28
35	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	1.625.000,00	(1.625.000,00)	(100,0 0)
36	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.498.000,00	23.716.800,00	22.781.200,00	98,06
37	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	4.640.000,00	10.610.000,00	(5.970.000,00)	(56,27 )
38	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	540.000,00	793.500,00	(253.500,00)	(31,95 )
39	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percetakan- Alat Peraga Pelatihan	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00	100,00
	Jumlah	1.822.891.073,00	1.629.731.457,00	193.159.616,00	11,83

**3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO**

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2023 sebesar Rp497.776.503,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp2.086.887.572,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.589.111.069,00 atau (76,15%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.46 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	439.727.921,00	1.915.753.714,00	(1.476.025.793,00)	(77,05)
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	335.000,00	1.284.000,00	(949.000,00)	(73,91)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	356.000,00	300.000,00	56.000,00	18,67





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	1.570.000,00	(1.570.000,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.933.787,00	55.945.000,00	(39.011.213,00)	(69,73)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	6.280.000,00	(6.280.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.488.000,00	24.965.000,00	(7.499.000,00)	(30,01)
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	2.900.000,00	11.950.000,00	(9.050.000,00)	(75,73)
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	11.594.795,00	53.883.000,00	(42.268.205,00)	(78,47)
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.045.000,00	(1.045.000,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pesti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	13.911.858,00	(13.911.858,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	8.443.000,00	0,00	8.443.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>497.776.503,00</b>	<b>2.086.887.572,00</b>	<b>(1.589.111.069,00)</b>	<b>(76,15)</b>

**4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO**

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO tahun 2023 sebesar Rp39.226.962,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp3.137.922.728,00 per dapat penurunan Rp3.098.695.766,00 atau (98,75%) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel V.4.47 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	1.635.323.342,00	(1.635.323.342,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	1.435.289.261,00	(1.435.289.261,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	7.472.400,00	3.995.000,00	3.477.400,00	87,04
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	11.827.000,00	6.689.000,00	5.138.000,00	76,81
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	19.927.562,00	0,00	19.927.562,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	54.125.125,00	(54.125.125,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>39.226.962,00</b>	<b>3.137.922.728,00</b>	<b>(3.098.695.766,00)</b>	<b>(98,75)</b>

**5. Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya – LO**

Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya – LO tahun 2023 sebesar Rp109.087.999,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp12.190.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp96.897.999,00 atau 794,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.48 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Teap Lainnya – LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	54.795.300,00	9.250.000,00	45.545.300,00	482,38
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	4.079.999,00	2.940.000,00	1.139.999,00	38,78
5	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	26.030.200,00	0,00	26.030.200,00	100,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahr aga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	17.163.000,00	0,00	17.163.000,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahr aga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.939.500,00	0,00	4.939.500,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahr aga-Tanda Penghargaan- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
	Jumlah	109.067.999,00	12.190.000,00	96.897.999,00	794,90

Perbedaan antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebagai mana Tabel dibawah ini:

**Tabel V.4.49 Perbedaan Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA**

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	JURNAL BALIK	JURNAL PENYESUIAN
		(Rp)	(Rp)			
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.814.900,00	2.814.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	1.804.810.072,00	1.822.591.073,00	(17.781.001,00)	18.188.501,00	1.387.500,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	619.267.926,00	497.776.503,00	121.491.423,00	13.522.843,00	136.014.266,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.228.962,00	39.228.962,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	109.087.999,00	109.087.999,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.575.207.859,00	2.471.497.437,00	103.710.422,00	32.691.344,00	136.401.766,00

Dari Tabel diatas terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan sebesar Rp17.781.001,00 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan-LO kapitalisasi ke asset Tetap Peralatan dan mesin.
2. Adanya perbedaan sebesar Rp121.491.423,00 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan gedung dan bangunan kapitalisasi ke asset tetap Gedung dan Bangunan.



#### E. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.500.721.399,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp41.087.206.641,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.586.485.242 atau (13,60 %) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.50 Rincian Beban Perjalanan Dinas- LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.631.273.461,00	9.752.488.666,00	(121.215.205,00)	(1,24)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	446.917.192,00	94.760.000,00	352.137.192,00	371,63
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.412.975.746,00	31.228.357.975,00	(5.815.382.229,00)	(18,62)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.055.000,00	11.580.000,00	(3.525.000,00)	(30,44)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Jumlah	35.500.721.399,00	41.087.206.641,00	(5.586.485.242,00)	(13,60)

#### F. BEBAN HIBAH

Beban Hibah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebesar Rp27.774.142.546,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.965.116.904,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.809.025.642,00 atau 365,61% dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.51 Rincian Beban Hibah- LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.159.999.345,00	1.215.447.460,00	10.944.551.885,00	900,45
2	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.951.572.000,00	0,00	3.951.572.000,00	100,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.648.107.570,00	1.320.000.000,00	328.107.570,00	24,86
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		Rp	Rp		
	Kemasyarakatan				
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.817.627.998,00	2.399.420.500,00	4.418.207.498,00	184,14
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.820.227.100,00	0,00	1.820.227.100,00	100,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	546.359.589,00	0,00	546.359.589,00	100,00
	Jumlah	27.774.142.546,00	5.965.116.904,00	21.809.025.642,00	365,61

Perbedaan beban hibah – LO dengan belanja Hibah LRA sebagai mana Tabel dibawah ini:

**Tabel V.4.52 Perbedaan Beban Hibah- LO dengan Belanja Hibah – LRA**

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.159.999.345,00	12.159.999.345,00	0,00
2	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.951.572.000,00	3.951.572.000,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.550.000.000,00	1.648.107.570,00	(98.107.570,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.817.627.998,00	(6.817.627.998,00)
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944,00	830.248.944,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.895.230.100,00	1.820.227.100,00	(124.997.000,00)
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	546.359.589,00	546.359.589,00	0,00
	Jumlah	20.733.409.978,00	27.774.142.546,00	(7.040.732.568,00)



Dari tabel diatas terdapat selisih sebesar Rp 7.040.732.568,00 dikarenakan adanya hibah gedung dan pertokoan sebesar Rp98.107.570,00 pada dinas Perindagkop ke Nagari Lubuk Malako, dan adanya hibah dari Dinas Pendidikan berupa Hibah Peralatan dan Mesin Sebesar 124.997.000,00 ke Sekolah Swasta, dan adanya Beban Hibah Persediaan Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp6.817.627.998,00 merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum.

#### G. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp167.447.009.682,39 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp137.472.897.465,09 maka terdapat peningkatan sebesar Rp29.974.112.217,30 atau 21,80% dengan rincian terdiri dari :

Tabel V.4.53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin *)	36.507.343.561,00	31.423.635.568,09	5.083.707.992,91	16,18
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan*)	17.180.603.428,00	15.929.653.174,00	1.250.950.254,00	7,85
3	Beban Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan *)	113.287.546.512,89	90.011.224.336,00	23.276.322.176,89	25,86
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	116.586.387,50	108.384.387,00	8.202.000,50	7,57
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	355.029.793,00	0,00	355.029.793,00	100,00
Jumlah		167.447.009.682,39	137.472.897.465,09	29.974.112.217,30	21,80

#### H. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.998.579.683,05 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp799.037.113,85 terjadi kenaikan sebesar Rp4.199.542.589,20 atau 525,58% . Rincian Beban penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel V.4.54 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	0,00	(4.275,09)	4.275,09	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	49.791,80	(235.666,76)	285.456,66	(121,13)
3	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	4.655.402.087,20	200.425.342,30	4.454.976.744,90	2.222,76
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	281.601.580,00	345.219.472,00	(63.617.892,00)	(18,43)





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	(948.642,19)	948.642,19	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	28.124.000,00	(28.124.000,00)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.633.436,55	36.699.917,11	(28.066.480,56)	(76,48)
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	51.877.990,50	35.825.040,98	16.052.949,52	44,81
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	413.444,00	(413.444,00)	(100,00)
10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	153.609.579,00	(153.609.579,00)	(100,00)
11	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.014.797,00	(81.097,50)	1.105.894,50	(1.213,97)
Jumlah		4.998.579.683,05	799.037.113,85	4.199.542.569,20	528,58

**L. BEBAN TRANSFER**

Beban Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.619.233.213,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp49.467.550.012,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.151.683.201,00 atau 2,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.55 Rincian Beban Transfer

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa	1.151.825.218,00	976.804.695,00	175.020.523,00	17,92
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	121.380.995,00	289.681.817,00	(168.300.822,00)	(58,10)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	49.346.027.000,00	48.201.063.500,00	1.144.963.500,00	2,38



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
Jumlah		60.619.233.213,00	49.467.550.012,00	1.151.683.201,00	2,33

**Tabel V.4.58 Perbedaan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer LRA**

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa	1.188.858.383,00	1.151.825.218,00	(37.033.165,00)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	240.750.833,00	121.380.995,00	(119.369.838,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	49.346.027.000,00	49.346.027.000,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	41.852.235.000,00	0,00	(41.852.235.000,00)
Jumlah		92.827.871.216,00	60.619.233.213,00	(42.008.638.003,00)

**J. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban Lain – lain Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.085.333.835,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.592.976.904,72 terjadi penurunan sebesar Rp1.507.643.069,72 atau (32,82%). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.57 Rincian Beban lain-lain**

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	772.276.160,00	(772.276.160,00)	(100,00)
2	Beban Lain-lain	3.085.333.835,00	3.820.700.744,72	(735.366.909,72)	(19,25)
Jumlah		3.085.333.835,00	4.592.976.904,72	(1.507.643.069,72)	(32,82)

**5.4.3 Surplus/Defisit Operasional**

**31 Des 2023  
(Rp)**

**31 Des 2022  
(Rp)**

**(48.711.828.985,31)**

**101.176.189.493,87**

Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp(48.711.828.985,31) dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2022 sebesar Rp101.176.189.493,87 terdapat penurunan sebesar Rp(149.888.018.479,18) atau (148,15 %).





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

5.4.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Des 2023 (Rp) (48.534.992.712,31)	31 Des 2022 (Rp) 90.366.952.008,87
-------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2023 adalah sebesar Rp(48.534.992.712,31) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp90.366.952.008,87 terjadi penurunan sebesar Rp(138.901.944.721) atau (153,71)%.

Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp150.000.000 dan Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp. 840.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp690.000.000) atau (82,14)% merupakan beban tak terduga

5.4.5 Surplus/Defisit LO	31 Des 2023 (Rp) (48.684.992.712,31)	31 Des 2022 (Rp) 89.526.952.008,87
--------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------

Surplus/Defisit LO Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 sebesar Rp(48.684.992.712,31) Jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp89.526.952.008,87 terjadi kenaikan sebesar Rp(138.211.944.721,18) atau (154,38)% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.4.58 Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/ penurunan	%
	Rp	Rp		
Pendapatan- LO	824.749.582.781,03	894.874.584.431,14	(70.125.021.650,11)	(7,84)
Beban	873.461.391.788,34	793.898.394.937,27	79.562.996.829,07	10,05
Surplus / Defisit dari Operasi	(48.711.828.986,31)	101.176.189.493,87	(149.888.018.479,18)	(148,15)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	176.836.273,00	0,00	176.836.273,00	100
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	-100
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	(10.809.237.485,00)	-10.809.237.485,00	0,00
Surplus/Defisit Non Operasional	176.836.273,00	(10.809.237.485,00)	10.986.073.758,00	101,54
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(48.534.992.712,31)	90.366.952.008,87	(138.901.944.721,18)	(153,71)
Beban Luar Biasa - LO	(150.000.000,00)	(840.000.000,00)	(690.000.000,00)	(82,14)
Surplus / Defisit -LO	(48.684.992.712,31)	89.526.952.008,87	(138.211.944.721,88)	(154,38)



## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis Laporan Realisasi Anggaran.

### 5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	798.145.513.191,79	839.801.556.539,10
Arus Kas Keluar	696.479.753.226,28	655.371.333.571,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	101.665.759.965,51	184.430.222.968,00

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp798.145.513.191,79 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.556.539,10 atau terjadi penurunan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp41.656.043.347,31 atau turun sebesar 4,96%.

Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp696.479.753.226,28 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp655.371.333.571,10 atau terjadi kenaikan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp41.108.419.655,18 atau naik 6,27%.

Sehingga Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.665.759.965,51 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.430.222.968,00 atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp82.764.463.002,49 atau turun sebesar 44,88%.

#### 5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Sampai dengan 31 Desember 2023 Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp798.145.513.191,79 Sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp840.018.798.191,79 dimana terdapat selisih sebesar Rp41.873.285.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		Rp	Rp	
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.289.555,00	11.176.289.555,00	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.096.422,70	2.000.096.422,70	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.556.717,00	2.796.556.717,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	72.881.588.227,09	72.902.648.227,09	(21.050.000,00)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.699.998.917,00	26.699.998.917,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam	27.148.316.318,00	27.148.316.318,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		Rp	Rp	
7	Penerimaan Dana Alokasi umum	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.640.399,00	146.651.640.399,00	0,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	41.852.235.000,00	(41.852.235.000,00)
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.311.603,00	39.025.311.603,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	10.011.920.023,00	10.011.920.023,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>798.146.513.191,79</b>	<b>840.018.798.191,79</b>	<b>(41.873.285.000,00)</b>

Selisih antara Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas dengan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp41.873.285.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Arus Kas sebesar Rp72.881.598.227,09 sedangkan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp72.902.648.227,09. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp21.050.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena Penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp21.050.000,00.
2. Penerimaan Dana penyesuaian di Laporan Arus Kas sebesar Rp0,00 sementara di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp41.852.235.000,00 dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp41.852.235.000,00. Selisih tersebut adalah pendapatan dana desa sebesar Rp41.852.235.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp839.997.748.191,79 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.556.539,10 atau terjadi peningkatan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp196.191.652,69 atau naik 0,02%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.176.269.585,00	11.006.714.870,10	169.574.694,90	1,54
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.000.096.422,70	2.354.215.128,00	(354.118.705,30)	(15,04)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.796.566.717,00	2.415.762.950,00	380.793.767,00	15,76
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	72.881.598.227,09	74.584.229.998,00	(1.702.630.770,91)	(2,28)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.699.998.917,00	51.462.886.775,00	(24.762.887.858,00)	(48,14)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber	27.148.318.318,00	18.897.650.392,00	8.250.665.926,00	43,66



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
	daya alam				
7	Penerimaan Dana Alokasi umum	452.753.785.000,00	438.897.960.562,00	15.855.824.438,00	3,63
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.651.640.399,00	163.261.780.880,00	(16.610.140.481,00)	(10,17)
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	41.852.235.000,00	0,00	41.852.235.000,00	100,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	39.025.311.603,00	69.572.147.878,00	(20.546.836.275,00)	(34,49)
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	10.011.920.023,00	7.828.208.106,00	2.183.711.917,00	100,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>839.997.748.191,79</b>	<b>839.801.556.539,10</b>	<b>196.191.662,69</b>	<b>0,02</b>

#### 5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp738.331.988.226,28 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp738.331.988.226,28. Sehingga tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Pembayaran Pegawai	375.400.727.878,95	375.400.727.878,95	0,00
2	Pembayaran Barang	249.419.979.153,33	249.419.979.153,33	0,00
3	Pembayaran Hibah	20.733.409.978,00	20.733.409.978,00	0,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Tak Terduga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6	Pembayaran Bagi hasil Pajak	1.188.858.383,00	1.188.858.383,00	0,00
7	Pembayaran Bagi hasil Retribusi	240.750.833,00	240.750.833,00	0,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa dan Partai Politik	91.198.262.000,00	91.198.262.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>738.331.988.226,28</b>	<b>738.331.988.226,28</b>	<b>0,00</b>

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp82.960.654.655,18 atau turun sebesar 12,66%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pembayaran Pegawai	375.400.727.878,95	375.198.145.727,83	202.582.151,12	0,05
2	Pembayaran Barang	249.419.979.153,33	224.250.350.259,27	25.169.628.894,06	11,22
3	Pembayaran Hibah	20.733.409.978,00	3.565.896.404,00	17.167.713.574,00	481,47
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Pembayaran Tak Terduga	150.000.000,00	3.061.054.001,00	(2.911.054.001,00)	(95,10)
6	Pembayaran Bagi hasil Pajak	1.188.858.383,00	923.276.367,00	265.582.016,00	28,77
7	Pembayaran Bagi hasil Retribusi	240.750.833,00	171.747.312,00	69.003.521,00	40,18
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembayaran Transfer	91.198.262.000,00	48.201.063.500,00	42.997.198.500,00	89,20





No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
	bantuan Keuangan ke Desa				
	Jumlah Arus Kas Keluar	738.331.988.226,28	655.371.333.571,10	82.960.654.655,18	12,66

### 5.5.1.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.665.759.965,51 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.430.222.968,00 atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp82.764.463.002,49 atau turun sebesar 44,88%.

### 5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	21.050.000,00	1.760.126.100,00
Arus Kas Keluar	140.442.064.438,00	202.572.297.511,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(140.421.014.438,00)	(200.812.171.411,67)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.050.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.760.126.100,00 atau terjadi penurunan arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.739.076.100,00 atau turun naik sebesar 98,80%.

Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.442.064.438,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp202.572.297.511,67 atau terjadi penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp62.130.233.073,67 atau turun 0,00%.

Sehingga, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp140.421.014.438,00) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp200.812.171.411,67) atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp60.391.156.973,67 atau turun sebesar 30,07%.

#### 5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp21.050.000,00 sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp0,00. Dimana tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Penjualan Atas tanah	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	21.050.000,00	0,00	21.050.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.050.000,00	0,00	21.050.000,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp1.760.126.100,00 atau turun sebesar 98,80%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Penjualan Atas tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	21.050.000,00	1.735.201.100,00	(1.714.151.100,00)	(98,79)
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	24.925.000,00	(24.925.000,00)	(100,00)
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		21.050.000,00	1.760.126.100,00	(1.739.076.100,00)	(98,80)

#### 5.5.2.2 Arus Keluar Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp140.442.064.438,00 sama halnya dengan realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp140.442.064.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Perolehan Tanah	19.108.000,00	19.108.000,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.339.182.991,00	26.339.182.991,00	0,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	33.431.528.257,00	33.431.528.257,00	0,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.154.111.140,00	77.154.111.140,00	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.769.134.050,00	2.769.134.050,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00
JUMLAH		140.442.064.438,00	140.442.064.438,00	0,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp62.130.233.073,67 atau naik sebesar 30,67%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Perolehan Tanah	19.108.000,00	11.111.952.077,00	(11.092.844.077,00)	(98,83)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	26.339.182.991,00	31.337.496.900,00	(4.998.313.909,00)	(15,95)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	33.431.528.257,00	69.288.871.660,08	(35.857.143.403,08)	(51,75)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.154.111.140,00	89.128.228.699,59	(11.974.117.559,59)	(13,43)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.769.134.050,00	1.205.948.175,00	1.563.185.875,00	129,82
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	729.000.000,00	500.000.000,00	229.000.000,00	45,80
Jumlah Arus Kas Keluar		140.442.064.438,00	202.572.297.511,67	(62.130.233.073,67)	(30,67)





### 5.5.2.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp)140.421.014.438,00) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp)200.812.171.411,67) atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp60.391.156.973, 67 atau turun 30,07%.

### 5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar. Selama tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak melaksanakan aktivitas pendanaan, baik penerimaan maupun pengeluaran aktivitas pendanaan.

### 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negera	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	45.639.263.652,00	55.709.715.503,54
Arus Kas Keluar	45.638.684.452,00	55.883.671.277,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	579.200,00	(173.955.774,00)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

#### 5.5.4.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.639.263.652,00 Jika dibandingkan dengan arus kas masuk aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 sebesar Rp55.709.715.503,54 terdapat penurunan sebesar Rp10.070.451.851,54 atau turun sebesar 18,08%, dengan rincian sebagai berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.638.684.452,00	55.672.597.374,54	(10.033.912.922,54)	(18,02)
2	Penerimaan Sisa Lebih Selur BOS	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Penerimaan Jasa Giro BOS Swasta Yang Harus Dikembalikan	0,00	2.866.179,00	(2.866.179,00)	0,00
4	Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Nagari dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	579.200,00	34.251.950,00	(33.672.750,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		45.639.263.652,00	55.709.718.303,54	(10.070.451.651,54)	(18,08)

Adapun rincian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	3.328.377.586,00	3.328.377.586,00	0
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.385.768.646,00	11.385.768.646,00	0
4	BPJS Kesehatan PNS	44.469.951,00	44.469.951,00	0
7	PPH Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	943.121.569,00	943.121.569,00	0
8	PPH Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.335.216.282,00	1.335.216.282,00	0
9	PPH Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	818.413.954,00	818.413.954,00	0
10	PPH Pasal 23 Jasa	195.849.701,00	195.849.701,00	0
12	PPH Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0
13	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	56.804.140,00	56.804.140,00	0
14	PPH Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.157.525.984,00	2.157.525.984,00	0
17	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	16.292.421.470,00	16.292.421.470,00	0
19	Lainnya	152.858.037,00	152.858.037,00	0
22	PPH Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	8.605.968.730,00	8.605.968.730,00	0
23	PPH Pasal 21 Masa	319.088.402,00	319.088.402,00	0
Jumlah		45.638.684.452,00	45.638.684.452,00	0,00

Pada tahun 2022 terdapat utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp37.118.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dari Jasa Giro BOS Sekolah Swasta. Dimana pada tahun 2022 terdapat jasa giro BOS Sekolah Swasta disetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.866.179,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kembali ke rekening sekolah swasta tersebut. Adapun rincian Jasa Giro BOS Sekolah Swasta tersebut sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

No	Uraian	Jumlah
1	SD IT MARHAMAH	432.354,00
2	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	904.192,00
3	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	693.972,00
4	SD01 YTKA	141.148,00
5	SD01 YTKA	311.182,00
6	SMP YTKA	176.410,00
7	SMP YTKA	154.948,00
8	SMP IT MARHAMAH	61.973,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.896.179,00</b>

2. Penerimaan Jasa Giro Kepada Pemerintahan Nagari yang berasal dari Jasa Giro Rek. Pemerintahan Nagari sebesar Rp32.985.597,00 yang dipotong oleh pihak Bank Nagari dan disetorkan ke kas daerah pada periode Januari sampai dengan Maret 2022, dimana per 31 Desember 2023 Jasa Giro tersebut belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari.

Adapun jasa giro rekening Pemerintahan Nagari yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Maret 2022 dan belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari sebagai berikut:

No.	NO_REK	NAMA_SINGKAT	JASA GIRO TH 2022 MASUK KE REK KASDA			
			JAN	FEB	MAR	TOTAL
1	13010101003172	LUBUK GADANG	213.809,00	225.043,00	626.858,00	1.070.508
2	13010101003093	LUBUK GADANG TIMUR	60.890,00	57.228,00	320.754,00	468.882
3	13010101003007	LUBUK GADANG SELATAN	115.541,00	127.240,00	501.281,00	744.042
4	13010101003101	LUBUK GADANG UTARA	134.824,00	143.958,00	451.485,00	730.067
5	13030101000049	LUBUK MALAKO	51.298,00	241.040,00	526.034,00	818.310
6	13030101000051	BIDAR ALAM	351.292,00	345.888,00	833.786,00	1.330.728
7	13030101000062	PADANG AIR DINGIN	161.952,00	215.118,00	365.191,00	722.261
8	13030101000089	PADANG LIMAU SUNDAI	74.710,00	76.372,00	243.510,00	394.592
9	13030101000025	PADANG GANTIANG	263.796,00	308.953,00	427.809,00	998.658
10	130301010000291	ABAI	127.825,00	191.738,00	342.674,00	662.236
11	130301010000128	DUSUN TANGAH	132.703,00	134.951,00	429.755,00	697.409
12	13010101003019	LUBUK ULANG ALING	233.058,00	372.302,00	479.820,00	1.085.260
13	130301010000965	LUBUK ULANG ALING SELATAN	318.535,00	461.524,00	478.893,00	1.258.942
14	13010101002994	LUBUK ULANG ALING TENGAH	112.186,00	254.982,00	409.471,00	776.642
15	13030101000086	RAHAH PANTAI CERMIN	126.053,00	200.012,00	366.132,00	756.197
16	13030101000074	SITAPUS	49.848,00	119.727,00	159.192,00	328.767
17	13030101000131	SUNGAI KUNYIT	161.693,00	305.911,00	526.908,00	1.014.213
18	13030101000104	TALAO SUNGAI KUNYIT	64.976,00	102.876,00	403.022,00	570.874
19	13030101000219	SUNGAI KUNYIT BARAT	135.704,00	310.467,00	533.488,00	979.657
20	13030101000037	TALUNAN MAJU	75.175,00	125.099,00	441.348,00	641.622
21	13000101003341	PASIR TALANG	139.532	146.268	508.047	793.847
22	13000101003383	PASIR TALANG BARAT	301.370	395.453	494.473	1.191.296
23	13000101003350	PASIR TALANG TIMUR	329.765	412.977	693.357	1.436.099
24	13000101003375	PASIR TALANG SELATAN	237.956	214.948	517.888	970.752
25	13000101003387	SAKO PASIA TALANG	84.903	145.822	171.258	402.053
26	13000101003431	SAKO UTARA PASIA TALANG	498.357	346.375	690.487	1.375.219
27	13000101003442	SAKO SELATAN PASIA TALANG	50.994	90.020	128.085	269.099
28	13000101003390	KOTO BARU	79.721	148.472	288.532	516.725
29	13000101003405	PULAKEK KOTO BARU	193.533	195.751	338.073	727.357
30	13000101003417	PASAR MUARA LABUH	534.080	475.951	733.674	1.743.905
31	13000101003429	BOMAS	60.894	199.910	362.411	623.215
32	13000101003302	PAKAN RABAA	67.120	273.437	296.405	636.962
33	13000101003338	PAKAN RABAA TIMUR	64.511	101.200	310.598	476.309
34	13000101003314	PAKAN RABAA UTARA	133.765	272.905	318.079	724.749
35	13000101003328	PAKAN RABAA TENGAH	84.896	110.980	435.055	630.931
36	13000101003454	ALAM PAUH DUO	222.828	198.247	575.352	996.427
37	13000101003481	KAPAU ALAM PAUH DUO	137.924	213.079	409.775	760.778
38	13000101003478	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	373.922	467.830	731.625	1.573.377
39	13000101003468	PAUH DUO NAN BATIGO	224.719	317.900	477.252	1.019.871





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	NO_REK	NAMA_SINGKAT	JASA GIRO TH 2022 MASUK KE REK KASDA			
			JAN	FEB	MAR	TOTAL
	TOTAL KESELURUHAN		6.851.495,00	9.080.324,00	17.053.774,00	32.985.597,00

3. Selain itu, terdapat jasa giro rekening entitas lainnya yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Desember 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kembali ke rekening entitas tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Zakat Dinkes Solok	954.022,00
2.	DAK SMKN 3 Solok Selatan	25.341,00
3.	Kwarcab	286.990,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.266.353,00</b>

#### 5.5.4.2. Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.638.684.452,00. Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.883.671.277,54. terdapat penurunan sebesar Rp10.244.986.825,54 atau turun sebesar 18,33%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.638.684.452,00	55.851.657.641,54	(10.212.973.189,54)	(18,29)
2	Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS	0,00	32.013.636,00	(32.013.636,00)	100,00
3	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BPJS Yang Harus Dikembalikan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>45.638.684.452,00</b>	<b>55.883.671.277,54</b>	<b>(10.244.986.825,54)</b>	<b>(18,33)</b>

- a. Pengeluaran PFK sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp45.638.684.452,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	3.328.377.586,00	3.328.377.586,00	0
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.385.768.648,00	11.385.768.648,00	0
4	BPJS Kesehatan PNS	44.469.951,00	44.469.951,00	0
7	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	943.121.569,00	943.121.569,00	0
8	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.335.216.282,00	1.335.216.282,00	0
9	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	818.413.954,00	818.413.954,00	0
10	PPh Pasal 23 Jasa	195.649.701,00	195.649.701,00	0
12	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
13	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	56.804.140,00	56.804.140,00	0
14	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.157.525.984,00	2.157.525.984,00	0
17	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	16.292.421.470,00	16.292.421.470,00	0
19	Lainnya	152.858.037,00	152.858.037,00	0
22	PPh Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	8.605.968.730,00	8.605.968.730,00	0
23	PPh Pasal 21 Masa	319.088.402,00	319.088.402,00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>45.638.684.452,00</b>	<b>45.638.684.452,00</b>	<b>0,00</b>

- b. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS sementara pada tahun 2022 telah disetorkan sisa salur BOS tahun 2011 yang disetorkan ke kasda berdasarkan Laporan Pelaksanaan Monitoring Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Solok Selatan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 2014 sebesar Rp32.013.636,00.

#### 5.5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp579.200,00. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp173.955.774,00) terdapat kenaikan sebesar Rp174.534.974,00 atau naik sebesar 100,33%.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.5.5. Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(38.754.675.272,49)</b>	<b>(16.555.904.217,67)</b>

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp38.754.675.272,49. Sementara pada Tahun 2022 sebesar Rp16.555.904.217,67. Terdapat penurunan kas sebesar Rp22.198.771.054,82 atau turun sebesar 134,08%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi realisasi APBD tahun 2023 dibanding tahun 2022. Penurunan kas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	101.685.759.985,51	184.430.222.968,00	(82.764.463.002,49)	(44,68)
2.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(140.421.014.438,00)	(200.812.171.411,67)	60.391.156.973,67	(30,07)
3.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	579.200,00	(173.955.774,00)	174.534.974,00	(100,33)
	<b>Kenaikan/Penurunan Kas bersih</b>	<b>(38.754.675.272,49)</b>	<b>(16.555.904.217,67)</b>	<b>(22.198.771.054,82)</b>	<b>134,08</b>





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

5.5.6. Saldo Awal Kas di KASDA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00

Saldo Awal Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 merupakan saldo Kas di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang per 1 Januari 2023. Sementara itu saldo awal Kas Daerah per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp106.618.873.069,00.

5.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.037.472.513,78. Sedangkan Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77%.

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Saldo Awal Kas di Kasda	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00	(27.475.527.075,26)	(25,77)
2	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.566,69	13.741.409,00	153.467.157,69	1.116,82
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.878,00	30.456.756,00	6.763.922,00	22,21
4	Saldo Awal Kas BLUD	12.193.379.820,62	1.906.618.457,84	10.286.761.362,68	538,53
5	Saldo Awal Bendahara BOS	701.982.844,00	495.866.011,00	206.314.833,00	41,62
6	Saldo Awal Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.855,00	(38.080.855,00)	100,00
7	Saldo Awal Kas Bendahara Kapitasi JKN	549.090.169,22	0,00	549.090.169,22	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	211.073.903,00	(211.073.903,00)	100,00
9	Saldo Awal Kas BUD (1 sd 8)	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94	(16.522.284.388,67)	(15,11)
10	Kenaikan/Penurunan Kas bersih	(38.754.675.272,49)	(16.555.904.217,67)	(22.198.771.054,82)	134,08
11	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (9+10)	54.037.552.799,78	92.758.608.243,27	(38.721.055.443,49)	(41,74)
12	Koreksi Saldo Awal	(80.288,00)	33.819.829,00	(33.700.115,00)	(100,00)
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (11+12)</b>	<b>54.037.472.513,78</b>	<b>92.792.228.072,27</b>	<b>(38.754.755.558,49)</b>	<b>(41,77)</b>



	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.8. Saldo Akhir Kas	(Rp)	(Rp)
	54.037.472.513,78	92.792.228.072,27

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.037.472.513,78. Sedangkan Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp38.754.755.558,49 atau turun sebesar 41,77% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	37.746.132.263,89	79.143.345.993,74	(41.397.213.729,85)	(52,31)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.212.712.840,00	167.208.586,69	3.045.504.273,31	1.821,38
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.499.253,00	37.220.678,00	(19.721.425,00)	(52,99)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.133.995.004,62	12.193.379.820,62	(1.059.384.816,00)	(8,69)
5	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	161.495.545,00	701.982.844,00	(540.487.299,00)	(76,99)
6	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapiteasi JKN	1.765.637.607,27	649.090.169,22	1.216.547.438,05	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Kas	64.037.472.513,78	92.792.228.072,27	(38.754.755.558,49)	(41,77)

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca, yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
5.6.1 Saldo Awal Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.152,30

Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp2.024.726.747.023,88 yang sama dengan saldo ekuitas akhir tahun 2022. Jika dibandingkan saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.915.664.775.152,30 terjadi peningkatan saldo awal ekuitas sebesar Rp109.061.971.871,58 atau meningkat sebesar 5,69%.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

5.6.2	Surplus/Defisit – LO	31 Des 2023	31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
		(48.684.992.712,31)	89.526.952.008,87

Nilai Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp48.684.992.712,31 merupakan defisit atas Kegiatan Operasional yang mengurangi Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan nilai surplus sebesar Rp138.211.944.721,18 atau turun sebesar 154,38%.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar.	31 Des 2023	31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
		(1.350.870.107,00)	19.535.019.862,71

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar (Rp1.350.870.107,00) merupakan akumulasi koreksi yang mengurangi Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19.535.019.862,71 terjadi penurunan sebesar Rp20.885.889.969,71 atau turun sebesar 106,92%.

Adapun rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebagai berikut:

NO	URAIAN	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		Jumlah (Rp)
		1. Dampak Kumulatif Penambahan Ekuitas	2. Dampak Kumulatif Penurunan/Pengurangan Ekuitas	1. Dampak Kumulatif Penambahan Ekuitas	2. Dampak Kumulatif Penurunan/Pengurangan Ekuitas	
1	KAS	0,00	0,00	0,00	101.047,00	(101.047,00)
2	PERSEDIAAN	72.283.804,00	211.806.404,00	0,00	0,00	(139.522.600,00)
3	PIUTANG	0,00	0,00	72.277.503,00	17.778.000,00	54.498.503,00
4	PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	451.422.980,00	0,00	451.422.980,00
5	ASET TETAP	0,00	0,00	0,00	275.380.000,00	(275.380.000,00)
6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0,00	0,00	1.280.898.543,00	3.265.068.859,00	(1.994.069.316,00)
7	ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	2.325.918.596,00	(2.325.918.596,00)
8	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0,00	0,00	6.287.128.635,52	3.527.248.548,52	2.739.879.089,00
9	KEWAJIBAN	0,00	0,00	138.320.880,00	0,00	138.320.880,00
	JUNLAH	72.283.804,00	211.806.404,00	8.220.146.541,52	9.431.497.048,52	(1.350.870.107,00)

5.6.4	Ekuitas Akhir	31 Des 2023	31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
		1.974.690.884.204,57	2.024.726.747.023,88

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp1.971.081.028.203,97 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2022 sebesar Rp2.024.726.747.023,88 terdapat penurunan nilai sebesar Rp50.035.862.819,31 atau turun sebesar 2,47%. Penghitungan nilai ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITED**

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	EKUITAS AWAL	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.152,30	109.061.971.871,58	2,21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.684.992.712,31)	89.526.952.008,87	(138.211.944.721,18)	(154,38)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(1.350.870.107,00)	19.535.019.862,71	(20.885.889.969,71)	(106,92)
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(139.522.600,00)	32.013.636,00	(171.536.236,00)	(535,82)
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.211.347.507,00)	19.503.006.226,71	(20.714.353.733,71)	(106,21)
6	EKUITAS AKHIR	1.974.690.884.204,57	2.024.726.747.023,88	(50.035.862.819,31)	(2,47)





## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang berada di ujung selatan selatan Sumatera Barat dengan ketinggian 300–950 m di atas permukaan air laut terletak diantara  $01^{\circ} 17' 13''$  -  $01^{\circ} 45''$  *Lintang Selatan* dan  $100^{\circ} 53' 24''$  -  $101^{\circ} 26' 27''$  Bujur Timur yang wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah dengan berbagai potensi hasil pertanian. Batas wilayah Kabupaten Solok Selatan meliputi:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Solok
Sebelah Timur	:	Kabupaten Dharmasraya
Sebelah Selatan	:	Propinsi Jambi
Sebelah Barat	:	Kabupaten Pesisir Selatan

dengan luas wilayah 3.346,20 kilometer persegi yang meliputi kawasan hutan mencapai 212.821 hektar, lahan sawah 9.490 hektar dan lahan lainnya 112.809 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 156.901 jiwa sebagaimana data Solok Selatan Dalam Angka Tahun 2015, bertempat tinggal tersebar di 7 kecamatan yang terbagi dalam 39 nagari dan 269 jorong.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencakup urusan:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Sosial;
- Tenaga Kerja;
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pangan;
- Administrasi kependudukan dan capil;
- Pengendalian penduduk dan KB;
- Perhubungan;
- Komunikasi dan informatika;
- Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Penanaman modal;



- p. Perpustakaan;
- q. Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga melaksanakan urusan yang mencakup:
  - aa. Pariwisata;
  - bb. Pertanian;
  - cc. Perindustrian;
  - dd. Administrasi Pemerintahan;
  - ee. Pengawasan;
  - ff. Perencanaan;
  - gg. Keuangan; dan
  - hh. kepegawaian.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## 6.2 Penjelasan tentang Penerapan Perpres Nomor 75 tahun 2017

Terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum melaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan lebih lanjut penilaian kembali barang Milik daerah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2017 pasal 21.

## 6.3 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sudah berada dalam masa sidang atau sudah masuk ke pengadilan sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdapat di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok melalui [http://sipp.pn-kotobaru.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kotobaru.go.id/list_perkara/search) yaitu:

1. Perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PNKbr yang diajukan oleh Heri Lotiansyah an CV. Gusti Family ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok dengan kalsifikasi





perkara perbuatan melawan hukum. CV. Gusti Family selaku penyedia atas Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan mengajukan gugatan perdata terhadap 1), Bapak Bupati Solok Selatan selaku Kepala Daerah sebagai Tergugat I, 2), Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat II, serta 3) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat III ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Gugatan tersebut diajukan karena CV. Gusti Family tidak terima atas penghentian kontrak secara permanen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan.

Penghentian kontrak secara permanen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok selatan didasari dengan berbagai pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah wabah penyakit non alam yang disebabkan oleh virus yang belum bisa diperkirakan/ diprediksi kapan akan berakhirnya, serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar.
- 2) Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Menerangkan bahwa penghentian kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kondisi kahar dapat bersifat permanen apabila tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikan nya pekerjaan.
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai kewenangan terhadap fungsi anggaran yang dapat menjamin ketersediaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2023, apabila proses kontrak ini dilanjutkan dengan menggunakan hasil tender yang sama.

Sampai saat ini, status perkara berada dalam putusan sela dengan lama proses 154 hari.



## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok selatan dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok selatan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Solok selatan yang lebih baik.

Padang Aro, Mei 2024  
BUPATI SOLOK SELATAN,



H. KHAIRUNAS